

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggung jawaban organisasi setiap Instansi Pemerintah mulai dari tingkat Eselon II ke atas secara berjenjang yang memiliki dan mengelola anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini, antara lain akan menguraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana target kinerja yang diperjanjikan, tingkat Capaian Kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan, sehingga benar-benar dapat dilihat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam wujud kinerja selama kurun waktu tahun 2012.

Selanjutnya dalam kerangka uraian Akuntabilitas Kinerja, pada Bab ini seyogianya diawali dengan uraian tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan seterusnya. Kemudian juga akan diperlihatkan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang dirumuskan dengan tetap mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, maka dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 atas pencapaian Sasaran Strategis dan pelaksanaan program/ kegiatan utama dan pokok yang dilaksanakan selama Tahun 2011 dalam konteks Pengukuran Kinerja dimaksud adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 yang secara sistematis didasarkan pada data kinerja dari masing-masing SKPD, Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2012, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012.

Pada akhir tahun 2012, data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikofirmasikan kembali kepada Tim Penyusun LAKIP atau kepada PNS yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan LAKIP di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, guna memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya disajikan dalam LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ini.

2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2012. Kemudian Pengukuran Kinerja tersebut difokuskan terhadap **Sasaran Strategis** yang dirumuskan dan diformulasikan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, yaitu 4 (empat) Sasaran Strategis.

Adapun sasaran strategis dimaksud antara lain terdiri-dari :

1. Meningkatnya Pembangunan di Sumatera Utara dengan Prinsip Dasar Pembangunan dalam Kerangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka terwujudnya Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
3. Meningkatnya infrastruktur Sosial dan Ekonomi
4. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan

Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang, dengan melakukan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dan selanjutnya dikalikan 100 % untuk memperoleh Tingkat Capaian Kinerja. Maka dengan demikian untuk pengukuran kinerja tersebut, digunakan rumus sebagaimana tertera dibawah ini, yaitu :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100 \%$$

CK = Capaian Kinerja
RK = Realisasi Kinerja
Tk = Target Kinerja

3. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja, akan memperlihatkan tingkat kegagalan dan keberhasilan atas Pencapaian terhadap 4 (empat) **Sasaran Strategis** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012, sehingga menjadi tolok ukur untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Rincian tentang hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 terhadap pencapaian Sasaran Strategis tersebut adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran III – LAKIP Tahun 2012 ini.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis 1 : *MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DI SUMATERA UTARA DENGAN PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA TERWUJUDNYA RAKYAT TIDAK BODOH, TIDAK LAPAR, TIDAK SAKIT DAN RAKYAT PUNYA MASA DEPAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME. Pencapaian Sasaran Starategis pertama ini akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebagai berikut :*

1. Persentase Peningkatan derajat pendidikan masyarakat

Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah terobosan dengan mengedepankan program-program terobosan, yaitu :

1. Memberikan Bantuan untuk sekolah bersubsidi (terjangkau)
2. Memberikan bantuan untuk kesejahteraan guru.
Selain guru (pendidik) memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan profesi, pendidik juga mendapat insentif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Melakukan manajemen berbasis digital (online).
Pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Provinsi memulai melakukan Rintisan Sekolah Binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk setiap jenjang SD, SMP, SMA dan SMK per Kabupaten/Kota, tahap awal (tahun 2010) sebanyak 132 satuan pendidikan yang terdiri dari (4 satuan pendidikan per kab/kota untuk semua jenjang)
4. Melakukan pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang.
Pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengadaan TV Demand Edukasi untuk 200 satuan pendidikan jenjang SD
5. Rintisan dan Implementasi Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun

6. Mengadakan Gebyar Pendidikan.
Untuk tahun 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan sebagai tuan rumah pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional ke-IX
7. Memprogramkan Pameran Pendidikan Bertaraf Nasional dan Internasional.
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 telah memprogramkan kegiatan pameran pendidikan nasional dan internasional dengan melibatkan seluruh peserta terbaik setiap provinsi untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ini (peserta Olimpiade Sains Nasional yang Ke-IX Tahun 2010)
8. Melaksanakan Kerjasama antara Dinas Pendidikan Sumatera Utara dengan Televisi Sumatera Utara.
9. Membuka Program Paket D (Setara D1).
10. Melaksanakan School Green (Penhijauan Sekolah).

Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada :

- 1 Kebijakan Perluasan dan Pemerataan Akses.
- 2 Kebijakan Peningkatan Relevansi.
- 3 Kebijakan Peningkatan Mutu dan Daya Saing.
- 4 Kebijakan Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas.
- 5 Kebijakan Peningkatan Pendidikan Sains, Teknologi dan Seni, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan dan daya saing di masa depan.
- 6 Kebijakan Pendidikan yang berkelanjutan, senantiasa relevan dan strategis dalam menghadapi setiap permasalahan dan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal pendidikan, tetapi juga peka terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat secara nasional, regional maupun dunia.

Sumber dana yang paling dominan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara selama ini adalah dari :

1. Pemerintah yang berupa :
 - 1.1 APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Gaji dan Kesra Pegawai
 - Block Grant / BOP.

1.2. APBN

- Bantuan Operasional Sekolah
 - Block Grant (SSN, RKB, RPL)
 - School Grant
2. Masyarakat / Orang tua Siswa, yang berupa :
- Siswa/Orang Tua Siswa
 - Sumbangan Dunia Usaha/Industri
 - Donatur Pribadi/NGO
 - Hasil Usaha Lembaga Pendidikan

Faktor-faktor yang berperan dalam kualitas pendidikan antara lain. efektivitas biaya, materi program, prinsip-prinsip pembelajaran, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta pendidikan, kemampuan dan preferensi instruktur pendidikan. Optimalisasi peran faktor-faktor peningkatan kualitas pendidikan ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh seberapa besar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan sejauh mana efektivitas penggunaan alokasi anggaran tersebut dalam bentuk hasil program dan kegiatan.

Sejauh ini, faktor besarnya alokasi anggaran pemerintah (governmental budget) untuk sektor pendidikan masih dianggap faktor yang paling dominan dalam upaya percepatan peningkatan kualitas SDM. Berdasarkan data empiris terdapat korelasi yang positif antara besarnya anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan dari APBN suatu negara terhadap kualitas SDM dinegara tersebut. Seperti telah dipaparkan pada bahagian sebelumnya, kualitas SDM dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Produktivitas, Daya Saing SDM, dan Daya Tarik Investasi dari suatu negara. Mengapa peringkat IPM Indonesia jauh dibawah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Maysia, Singapura, Thailand dan Filipina? Salah satu faktor yang diyakini sebagai salah satu penyebab utamanya adalah persentase alokasi APBN untuk anggaran pendidikan di Indonesia selama ini (sampai dengan APBN RI tahun anggaran 2008) relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga tersebut.

Keinginan yang kuat secara politik untuk membenahi sektor pendidikan Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara

tetangga tersebut telah diakomodasi oleh UUD 1945 yang diamandemen, secara tegas telah mengatur alokasi 20 persen belanja APBN untuk sektor pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan baru akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ketika pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang mengharuskan pemerintah untuk mematuhi dan melaksanakan amanah konstitusi tersebut.

8 & 7 TUJUAN STRATEGIS
PROGRAM TEROBOSAN

Indikator Kinerja, Program & Kegiatan dan Kelompok Sasaran
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018



4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

AKSES	Masalah & Tantangan	Arah & Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Pemerataan Layanan ... 	<p>memastikan ketersediaan dan keterjangkauan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kelayakan Sarana-prasarana Kualitas & distribusi guru Pendidikan karakter Keselarasn dengan dunia kerja Kompetensi Lulusan ... 	<p>meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara efektif Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra masih terbatas ... 	<p>menuntaskan konservasi, pengembangan, dan promosi budaya dan bahasa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel ... 	<p>memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel</p>



DINAS PENDIDIKAN
Provinsi Sumatera Utara

Disampaikan oleh : Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Tolak ukur capaian sasaran ke-1 ini, diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Peningkatan derajat pendidikan masyarakat** yang mencakup 3 (tiga) sub indikator kinerja, yaitu :



1. Meningkatnya APK SD + MI
2. Meningkatnya APM SD/ SLB
3. Meningkatnya APK SMP/ SMPLB
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB
5. Meningkatnya APK SMA/ SMK
6. APM SMA
7. Meningkatnya APK PAUD Non Formal

8. Persentase Guru SD/ SDLB yang bersertifikat akademik S1, D4
9. Persentase Guru SMK yang bersertifikat kompetensi
10. Persentase Sekolah yang telah menjadi percontohan sekolah sehat
11. Persentase perguruan tinggi yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar perguruan tinggi

Tingkat capaian indikator persentase peningkatan derajat pendidikan di Sumatera Utara, adalah sebagaimana pada Tabel 17 di bawah ini :

TABEL 17
CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA
PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
2	3	4	5
Persentase Peningkatan derajat pendidikan masyarakat, <i>dengan Sub Indikator, yaitu :</i>	10,07 % / tahun	10,07 % / tahun	100%
1. <i>Meningkatnya APK SD + MI</i>	111,64 %	104,56 %	93,66 %
2. <i>Meningkatnya APM SD/ SDLB</i>	92,36 %	91 %	99,03 %
3. <i>Meningkatnya APK SMP/ SMPLB</i>	104 %	89,02 %	85,60 %
4. <i>Meningkatnya APM SMP/ SMPLB</i>	96,20 %	67,96 %	70,64 %
5. <i>Meningkatnya APK SMA/ SMK</i>	86,29 %	79,69 %	92,35 %
6. <i>APM SMA</i>	71,29 %	57,89 %	
7. <i>Meningkatnya APK PAUD NON FORMAL</i>	92,29 %	92,29 %	100%
8. <i>Persentase Guru SD/ SDLB berkualifikasi akademik S1-D4</i>	27,10%	24,02%	88,63%
9. <i>Persentase Guru SMK bersertifikat Kompetensi</i>	36%	0%	0%
10. <i>Persentase sekolah yang telah menjadi percontohan sekolah sehat</i>	47,82%	0%	0%
11. <i>Persentase perguruan tinggi memiliki sarana sesuai standar perguruan tinggi</i>	10%	12,20%	122%

Pada umumnya capaian indikator kinerja hasilnya relatif baik, hal ini dilihat dari tingkat capaian kinerja yang berkisar antara 70, 64% s/d 122 %, sekalipun dengan demikian masih terdapat 2 (dua) indikator dari keseluruhan indikator yang berjumlah 11 (sebelas) yang belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Sehingga dengan demikian bahwa dari ke- sebelas sub indikator, hanya 81, 81 % yang telah terlaksana sekalipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan sedangkan 27,27 % lagi belum mencapai target semestinya. Dan hal ini akan menjadi fokus perhatian ke depan demik tercapainya target kinerja di sektor pendidikan yang semakin baik di Provinsi Sumatera Utara.



Kinerja Yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah :

1. APK SMA/SMK 71,29 %,
2. Kota ber APK > 70,68% sebanyak 8 kota
3. Kabupaten ber APK > 70,68 sebanyak 20 kabupaten.
4. Persentase SMA yang memiliki perpustakaan 69,94 %
5. Persentase SMA yang memiliki laboratorium multimedia 49,74 %
6. Persentase SMK yang memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standar sarana dan prasarana SMK menjadi 51,42 %.

Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini melalui berbagai kegiatan penyediaan sarana/prasarana, yaitu :

- Terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar pendidikan dasar 9 (*sembilan*) tahun diharapkan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjut ke jenjang lebih tinggi serta tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (*sembilan*) tahun. Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah:
 1. APM SD/SDLB menjadi 111,64 %
 2. Jumlah kota ber APM >83,57 sebanyak 8 kota
 3. Jumlah kabupaten ber APM > 83,57 sebanyak 25 kabupaten
 4. Persentase SD yang memiliki sarana komputer menjadi 54,56 %
 5. APK SMP /SMPLB menjadi 96,20%, tercapai hanya 67,96 %

6. APM SMP/SMPLB menjadi 86,29 %, tercapai hanya 79,69 %
 7. Jumlah Kota ber APK > 76,53 sebanyak 8 kota
 8. Jumlah Kabupaten ber APK> 76,53 sebanyak 25 kabupaten
 9. Jumlah Kota ber APM> 58,17 sebanyak 8 kota
 10. Jumlah Kabupaten ber APK> 58,17 sebanyak 25 kabupaten
 11. Persentase SMP yang memiliki Lab IPA menjadi 56,47%
 12. Persentase SD yang memiliki perpustakaan menjadi 52,67%
 13. Persentase SMP yang memiliki perpustakaan 56,89%.
- Terlaksananya peningkatan akses pendidikan menengah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, menurunkan angka putus sekolah menurunnya rata-rata penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang, meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK dan yang sederajat serta yang lulus ujian nasional.
 - Meningkatnya penduduk mengikuti pendidikan non formal bagi penduduk yang tidak mengikuti pendidikan keaksaraan, tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan Indikator Kinerja Yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah : APK PAUD Non Formal menjadi 92,19%, namun pencapaiannya baru pada tingkat 33,55 %.
 - Meningkatkan jumlah rasio guru dan siswa, tenaga kependidikan, pemerataan dan peningkatan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran. Indikator Kinerja yang akan dicapai 2012 adalah:
 1. Persentase guru TK/SLB berkualifikasi akademik S1/D4 menjadi 38,99%, dan sudah tercapai di tahun 2012.
 2. Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 menjadi 27,10 %, capaiannya hanya 24,02 %.
 3. Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 menjadi 76,12 %
 4. Persentase guru SMA berkualifikasi S1/ D4 menjadi 88,95 %
 - Meningkatkan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan penerapan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan

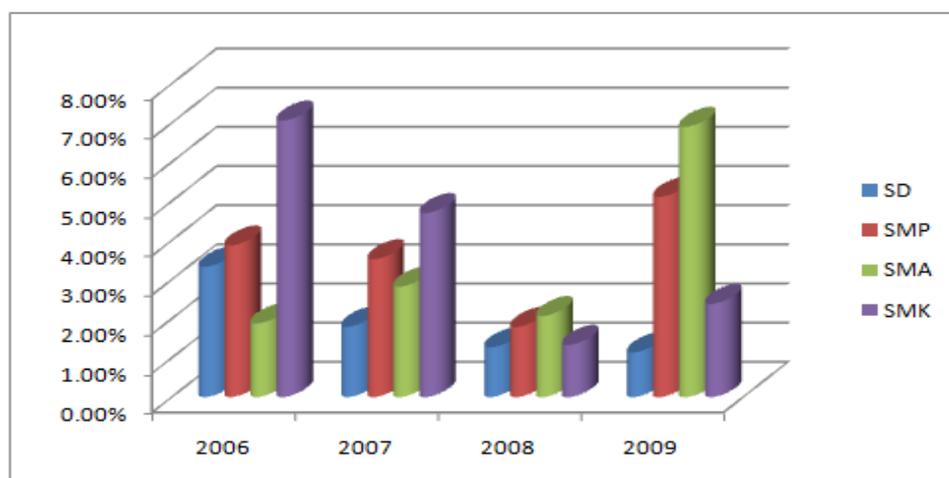
desentralisasi pengelolaan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparan, bertanggungjawab akuntabilitas serta partisipatif Indikator kinerja yang akan dicapai tahun 2012 adalah Persentase kehadiran pegawai tidak kurang dari 99% menjadi 100 %.

- Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doctor, melalui akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja Indikator Kinerja Yang akan dicapai tahun 2012 adalah APK perguruan tinggi usia 19-23 menjadi 23 %.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara agar sesuai dengan standar nasional pendidikan, senantiasa dilakukan penyesuaian program dan kegiatan setiap tahunnya, terutama dalam hal mencapai pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi daya saing dan penguatan tata kelola, serta akuntabilitas pendidikan.

Hal ini seiring dengan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara dibidang pendidikan dengan sasaran bagaimana masyarakat Sumatera Utara tidak bodoh, yang di ukur dengan berbagai indikator seperti pencapaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, meningkatkan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

*Grafik 1.
Persentase perkembangan putus sekolah
pada berbagai jenjang pendidikan t
ahun 2006-2009*



Hasil-hasil yang akan dicapai, sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2012 di bidang pendidikan yaitu :

1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) :

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2011 sebesar 31,50% menjadi 92,29 % Tahun 2012.
- b. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat pada tahun 2011 dicapai 111,40 % menjadi 111,64 % pada tahun 2012.
- c. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat pada tahun 2011 dicapai 101,19 % menjadi 104,00 % pada tahun 2012.
- d. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada tahun 2011 dicapai 83,76 % menjadi 86,29 % pada tahun 2012.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar tahun 2011 dicapai 92,66 % menjadi 94,51 % Tahun 2012.
- f. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2011 dicapai 93,26 % menjadi 96.20 % Tahun 2012.
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 2011 dicapai 66,04 % menjadi 69,53 % Tahun 2012.

Kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini menggambarkan bahwa bertambah banyak anak-anak bersekolah. Hal ini karena antara lain adanya pembinaan kesiswaan dengan pemberian beasiswa miskin, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penambahan alat peraga dan media pembelajaran, rehab ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru.

2) Jumlah siswa pada jenjang TK/KB/Penitipan Anak pada tahun 2011 sebanyak 136.143 orang dan menjadi 271.971 orang pada tahun 2012.

3) Perkembangan Angka Putus Sekolah

- a. Angka putus sekolah SD pada tahun 2011 sebanyak 4.321 orang menjadi 3.889 orang pada tahun 2012.

- b. Angka putus sekolah SMP pada tahun 2011 sebanyak 3.555 orang menjadi 2.658 orang pada tahun 2012.
- c. Angka putus sekolah SMA pada tahun 2011 sebanyak 7.025 orang menjadi 4.025 orang pada tahun 2012.

4) Perkembangan angka kelulusan

- a. Angka kelulusan SD pada tahun 2011 adalah sebanyak 275.428 orang menjadi 278.219 orang pada tahun 2012.
- b. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2011 adalah sebanyak 244.124 orang menjadi 242.182 orang pada tahun 2012.
- c. Angka kelulusan SMA pada tahun 2011 adalah sebanyak 116.707 orang menjadi 120.090 orang pada tahun 2012.

5) Perkembangan angka melanjutkan sekolah

- a. Angka melanjutkan SD/MI pada tahun 2011 adalah sebanyak 205.289 orang menjadi 215.553 orang pada tahun 2012.
- b. Angka melanjutkan SMP/MTs pada tahun 2011 adalah sebanyak 244.124 orang menjadi 278.219 orang pada tahun 2012.

6) Perkembangan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, pada tahun 2011 adalah sebanyak 244.124 menjadi 242.182 orang pada tahun 2012.

7) Jumlah guru yang berijazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 pada tahun 2011 sebanyak 120.603 guru dan tahun 2012 sebanyak 93.900 guru.

8) Pencapaian program wajib belajar 12 tahun, dimana pada tahun 2011 dan tahun 2012 masih dalam tahap sosialisasi dan rintisan ke kabupaten/kota.

9) Pelaksanaan pendidikan standar internasional, pada TA. 2011/2012 sebanyak 114 siswa dan TA. 2012/2013 sebanyak 120 siswa sehingga jumlah siswa pada 2012 sebanyak 234 orang (SMK BI yang baru dibuka pada tahun ajaran 2011/2012).

10) Angka melek huruf 15 tahun keatas, pada tahun 2011 adalah 97,50% dan menjadi 97,65 % pada tahun 2012.

11) Penyandang Ketunaan, yaitu :

- a. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2011 adalah 3.015 orang menjadi 1.664 orang pada tahun 2012.
- b. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2011 adalah 211 orang menjadi 411 orang pada tahun 2012.
- c. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2011 adalah 131 orang menjadi 36 orang pada tahun 2012.



PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program ini mencakup kegiatan, yang terdiri-dari :

- 1) Peningkatan Mutu Pengadaan KIT Guru dan Siswa Modern (KIT GSM) Tingkat SD.
- 2) Pengadaan Sistem Manajemen Sekolah Berbasis IT Tingkat SMP.
- 3) Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Provinsi.
- 4) Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan *International Mathematic Centre* (IMC) Jenjang SD.
- 5) Pembinaan dan Pembekalan Peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SD.
- 6) Peningkatan Mutu Pengadaan KIT Guru dan Siswa Modern (KIT GSM) Tingkat SMP.
- 7) Pengadaan Komputer PC untuk Sekolah Tingkat SD.
- 8) Pengadaan Komputer PC untuk Sekolah Tingkat SMP.
- 9) Lomba Seni Siswa SD Tingkat Provinsi.
- 10) Lomba Olahraga Siswa SD Tingkat Provinsi.
- 11) Pengadaan Buku Profil Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Jenjang SD.
- 12) Pengadaan Buku Rangkuman/Intisari Mata Pelajaran Ujian Nasional Jenjang SD.

- 13) Pengadaan Buku Panduan Tenaga Pendidik Berbasis IT untuk Jenjang SD.
- 14) Pengadaan Buku Panduan Pendidik Sarana Guru Berbasis IT untuk Jenjang SMP.
- 15) Pengadaan Buku Pengetahuan Bencana Alam dan Alat Mitigasi Gempa untuk Jenjang SD.
- 16) Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga dan Seni (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SMP.
- 17) Pengadaan Alat Peraga Matematika untuk Tingkat SD.
- 18) Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Tingkat SD.
- 19) Seleksi Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP Tingkat Provinsi.
- 20) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pengadaan Buku Referensi Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer untuk SD.
- 21) Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 22) Pengadaan Multimedia Pembelajaran Sejarah Indonesia Bagi Sekolah Tingkat SMP.
- 23) Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi.
- 24) Lomba Olahraga Siswa SMP Tingkat Provinsi.
- 25) Pengadaan Alat Multimedia Pengenalan Budaya Nusantara SD.
- 26) Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas kepada Siswa Jenjang SMP.
- 27) Pengadaan Alat Peraga dan Praktek Laboratorium Saint (Science) untuk Jenjang SMP.
- 28) Pengadaan Alat Peraga Multimedia Virtual 3D Realty untuk Mata Pelajaran Fisika Jenjang SMP.
- 29) Supervisi Penilaian dan Pengolahan Analisis Data SLB di Provinsi Sumatera Utara.
- 30) Jambore Penghijauan se Ekosistem Kawasan Danau Toba (EKDT).
- 31) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Sains SMP Berbasis Komputer.
- 32) Pengadaan Alat Peraga dan Analisa Laboratorium Fisika Berbasis Sistem Digital tingkat SMP.
- 33) Penyediaan Aplikasi Pembelajaran Biologi SMP Dengan Alat Peraga Jelajah 3D.
- 34) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan untuk Sekolah Jenjang SD.
- 35) Penyelenggaraan Ujian Nasional SD, MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2011/2012.

- 36) Pengadaan Alat Peraga dan Praktek Matematika dan Ilmu Sosial Tingkat SMP.
- 37) Pengadaan Sarana Belajar Mengajar Secara Digital di Ruang Kelas untuk Jenjang SMP.
 - 38) Pengadaan Peralatan Multimedia pada Ruang Kelas untuk Jenjang SMP.
 - 39) Pengadaan Peralatan Media Penyimpanan dan Penunjang Alat Laboratorium SMP.
 - 40) Pengadaan Alat Bantu Ajar Guru PAI dan Software Pembelajaran Baca Tulis Jenjang SD.
 - 41) Pengadaan Buku Ensiklopedia Berwawasan Kebangsaan Jenjang SD.

Permasalahan :

Kegiatan pengadaan buku ensiklopedia berwawasan kebangsaan jenjang SD tidak dapat dilaksanakan karena adanya batal tender oleh karena waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakannya.

Solusi :

Akan diusulkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

2. Program Pendidikan Menengah, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Jenjang SMA Negeri/Swasta Tingkat Provinsi.
- 2) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pengadaan Buku Referensi Ensiklopedi.
- 3) Pengadaan Multimedia Pembelajaran Geografi Bagi Sekolah Tingkat SMA.
- 4) Pengadaan Komputer PC untuk Sekolah Tingkat SMA.
- 5) Pengadaan Laboratorium IPA untuk Tingkat SMA.
- 6) Workshop Pembekalan Tim Pengembangan Kurikulum SMA.
- 7) Validasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri/ Swasta.
- 8) Pendampingan Peserta Lomba Seni dan Olahraga Tingkat Nasional.
- 9) Penyediaan Laboratorium Multistudy Bagi Sekolah Tingkat SMA.

- 10) Pengadaan Alat Peraga MIPA dan Elektronika untuk Jenjang SMA.
- 11) Seleksi Sains Olimpiade Provinsi.
- 12) Pengadaan Alat Peraga Multimedia Virtual 3D Realty untuk Mata Pelajaran Fisika Jenjang SMA.
- 13) Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa Multi Education Berbasis SMS Gateway Jenjang SMA.
- 14) Alat Peraga IPA SMA Berbasis Komputer.
- 15) Pengadaan Alat Peraga dan Analisa Laboratorium Fisika Berbasis Digital Tingkat SMA.
- 16) Penyediaan Alat Peraga Jelajah 3D Berbasis TIK untuk Pembelajaran Biologi Jenjang SMA.
- 17) Pengadaan Sarana Belajar Mengajar Secara Digital di Ruang Kelas untuk SMA.
- 18) Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Jenjang SMA.
- 19) Pengadaan Alat Olahraga Jenjang SMA.
- 20) Pengadaan Sistem Manajemen Sekolah Berbasis IT Tingkat SMA.
- 21) Pengadaan Alat Evaluasi Belajar dan Administrasi Sekolah Jenjang SMA Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- 22) Sosialisasi Anti Narkoba.
- 23) Pengadaan Buku Referensi Jenjang SMA.
- 24) Pengadaan Peralatan Pengenalan Ilmu Elektronika dan Kelistrikan Tingkat SMA.
- 25) Pengadaan Alat Peraga/Praktek Pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial Tingkat SMA.
- 26) Pengadaan Peralatan Media Penyimpanan dan Penunjang Alat Laboratorium SMA.
- 27) Pengadaan Perangkat WIFI Sarana Pembelajaran Berbasis Web dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang SMA.
- 28) Pengadaan Perangkat Pengolahan Formulir Ujian dan Dokumen Kerja Sekolah Berbasis TIK Jenjang SMA.
- 29) Pengadaan Alat Microscope Digital SMA.

3. Program Pendidikan Non Formal, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan.
- 2) Peremajaan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal dalam Sistem Informasi Manajemen.

- 3) Lomba Kreatif Taman Baca Masyarakat.
- 4) Peringatan Hari Aksara Internasional.
- 5) Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa PAUD.
- 6) Workshop Himpaudi Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 7) Rapat Koordinasi Pengelola Pendidikan Non Formal.
- 8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program PNFI.
- 9) Pembekalan Peserta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK-PNF) Berprestasi Tingkat Provinsi ke Nasional.
- 10) Buletin PAUDNI.
- 11) Peningkatan Mutu Pengadaan KIT Guru dan Siswa Modern (KIT-GSM) Tingkat PAUD.
- 12) Pengadaan Buku PAUD/TK.
- 13) Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Perkembangan dan Kognitif PAUD.
- 14) Pembinaan Kelompok Belajar Penyelenggara Program PNFI.

4. Program Pendidikan Luar Biasa, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pembekalan Siswa Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional SDLB dan SMPLB.
- 2) Pengadaan Alat Bantu Siswa Tuna Netra untuk SLB.
- 3) Pengadaan Alat Bantu Siswa Tuna Daksa untuk SLB.
- 4) Pengadaan Alat Peraga/Praktek SLB.
- 5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala SLB.
- 6) Pembangunan Gapura SLB.
- 7) Pembuatan Lapangan Parkir SLB.
- 8) Pembangunan Selasar SLB.
- 9) Pengadaan Meubilair Untuk Jenjang SLB.
- 10) Pengadaan Sarana Dan Prasarana SLB-E Pembina.

Permasalahan :

Kegiatan pengadaan meubilair untuk jenjang SLB dan pengadaan sarana dan prasarana SLB-E pembina tidak dapat terlaksana karena adanya batal tender oleh karena waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakannya.

Solusi :

Akan diusulkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Pemberian Penghargaan Bagi Guru SLB Berdedikasi Tingkat Provsu.
- 2) Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok TK, SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Tidak Tetap di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Peningkatan Kualifikasi Bagi Pendidik/Guru SD dan PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Sarjana (Lanjutan dan Baru).
- 6) Peningkatan Mutu Belajar dan Pembelajaran Bidang Studi Matematika dan Bahasa Indonesia Jenjang SMP.
- 7) Peningkatan Mutu Belajar dan Pembelajaran Bidang Studi Matematika dan Bahasa Indonesia Jenjang SD di Sumatera Utara.
- 8) Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa.

• **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Workshop Tentang Berbagai Isu Pendidikan.
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se Sumatera Utara.
- 4) Workshop Pendataan Pendidikan Sumatera Utara.
- 5) Penunjang Kelancaran Kegiatan Panitia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012.
- 6) Pengelolaan Jardiknas Sumatera Utara.
- 7) Penyusunan Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Beasiswa S1 dan S2.
- 9) Penyusunan Profil Pendidikan Sumatera Utara.

- 10) Penggandaan Buku Muatan Lokal di Sumatera Utara.
- 11) Beasiswa S3.
- 12) Sosialisasi Akreditasi Pendidikan Non Formal.
- 13) Pengadaan Barang Peralatan Multimedia.

Permasalahan :

Kegiatan Beasiswa S3 tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak cukup untuk menyurati universitas sehingga tidak dapat dilaksanakan secara teknis.

Solusi :

Akan diusulkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

6. Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengadaan Alat Evaluasi Belajar dan Administrasi Sekolah Jenjang SMK
- 2) Pelaksanaan Prakerin Dalam Negeri Bagi Siswa SMK
- 3) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Program Keahlian Teknik Bangunan.
- 4) Pengadaan Alat Peraga dan Praktek IPA Untuk Sekolah Kejuruan.
- 5) Workshop Kewirausahaan dan *Business Centre*.
- 6) Workshop Manajerial dan *Re Engineering* SMK.
- 7) Seleksi dan Pengiriman Siswa Berprestasi.
- 8) Pembinaan Persiapan LKS Tingkat Nasional.
- 9) Pemantauan Evaluasi RSBI dan SBI Jenjang SMK.
- 10) Sosialisasi Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan Program APBD.
- 11) Pengadaan Alat Praktek dan Pengajaran Mekatronika SMK Jurusan Mesin/Mekatronika Berbasis IT.
- 12) Pengadaan Buku Pengayaan Program Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Jenjang SMK.
- 13) Pengadaan Buku Kepariwisata Indonesia untuk Kepustakaan Sekolah.
- 14) Pengadaan Multimedia Sarana Guru Jenjang SMK untuk Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.

- 15) Peningkatan Manajemen Mutu ISO Sekolah Standar Nasional (SSN) Menuju Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
- 16) Pengadaan Buku Panduan Tenaga Pendidik Jenjang SMK.
- 17) Lomba Teknologi, Inovasi dan Seni Siswa SMK.
- 18) Rencana Kerja SMKN-BI Sumatera Utara.
- 19) Pengadaan Perangkat Pembelajaran Audio Visual Jenjang SMK Kompetensi Keahlian Teknik Permesinan.
- 20) Pengembangan Kecakapan Hidup Teknik Furniture.
- 21) Diklat Manajemen Bengkel Bangunan.
- 22) Pengembangan Kecakapan Hidup Bidang Keahlian Teknik Listrik.
- 23) Diklat Manajemen Bengkel Teknik Mesin.
- 24) Pengembangan Diklat Memproduksi Teaching AID Otomotif.
- 25) Diklat Manajemen Bengkel Otomotif.
- 26) Sosialisasi dan Kerjasama UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Pengembangan Unit Produksi dan Sumber Daya Manusia di UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik.
- 27) Pengembangan Pelayanan dan Informasi UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik Provinsi Sumatera Utara Dalam Bentuk Website Berbasis Data.
- 28) Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa Education Berbasis SMS Gateway Jenjang SMK.
- 29) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Matematika dan Kimia untuk Jenjang SMK.
- 30) Monitoring Pemanfaatan Alat/Sarana Pendidikan Jenjang SMK.
- 31) Workshop Pembekalan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- 32) Pelaksanaan Prakerin Luar Negeri Bagi Siswa SMK.
- 33) Pengadaan Operasional Bahan Praktek Peserta Didik Pada Workshop Otomotif.
- 34) Pengadaan Bahan Praktek Bangunan.
- 35) Pengadaan Bahan Praktek Elektronika.
- 36) Pengadaan Bahan Praktek Mesin.
- 37) Pengadaan Theodolite Untuk Tingkat SMK.
- 38) Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Jenjang SMK.
- 39) Pembuatan Dan Pemeliharaan Taman UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik.

40) Pengadaan Kursi Rapat UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik.

Permasalahan :

- 1) Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa program keahlian teknik bangunan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak cukup untuk dilaksanakan secara teknis.
- 2) Kegiatan operasional bahan praktek peserta didik pada workshop otomotif, pengadaan bahan praktek bangunan, pengadaan bahan praktek elektronika, pengadaan bahan praktek mesin dan pengadaan kursi rapat UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan kode rekening untuk kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa jenjang SMK tidak dapat dilaksanakan karena adanya batal tender oleh karena waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakannya.

Solusi :

- 1) Diupayakan untuk diusulkan pada tahun berikutnya.
- 2) Akan diusulkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.
- 3) Akan diusulkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Peralatan Laboratorium Perguruan Tinggi.
- 2) Peningkatan Sarana Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- 3) Penerbitan Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi.
- 4) Workshop Metode Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Dosen Perguruan Tinggi.
- 5) Fasilitasi Kegiatan Unit Mahasiswa Perguruan Tinggi.
- 6) Workshop Kewirausahaan Mahasiswa Perguruan Tinggi.
- 7) Pembinaan Kegiatan Komando Resimen Mahasiswa Sumatera Utara.
- 8) Konferensi International ICoCSIM 2012.

2. Persentase Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai **PENCAPAIAN SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN** melalui pelaksanaan kegiatan/program kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pencapaian target sasaran utama di tahun 2012 yaitu menurunkan :

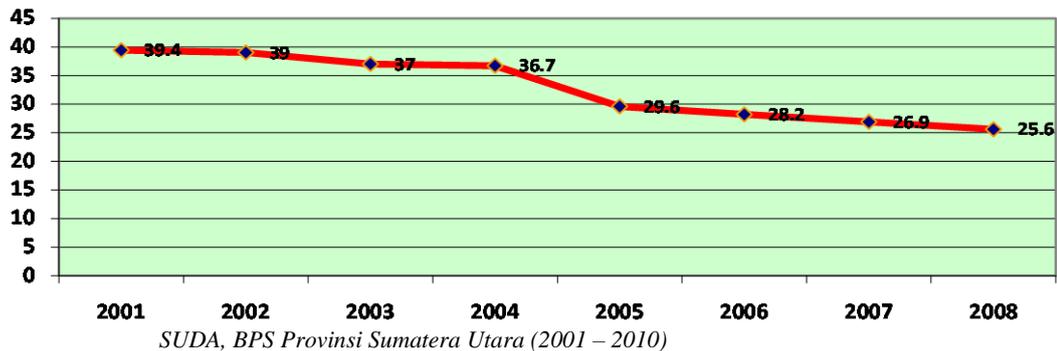
1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar **23 per 1.000 kelahiran hidup**;
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar **285 per 100.000 kelahiran hidup**;
3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu **20,6%** dan meningkatkan
4. Meningkatkan Umur Harapan Hidup penduduk mencapai **71,2 tahun**.

2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)



Berdasarkan data BPS, AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2001, AKB adalah sebesar 39,4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mampu diturunkan menjadi 25,6 per 1.000 kelahiran hidup, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2
Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant
Mortality Rate (IMR) Tahun 2001 - 2008:



Berdasarkan hasil Survey AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh FKM USU pada tahun 2010, dilaporkan AKB di Sumatera Utara yaitu 23/1.000 kelahiran hidup. Dengan memperhatikan kecenderungan besaran penurunan AKB yang terjadi kurun waktu 2001-2010 tersebut, maka diperhitungkan besaran penurunan AKB yaitu dari 1,7 sampai 1,3 per 1.000 kelahiran hidup. Maka diperhitungkan AKB Sumatera Utara pada tahun 2012 yaitu 21 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKB tahun 2012 yaitu menurunnya AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup **telah mampu dicapai**.

2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara.



Berdasarkan Survei AKI dan AKB di Provinsi Sumatera, diketahui ada 273 kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas dari 101.695 kelahiran hidup. Maka diperhitungkan AKI pada tahun 2010 yaitu 268/100.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKI

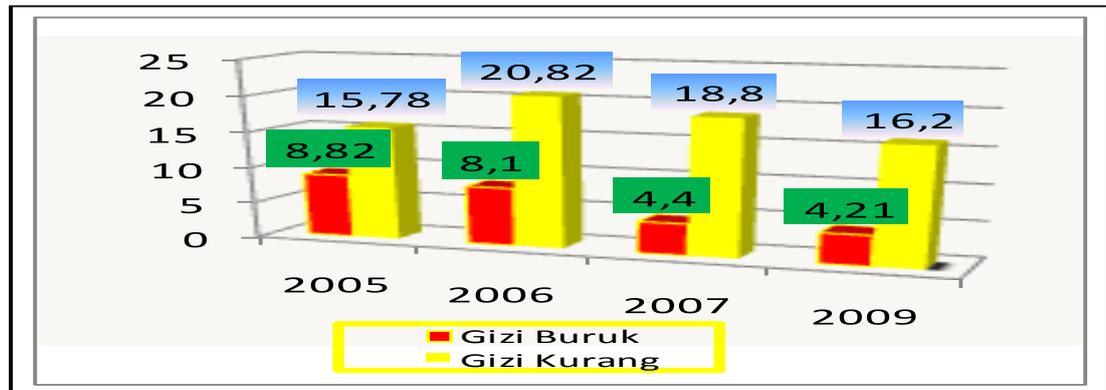
tahun 2012 yaitu menurunnya AKI menjadi 285 per 100.000 kelahiran hidup **telah mampu dicapai**.

2.3. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2006, yang mencapai angka hampir 30%. Peningkatan ini cukup drastis bila dibandingkan dengan angka tahun 2005 yaitu 26,6%.

Grafik 3

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2005-2009



Sumber : Survey PSG 2005-2009

Status gizi balita di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan sejak tahun 2007, dimana hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan FKM USU pada tahun 2007 dan 2009 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun yaitu dari 23,2% (18,8% gizi kurang dan 4,4% gizi buruk) menjadi 20,41% (gizi kurang yaitu 16,2% dan gizi buruk 4,21%).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kemenkes tahun 2010, menunjukkan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara yaitu 21,4%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 22,7%.

Dengan melihat trend penurunan kurun waktu lima tahun tersebut maka diperhitungkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara mampu diturunkan menjadi 20,3% pada tahun 2011. Dengan demikian sasaran prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita yaitu 20,6% pada tahun 2012 **tercapai**.

2.4. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 18
Pencapaian UHH Tahun 2004-2010

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UHH	67,3 tahun	68,7 tahun	68,9 tahun	69,1 tahun	69,2 tahun	69,35 tahun	69,5 tahun

Sumber : SUDA; BPS 2005-2010, SP 2010 BPS 2011.

Berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat ada peningkatan UHH penduduk setiap tahunnya, namun peningkatan ini bergerak lambat. Tahun 2004-2005, UHH penduduk mampu ditingkat sebesar 1,4 tahun, namun kurun waktu 2005-2010, UHH hanya mampu ditingkatkan 0,2 tahun atau sekitar 2 bulan per-tahunnya. Dengan melihat kecendrungan peningkatan UHH penduduk tersebut maka diperhitungkan UHH Sumatera Utara adalah 70 tahun pada tahun 2011. Dengan demikian sasaran UHH yaitu 71,2 tahun pada 2012 **belum mampu dicapai**.

2.5. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	92%	87%	94,57%
2	Tercapainya persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat	50%	51,11%	102,22%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
3	Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi	50%	52,2%	104,4%
4	Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar.	55%	35,14%	63,89%
5	Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.	8 RSUD	4 RSUD	50%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, tiga indikator (60%) yaitu indikator 1-3 berkategori BAIK dan dua indikator (40%) yaitu indikator 4-5 berkategori KURANG. Ke depan, pencapaian indikator ke 4 dan 5 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2008-2012

TAHUN	2008	2009	2010	2011	2012
% ketersediaan obat dan vaksin	81	81	85	84	87

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2012

Dari tabel terlihat bahwa persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan adanya trend peningkatan selama kurun waktu 2008-2012. Walaupun pada tahun 2012, terdapat peningkatan 3% dibandingkan tahun 2011, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 92%. Belum maksimalnya ketersediaan obat dan vaksin ini disebabkan antara lain menurunnya anggaran yang bersumber DAU Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dan vaksin, dilain pihak anggaran DAK hanya adanya diperuntukkan untuk stimulus.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin berbanding lurus dengan besarnya pembiayaan obat per kapita. Pada tahun 2008-2009, pembiayaan obat per kapita hanya sekitar Rp. 5.000 dan Rp. 5.800. Pada tahun 2010, pembiayaan obat per kapita mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.500 dan persentase ketersediaan obat dan vaksin meningkat menjadi 85%, namun pada tahun 2011 anggaran obat per kapita menurun menjadi Rp. 8.200,-; sehingga persentase ketersediaan obat dan vaksin menurun menjadi 84%. Pada tahun 2012, anggaran obat per kapita meningkat menjadi Rp. 8.500,-; sehingga persentase ketersediaan obat dan vaksin kembali meningkat menjadi 87%, namun peningkatan anggaran yang ada belum mampu memenuhi target 92% ketersediaan obat dan vaksin di tahun 2012.

1. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 208 sarana distribusi, 12 sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan 33 sarana Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sarana distribusi maupun produksi Alkes dan PKRT diharapkan mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Pada tahun 2012, jumlah sarana alkes dan PKRT yang dibina dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat adalah 23 sarana atau 51,11%. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50% pada tahun 2012. Pencapaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011 yaitu 40%.

2. Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota meliputi sosialisasi, pengurusan izin dan monev terhadap sarana sediaan farmasi yaitu PBF, IOT, IKOT, Kosmetika dan Makanan Minuman. Tahun 2012, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka 6% dan untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota yaitu 46,2%; sehingga capaian persentase pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi yaitu 52,2% pada tahun 2012. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, dimana capaian persentase pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi yaitu 42% dengan rincian pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka 3,6% dan Dinas Kesehatan Kab/Kota yaitu 38,4%.

3. Tercapainya persentase Penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar.

Dari hasil monitoring ke 33 puskesmas di 33 Kabupaten/Kota diketahui bahwa dari 3 indikator persepsian untuk menghitung penggunaan obat rasional, hanya satu indikator yaitu % persepsian generik yang memenuhi standard, sehingga persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar mencapai 35,14%. Angka pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011 yaitu 33,33% tetapi masih dibawah pencapaian tahun 2010 yaitu 37,02. Penurunan ini disebabkan masih rendahnya kepatuhan petugas farmasi di Kabupaten/Kota untuk mengirimkan laporan tentang penggunaan obat rasional dan masih kurangnya ketenagaan farmasi di puskesmas sehingga tidak tercatatnya secara baik penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar. Pencapaian indikator persepsian pada penggunaan obat rasional tahun 2012, lebih jelas terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 21
Pencapaian Indikator Pereseapan Penggunaan Obat Rasional
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	INDIKATOR PERESEAPAN	CAPAIAN	STANDARD
1.	% Penggunaan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia	48%	≤ 20%
2.	Jumlah Item Obat per resep	3,2	3 s/d 4
3.	% Pereseapan Generik	98%	≥ 90%

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2012

4. Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

Penerapan Standard Kefarmasian di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara terlihat lambat. Diperkirakan 98% rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) belum menerapkan Standard Pelayanan Kefarmasian. Rendahnya pencapaian ini karena parameter “pelayanan kefarmasian memenuhi standard” diukur dari sarana dan prasarana juga terlaksananya prosedur/sistem kefarmasian, yang meliputi :

- Struktur Organisasi Farmasi di Rumah Sakit
- Panitia/Sub Komite Farmasi dan Terapi
- Formularium Rumah Sakit yang diperbaharui secara berkala.

Agar RSUD mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard, maka sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pilot project pelayanan kefarmasian. Sampai dengan tahun 2010, sudah terdapat 4 RSUD yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUD Lubuk Pakam Deli Serdang (tahun 2008) dan RSUD Dr. Djoelham Binjai dan RSUP H. Adam Malik Medan (tahun 2009). Namun, sama halnya dengan tahun 2011, pada tahun 2012 tidak ada RSUD yang dijadikan pilot project pelayanan kefarmasian, akibat tidak tertampungnya kegiatan ini didalam DPA TA 2011-2012; sehingga pencapaian indikator ini hanya mampu mencapai 4 RSUD dari 8 RSUD yang ditarget pada tahun 2012.

B. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 6.639.962.800,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi.
2. Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Provinsi : Obat PKD/KLB/Bencana; Reagensia dan Vaksin (VAR).
3. Pertemuan Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota.
4. Pertemuan dalam rangka Evaluasi Sistem Pelaporan Dinamika Obat dan Cara Distribusi yang Baik.
5. Pertemuan dalam rangka Cara Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Baik.
6. Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 6.586.751.710,- atau 99,20%.

2.6. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2012

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Tercapainya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	88%	83,7%	95,11
2	Tercapainya cakupan pelayanan :			
3	- antenatal (K4),	88%	78%	88,64
4	- cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap)	92%	80%	86,96
5	- cakupan kunjungan bayi	92%	75%	81,52
5	Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED	55%	57,7%	105
6	Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja	30%	27,4%	91,33
7	Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota	54 Puskesmas	59 Puskesmas	109,26

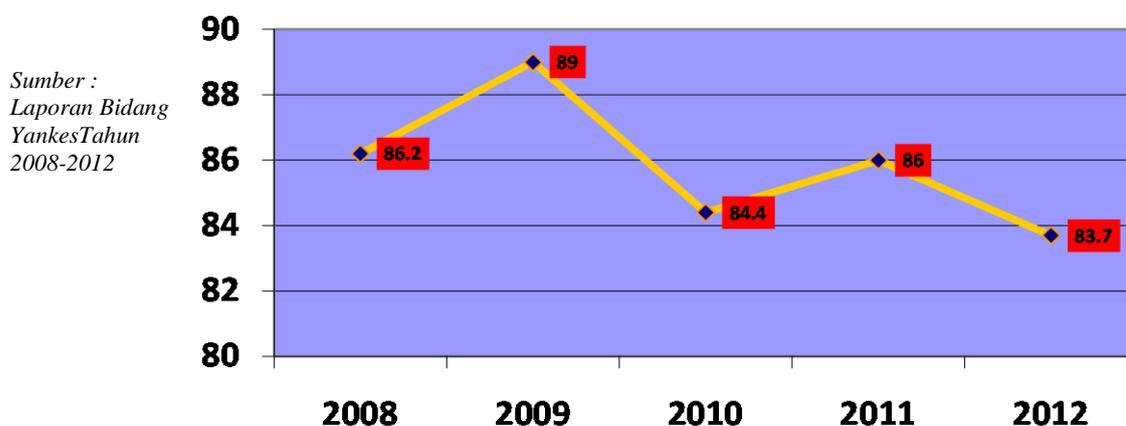
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2011	% CAPAIAN
8	Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55%	55%	100
9	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas	220 Puskesmas	180 Puskesmas	81,82%
10	Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar	15 Puskesmas	15 Puskesmas	100
11	Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008	16 Puskesmas	16 Puskesmas	100
12	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK	38 Puskesmas	37 Puskesmas	97,37
13	Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina	45%	57,14%	127
14	Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja	16 Kab/Kota	13 Kab/kota	81,25
15	Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga	26 Kab/Kota	5 Kab/Kota	19,23
16	Persentase pesantren yang memiliki poskestren	35%	35,3%	100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 16 indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdapat 10 (sepuluh) indikator (62,5%) berkategori BAIK yaitu indikator ke- 1,5,6,7,8, 10-13 dan 16; sebanyak 5 (lima) indikator (31,25%) yaitu indikator ke- 2,3,4,9 dan 14 berkategori SEDANG, dan 1 (satu) indikator (6,25%) yaitu indikator ke-15 berkategori SANGAT KURANG. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013, pencapaian target indikator pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan olah raga dan pesantren memiliki poskestren perlu menjadi prioritas. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2008-2012 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2009, cakupan indikator ini mencapai 89% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 5%. Pada tahun 2011, cakupan persalinan oleh nakes ini mampu ditingkatkan sekitar 1,5%, namun pada tahun 2012 kembali turun menjadi 83,7%, yaitu dari 294.244 sasaran ibu hamil di Sumatera Utara yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 246.393 orang atau 83,7%.

Grafik 4
Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan tahun 2008-2012

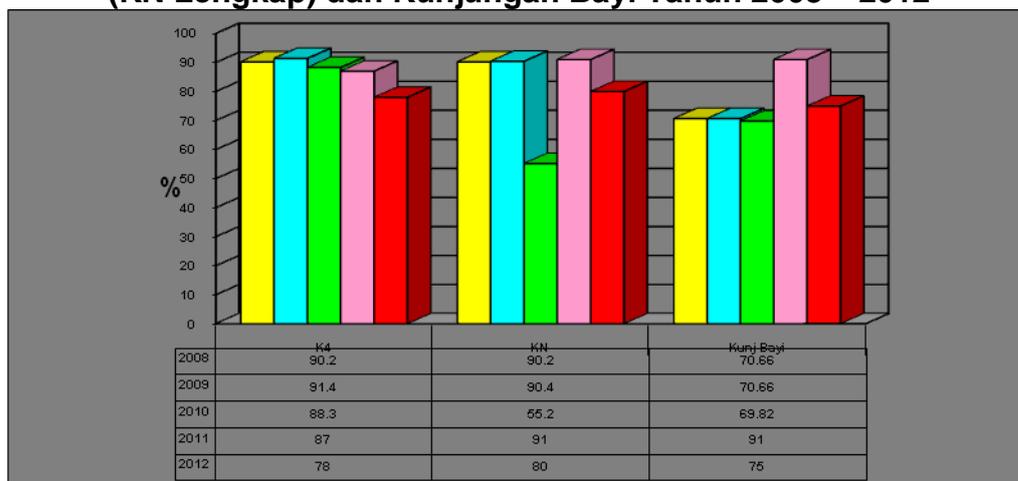


Melihat fluktuatifnya pencapaian indikator ini selama kurun waktu 4 tahun terakhir, upaya pementapan dan penguatan manajemen KIA sangat dibutuhkan ke depan, sehingga target renstra Dinkes Provsu untuk indikator ini yaitu 89% pada tahun 2013 dan target Renstra Kepmenkes yaitu 90% pada tahun 2014 dapat dicapai.

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi.

Dibandingkan tahun 2011, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2012. Penurunan tertinggi terjadi pada indikator kunjungan bayi dimana turun hampir 20%, perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini.

Grafik 5
Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2008 – 2012



Sumber : Laporan Bidang Yankes Tahun 2008-2012

Selama kurun waktu 2008-2012, cakupan K4 ibu hamil menunjukkan trend penurunan yaitu turun sekitar 12% dari 90,2% pada tahun 2008 menjadi 78% pada tahun 2012. Cakupan KN lengkap turun sekitar 10% yaitu dari 90,2% tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2012, dilain pihak kunjungan bayi pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2010, namun kembali turun secara drastis juga sehingga hanya mencapai 75% di tahun 2012. Pada tahun 2012, dari 308.272 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 243.240 ibu hamil (78%). Untuk pelayanan neonatal, dari 281.973 sasaran bayi sebanyak 225.105 bayi (80%) mendapatkan pelayanan neonatal lengkap (KN3) dan melakukan kunjungan bayi yaitu yang mendapatkan pemeriksaan minimal 4x selama setahun adalah sebanyak 212.441 bayi (75%). Dan dari 281.973 bayi yang lahir hidup terdapat sebanyak 533 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau 0,19%. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus BBLR pada tahun 2011 yaitu 743 bayi dan tahun 2010 yaitu 773 bayi, maka terjadi penurunan di tahun 2012.

3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Pada tahun 2012, dari 163 puskesmas rawat inap yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 94 puskesmas yang menyelenggarakan PONED atau 57,7%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 98 puskesmas PONED. Penurunan jumlah puskesmas PONED terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Binjai, masing-masing berkurang 1 unit Puskesmas PONED. Penurunan ini terjadi akibat pindahnya tenaga dokter dan perawat yang telah dilatih.

Dari 33 kab/kota, terdapat 5 kab/kota yang belum memiliki puskesmas PONED yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Padang Lawas, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Tebing Tinggi. Penyebaran puskesmas PONED per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Jumlah Puskesmas PONED berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS RAWAT INAP	JML PUSKESMAS PONED
1	NIAS	3	1
2	MANDAILING NATAL	3	2
3	TAPANULI SELATAN	4	4
4	TAPANULI TENGAH	6	3
5	TAPANULI UTARA	6	5
6	TOBA SAMOSIR	3	2
7	LABUHAN BATU	5	2
8	ASAHAN	10	4
9	SIMALUNGUN	11	4
10	DAIRI	5	5
11	KARO	6	5
12	DELI SERDANG	17	8
13	LANGKAT	10	4
14	NIAS SELATAN	5	3
15	HUMBANG HASUNDUTAN	3	2
16	PAKPAK BHARAT	3	0
17	SAMOSIR	5	2
18	SERDANG BEDAGAI	5	4
19	BATUBARA	4	4
20	PADANG LAWAS	4	0
21	PADANG LAWAS UTARA	3	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	7	4
23	LABUHAN BATU UTARA	7	4
24	NIAS UTARA	3	0

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS RAWAT INAP	JML PUSKESMAS PONED
25	NIAS BARAT	2	0
26	SIBOLGA	1	2
27	TANJUNGBALAI	1	1
28	PEMATANG SIANTAR	2	2
29	TEBING TINGGI	-	0
30	MEDAN	13	13
31	BINJAI	2	1
32	PADANGSIDIMPUAN	2	1
33	GUNUNG SITOLI	2	2
JUMLAH		163	94

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2012.

4. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja (PKPR)

Pada tahun 2012, dari 570 puskesmas di Sumatera Utara terdapat 156 puskesmas PKPR (27,4%) yang tersebar di 23 Kab/Kota. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu 129 puskesmas dari 545 puskesmas yang ada (23,7%).

Kabupaten/Kota yang belum memiliki puskesmas PKPR yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Labuhan Batu Utara dan Gunung Sitoli. Penyebaran Puskesmas PKPR per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24
Jumlah Puskesmas PKPR berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS	JML PUSKESMAS PKPR
1	NIAS	9	-
2	MANDAILING NATAL	26	1
3	TAPANULI SELATAN	16	4
4	TAPANULI TENGAH	23	4
5	TAPANULI UTARA	19	4
6	TOBA SAMOSIR	19	12
7	LABUHAN BATU	13	4
8	ASAHAN	22	18
9	SIMALUNGUN	34	4
10	DAIRI	18	4
11	KARO	19	4
12	DELI SERDANG	34	14
13	LANGKAT	30	4
14	NIAS SELATAN	36	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	12	-
16	PAKPAK BHARAT	8	-
17	SAMOSIR	12	-
18	SERDANG BEDAGAI	20	4
19	BATUBARA	14	4
20	PADANG LAWAS	14	-
21	PADANG LAWAS UTARA	17	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	17	4
23	LABUHAN BATU UTARA	17	-
24	NIAS UTARA	11	-
25	NIAS BARAT	8	-
26	SIBOLGA	4	4
27	TANJUNGBALAI	8	4
28	PEMATANG SIANTAR	19	4
29	TEBING TINGGI	9	4
30	MEDAN	39	39
31	BINJAI	8	4
32	PADANGSIDIMPUAN	9	4
33	GUNUNG SITOLI	6	-
JUMLAH		570	156

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2012

5. Terbentuk minimal 2 Puskesmas Santun Usila di Kab/Kota

Sampai tahun 2012, sudah terbentuk 59 puskesmas usila di 28 kabupaten/kota. Pencapaian ini sudah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 54 puskesmas sampai tahun 2012. Perkembangan jumlah puskesmas usila di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25
Jumlah Puskesmas Usila berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2012

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS LANSIA		
		2010	2011	2012
1	MANDAILING NATAL	-	2	-
2	TAPANULI SELATAN	-	2	-
3	TAPANULI TENGAH	-	2	1
4	TAPANULI UTARA	-	2	-
5	TOBA SAMOSIR	-	2	-
6	LABUHAN BATU	-	2	-
7	SIMALUNGUN	-	2	-
8	DELI SERDANG	2	-	-
9	HUMBANG HASUNDUTAN	-	2	-
10	PAKPAK BHARAT	-	2	-
11	SAMOSIR	-	2	-
12	SERDANG BEDAGAI	-	1	-
13	BATUBARA	-	1	-
14	PADANG LAWAS UTARA	-	2	-
15	LABUHAN BATU UTARA	-	2	-
16	NIAS UTARA	-	2	-
17	NIAS BARAT	-	2	-
18	SIBOLGA	-	2	1
19	TANJUNGBALAI	-	2	1
20	PEMATANG SIANTAR	-	2	-
21	TEBING TINGGI	-	2	-
22	MEDAN	2	-	-
23	BINJAI	-	1	1
24	PADANGSIDIMPUAN	-	2	-
25	GUNUNG SITOLI	-	2	-
26	NIAS SELATAN	-	-	5
27	PADANG LAWAS	-	-	1
28	KARO	-	-	2
JUMLAH		4	43	12

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2012

6. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut. Pada tahun 2012, jumlah penduduk usila di Sumatera Utara diperkirakan sebesar 6% dari total penduduk atau 773.112 jiwa. Dari total penduduk lansia tersebut sebanyak 427.375 orang atau 55% mendapatkan pelayanan kesehatan lansia setiap bulannya. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 49%. Pencapaian tahun 2012 sudah mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 55%.

7. Terselenggaranya pelayanan gawat terpadu darurat di puskesmas

Sampai akhir tahun 2012, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 236 puskesmas yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 58 puskesmas tahun 2010, 66 puskesmas pada tahun 2011 dan tahun 2012 terbentuk 56 puskesmas.

Adapun penyebaran puskesmas SPGDT di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Jumlah Puskesmas SPGDT berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2012

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS SPGDT			
		2009	2010	2011	2012
1	NIAS	2	2	2	2
2	MANDAILING NATAL	2	2	2	5
3	TAPANULI SELATAN	2	2	2	-
4	TAPANULI TENGAH	2	2	2	8
5	TAPANULI UTARA	2	2	2	-
6	TOBA SAMOSIR	2	2	2	-
7	LABUHAN BATU	2	2	2	-
8	ASAHAN	2	2	2	-
9	SIMALUNGUN	2	2	2	-
10	DAIRI	2	2	2	5
11	KARO	2	2	2	-
12	DELI SERDANG	2	2	2	-
13	LANGKAT	2	2	2	-
14	NIAS SELATAN	2	2	2	2
15	HUMBANG HASUNDUTAN	2	2	2	-
16	PAKPAK BHARAT	2	2	2	4
17	SAMOSIR	2	2	2	5

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS SPGDT			
		2009	2010	2011	2012
18	SERDANG BEDAGAI	2	2	2	3
19	BATUBARA	2	2	2	-
20	PADANG LAWAS	2	2	2	-
21	PADANG LAWAS UTARA	2	2	2	-
22	LABUHAN BATU SELATAN	-	2	2	-
23	LABUHAN BATU UTARA	-	2	2	-
24	NIAS UTARA	-	2	2	5
25	NIAS BARAT	-	2	2	3
26	SIBOLGA	2	2	2	3
27	TANJUNGBALAI	2	-	2	3
28	PEMATANG SIANTAR	2	2	2	-
29	TEBING TINGGI	2	-	2	2
30	MEDAN	2	2	2	-
31	BINJAI	2	-	2	-
32	PADANGSIDIMPUAN	2	2	2	3
33	GUNUNG SITOLI	-	-	2	3
JUMLAH		56	58	66	56

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2009 - 2012.

Walaupun mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 68 puskesmas gawat darurat yang terbentuk di tahun 2012. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 56 puskesmas.

8. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar (SPMD)

Sampai dengan tahun 2012, jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik sebanyak 15 puskesmas, dengan perincian 2 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 2 puskesmas pada tahun 2010, 5 puskesmas terbentuk pada tahun 2011, dan 6 puskesmas pada tahun 2012; seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SPMD
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012

TAHUN	PUSKESMAS	JENIS PELAYANAN
2009	1. Pusk. Glugur Darat Kota Medan 2. Pusk. Perbaungan Kab. Segei	Pelayanan Akupuntur Pelayanan Plus
2010	1. Pusk. Padang Bulan Kota Medan 2. Pusk. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan	Klinik VCT Pelayanan PKPR
TAHUN	PUSKESMAS	JENIS PELAYANAN
2011	1. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Klinik Metadon) 2. Pusk. Rantau-prapat Kota Kab. Lab Batu (Pusk. Usila) 3. Pusk. Medan Deli Kota Medan 4. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. 5. Pusk. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	Pelayanan Perkotaan Pelayanan Perkotaan Pelayanan Kes. Kerja Pelayanan Prima Pelayanan Prima
2012	1. Pusk. Sadabuan Kota Padang Sidempuan 2. Pusk. Gunung Tua Kab. Paluta 3. Pusk. Sidodadi Kab. Asahan 4. Pusk. Simarpinggian Kab. Tapanuli Selatan 5. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang 6. Pusk. Panyabungan Jae Kab. Madina	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2012.

Dari tabel terlihat pada tahun 2012, terdapat 6 puskesmas yang telah menerapkan standard pelayanan medik dasar, dan seluruhnya adalah puskesmas dengan pelayanan perkesmas. Bila diperinci menurut kab/kota maka jumlah yang telah menerapkan SPMD yaitu di Kota Medan sebanyak 3 puskesmas, Kabupaten Deli Serdang 4.puskesmas, Kota Padang Sidempuan sebanyak 2 puskesmas, Kabupaten Labuhan Batu, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara (Paluta), Tapanuli Selatan, Asahan dan Mandailing Natal masing-masing 1 puskesmas.

9. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas), diupayakan melalui penerapan ISO 9001-2008.

Pada tahun 2010, sebanyak 6 puskesmas telah meraih sertifikat ISO 9001-2008, tahun 2011 yaitu 5 puskesmas dan tahun 2012 bertambah 5 puskesmas. Adapun puskesmas ISO tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Puskesmas dengan sertifikat ISO 9001:2008
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2012

TAHUN	PUSKESMAS	KAB/KOTA
2010	1. Puskesmas Glugur Darat	Medan
	2. Puskesmas Pantai Cermin	Serdang Bedagai
	3. Puskesmas Satria	Tebing Tinggi
	4. Puskesmas Sidodadi	Asahan
	5. Puskesmas Sambas	Sibolga
	6. Puskesmas Panyabungan Jae	Madina.
2011	7. Puskesmas Tanjung Morawa	Deli Serdang
	8. Puskesmas Sadabuan	Padang Sidempuan
	9. Puskesmas Kota Rantau Prapat	Labuhan Batu
	10. Puskesmas Stabat	Langkat
	11. Puskesmas Rambung	Binjai
2012	12. Puskesmas Pintu Padang	Tapanuli Selatan
	13. Puskesmas Siborong-borong	Tapanuli Utara
	14. Puskesmas Ksatria	Pematang Siantar
	15. Puskesmas Datuk Bandar	Tanjung Balai
	16. Puskesmas Sumbul	Dairi

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010- 2012.

10. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK

Pada tahun 2009, terdapat 30 puskesmas DTPK di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2010, bertambah 6 puskesmas, pada tahun 2011 bertambah 1 (satu) puskesmas dan pada tahun 2012 bertambah 5 puskesmas DTPK di 4 Kabupaten/Kota; sehingga sampai akhir 2012 telah terdapat 45 Puskesmas DTPK di 7 Kabupaten/Kota. Perkembangan jumlah puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2012, adalah :

Tabel 29
Puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009- 2012

TAHUN	PUSKESMAS	KAB/KOTA
2009	1. Kuta Buluh	Dairi
	2. Sopobutar	Dairi
	3. Tiga Baru	Dairi
	4. Parongil	Dairi
	5. Sigalingging	Dairi
	6. Maduamas	Tapanuli Tengah
	7. Sirandorong	Tapanuli Tengah
	8. Andam Dewi	Tapanuli Tengah
	9. Barus Utara	Tapanuli Tengah
	10. Siantar Ca	Tapanuli Tengah
	11. Sipea-pea	Tapanuli Tengah
	12. Barus	Tapanuli Tengah
	13. Sibande	Pakpak Bharat
	14. Salak	Pakpak Bharat
	15. Singgabur	Pakpak Bharat
	16. Kecupak	Pakpak Bharat
	17. Pagindar	Pakpak Bharat
	18. Onan Runggu	Samosir
	19. Sirait	Samosir
	20. Ronggur ni Huta	Samosir
	21. Ambarita	Samosir
	22. Harian	Samosir
	23. Teluk Dalam	Nias Selatan
	24. Lagundri	Nias Selatan
	25. Lahusa	Nias Selatan
	26. Hiliduhu	Nias
	27. Botombawo	Nias
	28. Botomuzi	Nias
	29. Hiliweto Gido	Nias
	30. Idano Gawo	Nias
2010	1. Puskesmas Mogang	Samosir
	2. Puskesmas Limbong	Samosir
	3. Puskesmas Sitio-tio	Samosir
2011	4. Puskesmas Lawindra	Nias Selatan
	5. Puskesmas Pulo Tello	Nias Selatan
	6. Puskesmas Sibabangun	Tapanuli Tengah
	7. Puskesmas Sipispis	Serdang Bedagai
2012	1. Puskesmas Hilianumbasela	Nias Selatan
	2. Puskesmas Gunung Sitember	Dairi
	3. Puskesmas Sibagindar	Pakpak Bharat
	4. Puskesmas Tanjung Beringin	Serdang Bedagai
	5. Puskesmas Sipea-pea	Serdang Bedagai

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2012

11. Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina

Pada tahun 2012 terdapat 44 puskesmas yang melaksanakan pengobatan tradisional dan tersebar di 20 Kab/Kota, dan yang dibina sebanyak 24 puskesmas atau 57,14%. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 22 puskesmas pengobatan batra yang dibina. Penyebaran puskesmas dengan pengobatan tradisional di 21 Kabupaten/Kota dan yang dibina dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 30
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengobatan Tradisional dan Yang Dibina Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	JML PUSK DGN BATRA	JUMLAH YANG DIBINA	KET PUSKESMAS
1	TAPANULI SELATAN	2	-	-
2	TAPANULI UTARA	2	-	-
3	TOBA SAMOSIR	2	-	-
4	LABUHAN BATU	2	-	-
5	ASAHAN	2	2	Pusk. Sidodadi, Pusk. Mutiara
6	SIMALUNGUN	2	-	-
7	DAIRI	2	2	Pusk. G. Sitember. Pusk. Tj. Lingga
NO	KAB/KOTA	JML PUSK DGN BATRA	JUMLAH YANG DIBINA	KET PUSKESMAS
8	KARO	2	2	Pusk. Kopperi, Pusk. Kabanjahe
9	DELI SERDANG	2	2	Pusk. Pancur Batu, Pusk. Tj. Morawa, Pusk. Galang, Pusk. Batang Beruh
10	LANGKAT	2	2	Pusk. Stabat, Pusk. Karang Rejo
11	HUMBANG HASUNDUTAN	2	-	-
12	PAKPAK BHARAT	2	-	-
13	SAMOSIR	2	-	-
14	SERDANG BEDAGAI	2	2	Pusk. Desa Pon, Pusk. Sialang Buah
15	BATUBARA	2	2	Pusk. Lab Ruku, Pusk. Kedai Sianam
16	TANJUNGBALAI	2	-	-
17	PEMATANG SIANTAR	2	2	Pusk. Martoba, Pusk. Mutiara
18	TEBING TINGGI	2	2	Pusk. Pasar Gambir, Pusk. Satria
19	MEDAN	2	2	Pusk. Padang Bulan, Pusk. Petisah
20	BINJAI	2	2	Pusk. Tanah Tinggi, Pusk. Binjai Estate
21	PADANGSIDIMPUAN	2	-	-
JUMLAH		42	22	-

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2012.

12. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja

Pelayanan Kesehatan Kerja sasarannya adalah kepada kabupaten/kota yang memiliki industri besar, kecil maupun menengah. Pada tahun 2010, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 2011, kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah sebanyak 4 kab/kota, yaitu Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Sibolga. Dan pada tahun 2012, bertambah 5 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Asahan; sehingga jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sebanyak 13 Kab/Kota ataupun 39,39%. Walaupun jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah, namun jumlah ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 16 Kab/Kota tahun 2012.

13. Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga

Sampai dengan akhir tahun 2012, hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki 3 puskesmas, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Puskesmas Olahraga di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

KAB/KOTA	PUSKESMAS
1. MEDAN	- Pusk. Belawan - Pusk. Kampung Baru - Pusk. Medan Area
2. SERDANG BEDAGAI	- Pusk. Pegajahan - Pusk. Dolok Masihul - Pusk. Sei Rampah
3. DELI SERDANG	- Pusk. Bandar Khalipah - Pusk. Tanjung Morawa - Pusk. Lubuk Pakam
4. LABUHAN BATU UTARA	- Pusk. Aek Kanopan - Pusk. Aek Korsik - Pusk. Kota Baru
5. PEMATANG SIANTAR	- Pusk. Parsoburan - Pusk. Raya - Pusk. Ksatria

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010 dan 2012.

Tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini, baik bersumber dari APBN maupun APBD maka sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 tidak ada penambahan jumlah kab/kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga.

14. Persentase pesantren yang memiliki poskestren

Pada tahun 2012, persentase pesantren yang memiliki poskestren tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2011. Di Sumatera Utara terdapat 150 pesantren yang tersebar di 25 kab/kota dan pesantren yang memiliki poskestren sebanyak 53 pesantren atau 35,3%, Distribusi pesantren dan yang memiliki poskestren dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32
Jumlah Pesantren memiliki Poskestren berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2012

NO	KAB/KOTA	JML PESANTREN	MEMILIKI POSKESTREN
1	NIAS	0	-
2	MANDAILING NATAL	22	-
3	TAPANULI SELATAN	15	8
4	TAPANULI TENGAH	6	-
5	TAPANULI UTARA	0	-
6	TOBA SAMOSIR	0	-
7	LABUHAN BATU	9	7
8	ASAHAN	6	3
9	SIMALUNGUN	5	-
10	DAIRI	1	1
11	KARO	2	2
12	DELI SERDANG	13	3
13	LANGKAT	19	6
14	NIAS SELATAN	0	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	1	1
16	PAKPAK BHARAT	0	-
17	SAMOSIR	0	-
18	SERDANG BEDAGAI	4	1
19	BATUBARA	4	2
20	PADANG LAWAS	15	7
21	PADANG LAWAS UTARA	6	-
22	LABUHAN BATU SELATAN	8	2
23	LABUHAN BATU UTARA	3	-
24	NIAS UTARA	0	-
25	NIAS BARAT	0	-
26	SIBOLGA	0	-
27	TANJUNGBALAI	1	1
28	PEMATANG SIANTAR	1	1
29	TEBING TINGGI	1	1
30	MEDAN	11	6
31	BINJAI	2	1
32	PADANGSIDIMPUAN	8	-
33	GUNUNG SITOLI	2	-
JUMLAH		150	53

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010 dan 2012.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program UKM pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.653.313.100,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Evaluasi P4K bagi LP/LS dan Organisasi Profesi
2. Orientasi Petugas dalam Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT)
3. Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
4. Rapat Berkala Tim Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut
5. Workshop Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Ambulans
7. Peningkatan Kemampuan Petugas Call Center
8. Peningkatan Pelayanan Ambulans
9. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar
10. Peningkatan Pelayanan Medik Dasar di Puskesmas Perkotaan
11. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008
12. Pemantapan Program Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
13. Advokasi Program Puskesmas Santun Lansia di Kab/Kota
14. Monitoring Evaluasi Puskesmas Santun Lansia
15. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Komunikasi Interpersonal/Konseling di Puskesmas santun Lansia
16. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Lansia di Desa Percontohan
17. Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
18. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Tradisional
19. Pertemuan Forum Komunikasi Kesehatan Tradisional
20. Pembinaan Poskestren ke Kabupaten/Kota
21. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 3.602.089.850,- atau 98,60%.

2.6.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2012

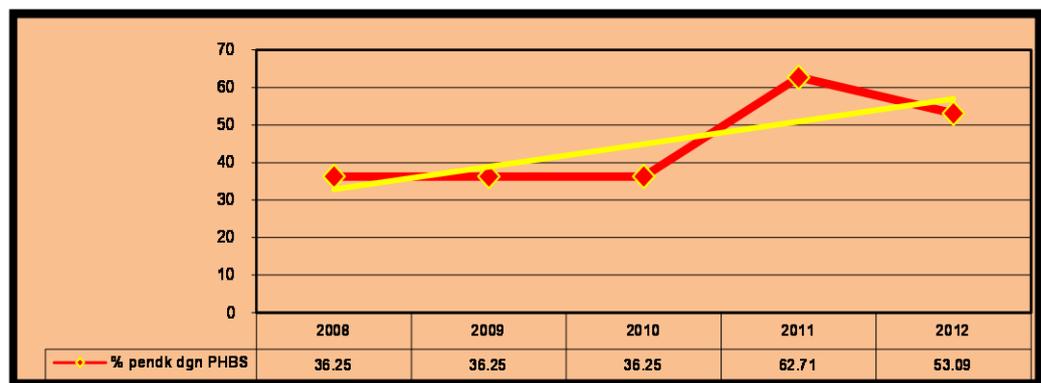
NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	62%	53,09%	85,63
2	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	48%	28,15%	58,65
3	Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga	100%	74,62%	74,62
4	Persentase desa siaga aktif	15%	15%	100
5	Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan	20%	20%	100

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dua indikator (40%) yaitu indikator ke-4 dan ke-5 berkategori BAIK, satu indikator (20%) yaitu indikator ke-1 berkategori SEDANG, dan 2 indikator (40%) yaitu indikator ke-2 dan 3 berkategori SANGAT KURANG. Rendahnya pencapaian indikator ke-2 dan ke-3 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada pelaksanaan kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2013. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut :

1. *Persentase penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)*

Penghitungan persentase rumah tangga ber-PHBS dilaksanakan melalui survey PHBS Rumah Tangga. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2007, persentase penduduk yang ber-PHBS di Sumatera Utara adalah 36,5%. Akibat tidak adanya survey yang berkaitan dengan penduduk ber-PHBS setelah tahun 2007, maka angka 36,5% digunakan setiap tahun sampai dengan tahun 2010.

Grafik 6
Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS
Tahun 2008 – 2012



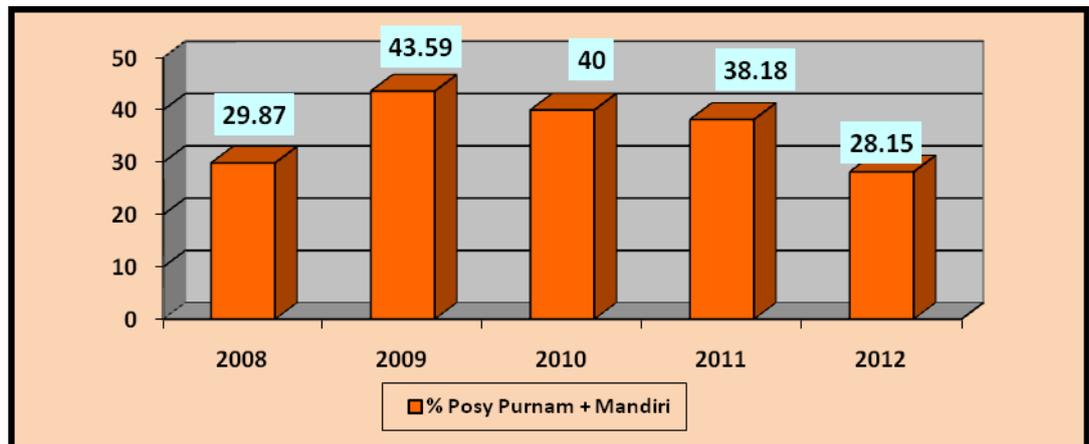
: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2008-2012

Pada tahun 2012, dilaporkan jumlah penduduk yang ber-PHBS meningkat menjadi 62,71%, namun pada tahun 2012 dari 728.196 rumah tangga yang dipantau sebanyak 386.625 rumah tangga atau 53,09% ber-PHBS.

2. *Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri*

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari persentase posyandu Purnama dan Mandiri. Pada tahun 2012, dari 7.221 posyandu yang ada, posyandu mandiri sebanyak 135 unit dan posyandu purnama sebanyak 1.898 unit, sehingga pencapaian persentase posyandu purnama dan mandiri hanya 28,15%. Persentase posyandu purnama dan mandiri menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya, terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 7
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 – 2012



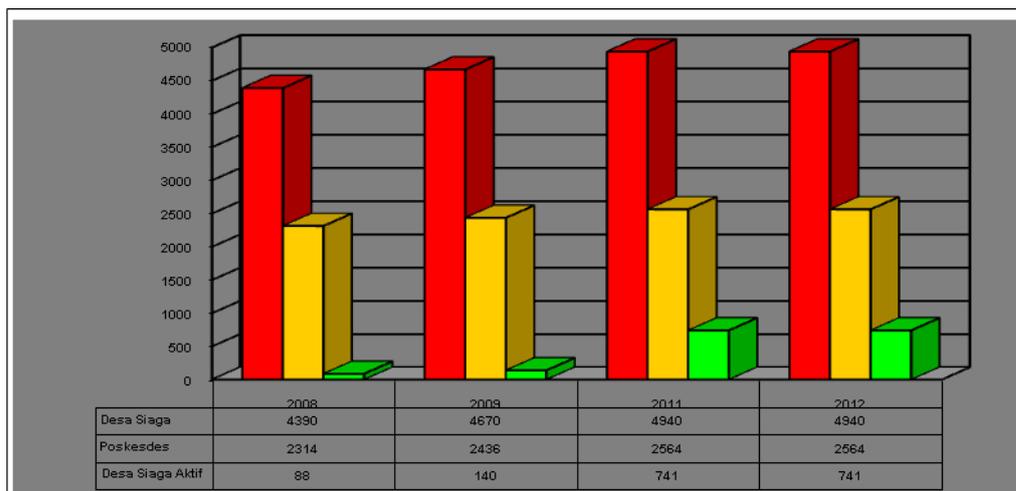
Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2008-2012

Penurunan ini mengakibatkan tidak tercapainya target indikator kinerja yaitu 48% pada tahun 2011. Penurunan ini mungkin disebabkan adanya desa-desa baru akibat dari pemekaran kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2009.

3. Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga.

Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2011. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes, seharusnya setiap Desa Siaga memiliki Poskesdes. Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes menurun dari 55% pada tahun 2010 menurun menjadi 52% pada tahun 2011. Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 3% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011. Untuk tahun 2012, angka pencapaian masih menggunakan angka pada tahun 2011.

Grafik 8
Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012



Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2008-2012

4. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan

Di Sumatera Utara terdapat 9.540 unit SD/MI, dari jumlah tersebut yang melaksanakan Promosi Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 1.908 atau 20% pada tahun 2012. Angka pencapaian ini sama dengan tahun 2011. Distribusi SD/MI yang mempromosikan kesehatan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34
Jumlah SD/MI dan yang mempromosikan Kesehatan
berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	JML SD/MI	MEMPROMOSIKAN KES
1	NIAS	143	29
2	MANDAILING NATAL	403	81
3	TAPANULI SELATAN	288	58
4	TAPANULI TENGAH	332	66
5	TAPANULI UTARA	352	70
6	TOBA SAMOSIR	223	45
7	LABUHAN BATU	284	57
8	ASAHAN	495	99
9	SIMALUNGUN	924	185
10	DAIRI	267	53
11	KARO	291	58
12	DELI SERDANG	793	159
13	LANGKAT	687	137
14	NIAS SELATAN	313	63
15	HUMBANG HASUNDUTAN	222	44

NO	KAB/KOTA	JML SD/MI	MEMPROMOSIKAN KES
16	PAKPAK BHARAT	71	14
17	SAMOSIR	203	41
18	SERDANG BEDAGAI	429	86
19	BATUBARA	295	59
20	PADANG LAWAS	182	36
21	PADANG LAWAS UTARA	223	45
22	LABUHAN BATU SELATAN	202	40
23	LABUHAN BATU UTARA	25	5
24	NIAS UTARA	153	31
25	NIAS BARAT	105	21
26	SIBOLGA	61	12
27	TANJUNGBALAI	102	20
28	PEMATANG SIANTAR	166	33
29	TEBING TINGGI	98	20
30	MEDAN	825	165
31	BINJAI	161	32
32	PADANGSIDIMPUAN	101	20
33	GUNUNG SITOLI	121	24
JUMLAH		9540	1908

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2011-2012

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.809.750.350,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan
2. Pembuatan Billboard Kesehatan
3. Pembinaan/Bimbingan Teknis Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan
5. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik
6. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)
7. Reportase Bidang Kesehatan
8. Promosi Kesehatan melalui Rubrik Kesehatan
9. Lomba Poster Kesehatan
10. Pengembangan Desa Siaga
11. Pembinaan Program UKS
12. Jambore Kader Posyandu Provinsi Sumatera Utara
13. Lomba Posyandu Teladan Sumatera Utara
14. Pertemuan Evaluasi Desa Siaga

15. Pembinaan Desa Siaga ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program ke Pusat
16. Lokakarya ASI Eksklusif bagi petugas Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota
17. Penyebarluasan Informasi mengenai HIV/AIDS melalui Seminar dan Media elektronik dalam rangka Hari AIDS Sedunia 2012.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 3.759.380.950,- atau 98,68%.

2.6.2. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

A. *Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012*

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100
2	Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	50%	40%	80
3	Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium	87%	90%	104,60
4	Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A	82%	76%	93
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe	78%	78%	100
6	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%	100%	100
7	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	75%	69%	92

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
8	Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI (Makanan Pendamping- Air Susu Ibu) untuk bencana	100%	100%	100
9	Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	50%	34%	68

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 9 indikator kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat, delapan indikator (78%) yaitu indikator ke-1, 3 sampai ke-8 berkategori BAIK, satu indikator (11%) yaitu indikator ke-2 berkategori SEDANG dan satu indikator (11%) yaitu indikator ke-9 berkategori KURANG. Pencapaian indikator ke-9 ini sangat kontras dengan indikator lainnya yang mampu mencapai diatas angka 90%. Ke depan, upaya untuk mencapai target indikator ke-9 perlu menjadi perhatian dan prioritas pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Persentase gizi buruk yang ditangani

Berdasarkan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan pada tahun 2009 diketahui bahwa Prevalensi Balita dengan Gizi kurang adalah 16,2% dan Balita dengan Gizi Buruk yaitu 4,21%. Angka ini mengalami penurunan dengan data Survey PSG yang dilaksanakan tahun 2007, yaitu prevalensi balita dengan gizi kurang adalah 18,8% dan balita dengan gizi buruk yaitu 4,4%.

Pada tahun 2012, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 746 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 375 kasus. Distribusi kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani per kab/kota seperti tergambar pada tabel berikut ini :

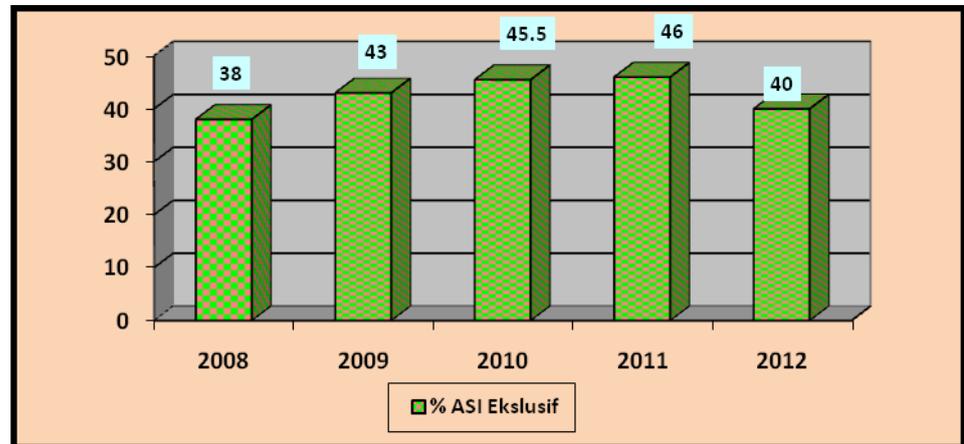
Tabel 36
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2012

NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK	
		2011	2012
1	NIAS	-	8
2	MANDAILING NATAL	15	62
3	TAPANULI SELATAN	15	41
4	TAPANULI TENGAH	12	13
5	TAPANULI UTARA	7	13
6	TOBA SAMOSIR	12	12
7	LABUHAN BATU	10	3
8	ASAHAN	20	45
9	SIMALUNGUN	25	23
10	DAIRI	20	110
11	KARO	15	35
12	DELI SERDANG	4	5
13	LANGKAT	27	19
14	NIAS SELATAN	10	2
15	HUMBANG HASUNDUTAN	8	13
16	PAKPAK BHARAT	4	3
17	SAMOSIR	7	3
18	SERDANG BEDAGAI	12	12
19	BATUBARA	18	14
20	PADANG LAWAS	11	38
21	PADANG LAWAS UTARA	6	9
22	LABUHAN BATU SELATAN	10	21
23	LABUHAN BATU UTARA	13	10
24	NIAS UTARA	6	14
25	NIAS BARAT	5	20
26	SIBOLGA	12	21
27	TANJUNGBALAI	13	1
28	PEMATANG SIANTAR	5	7
29	TEBING TINGGI	4	6
0	MEDAN	25	143
31	BINJAI	12	12
32	PADANGSIDIMPUAN	5	3
33	GUNUNG SITOLI	9	5
JUMLAH		375	746

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011-2012.

2. *Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif*

Grafik 9
Persentase Bayi 0-6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2008 – 2012



Sumber : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan 2008-2012

Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan sejak tahun 2008-2011, namun pada tahun 2012 menunjukkan penurunan dari 46% pada tahun 2011 menjadi 40% pada tahun 2012. Pencapaian pada tahun 2012, masih dibawah target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 50% pada tahun 2012.

3. *Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium*

Konsumsi garam mengandung cukup Iodium merupakan upaya prevalensi *penderita GAKY*. Berdasarkan hasil Risdedas (2007) diketahui bahwa hampir 90% rumah tangga (RT) telah mengkonsumsi garam yang mengandung cukup Iodium. Oleh karena belum ada survey lain yang berkaitan dengan konsumsi garam yodium pada RT, maka angka risdesdas tersebut digunakan untuk menghitung cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium sampai tahun 2012. Dan angka ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 87% pada tahun 2012.

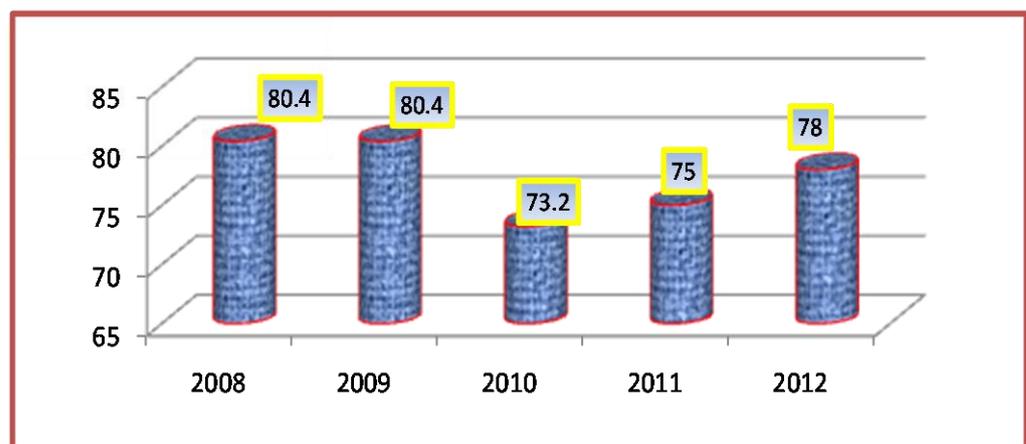
4. *Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A*

Tidak adanya Survey Pemetaan Vitamin A terbaru menyebabkan tidak diketahuinya secara akurat prevalensi Xerophthalmia di Provinsi Sumatera Utara. Survei terakhir dilaksanakan pada tahun 1992 dimana prevalensi Xerophthalmia sebesar 0,12% lebih rendah dari batas WHO yaitu 0,5%. Melihat pencapaian tersebut

Xerophthalmia tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, namun hal ini perlu diwaspadai terutama bila dilihat pencapaian persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A cenderung di bawah target program yaitu 80%.

Dari grafik bahwa cakupan pemberian vitamin A kurun waktu 2008-2012 menunjukkan kecenderungan penurunan, bahkan pada tahun 2010 menurun sangat tajam sekitar 7% dari tahun 2009 yaitu 80,4%. Walaupun pada tahun 2012 mengalami peningkatan, namun masih dibawah target nasional yaitu 80% dan dibawah target renstra Dinkes Provsu yang ditetapkan yaitu 82% pada tahun 2011.

Grafik 10
Trend Cakupan Pemberian Vitamin A
Tahun 2008 – 2012



Sumber : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan 2012

Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pemberian kapsul vitamin A pada balita, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya kunjungan balita ke puskesmas maupun pos-pos pelayanan kesehatan. Karena pada umumnya, bayi (0-12 bulan) lebih banyak mengunjungi pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi lengkap, penimbangan dan pemberian kapsul vitamin A. Setelah mendapatkan imunisasi lengkap, umumnya kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan akan berkurang secara drastis.

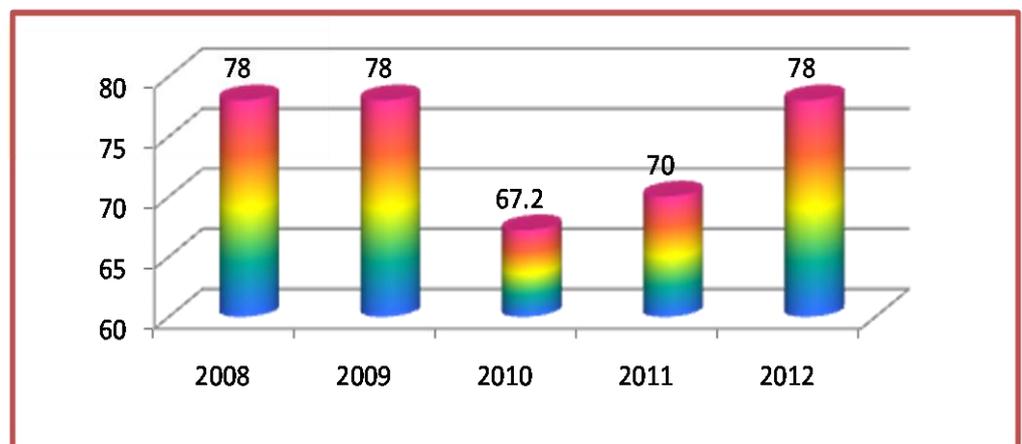
5. *Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe*

Anemia merupakan salah satu penyebab kematian ibu hamil di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi (ferrum) selama masa kehamilan. Salah satu upaya untuk menurunkan

prevalensi anemia adalah dengan pemberian tablet zat besi (ferrum) sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan.

Cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet zat besi juga menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi sejak tahun 2008. Pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu lebih dari 10% dibandingkan tahun 2009. Penurunan ini disebabkan karena belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk buffer stock tablet besi, ketersediaan tablet besi tergantung sepenuhnya pada pengadaan pusat dan provinsi; sehingga terjadi kekosongan tablet Fe di Kabupaten/Kota.

Grafik 11
Cakupan Pemberian Fe 90 Tablet Tahun 2008 – 2012



Sumber : Laporan Bidang Yankes 2008-2012

Pada tahun 2012, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8% dari tahun 2011, dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 78% pada tahun 2012.

6. *Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi*

Surveilans gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, efisien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Surveilans gizi akan meningkatkan efektivitas program dengan mempertajam upaya penanggulangan masalah gizi secara tepat waktu, tempat, sasaran dan jenis tindakannya. Sejak tahun 2009, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan surveilans gizi atau 100 %.

7. *Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)*

Indikator ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tinggi rendahnya hasil capaian indikator ini tergantung pada partisipasi masyarakat. Jika hasil capaian rendah, artinya partisipasi masyarakat yang rendah terhadap kegiatan posyandu. Untuk itu perlu dipelajari kenapa mereka tidak datang ke posyandu dan perlu dimotivasi. Selain itu dari kader posyandu sendiri bersama dengan PKK kelurahan juga dihimbau agar lebih memotivasi warganya untuk membawa balita ke posyandu setiap bulan. Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) pada tahun 2012 yaitu 65%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 72% dan tahun 2010 yaitu 71,80%. Jika dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu di tahun 2012 yakni 75% maka indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.

8. *Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana*

Penyediaan buffer stock MP-ASI adalah ditujukan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2012, capaian dari indikator ini adalah 100% dengan target program 100% pada tahun yang sama.

9. *Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)*

Kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan kejadian KEK pada ibu hamil merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan, karena sangat mempengaruhi kehidupan janin dalam bayi kandungan dan juga sang ibu. Diperhitungkan 10% dari jumlah ibu hamil adalah ibu hamil KEK. Pada tahun 2011 diperkirakan ada 31.215 ibu hamil yang menderita KEK. Perkiraan ibu hamil KEK ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu 39.575 orang. Namun yang mendapatkan PMT Ibu Hamil hanya 2.976 orang atau 9,5% pada tahun 2011; angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu 8,1%.

Walaupun demikian, pencapaian tahun 2011 belum mampu target yang ditentukan yaitu 48%. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena belum ada sharing pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan PMT bagi ibu hamil KEK, sehingga penyediaan PMT tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN. Melihat masih banyaknya kasus-kasus ibu hamil KEK yang belum mendapatkan PMT, kedepan sangat diperlukan keikutsertaan pemerintah daerah dalam penyediaan PMT ibu hamil untuk menanggulangi masalah ibu hamil KEK di Sumatera Utara.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 904.639.800,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan Balita Gizi Buruk yang Ditangani
2. Lokakarya Peningkatan ASI Eksklusif
3. Monitoring Cakupan Tablet Fe pada Ibu Hamil
4. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)
5. Penyediaan Alat Sarana Posyandu
6. Penyediaan Bufferstock MP-ASI dan Monitoring MP-ASI
7. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah 100% dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 831.034.800,- atau 91,86%.

2.6.3. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 8 (delapan) indikator kinerja Program Lingkungan Sehat yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Lingkungan Sehat Tahun 2012

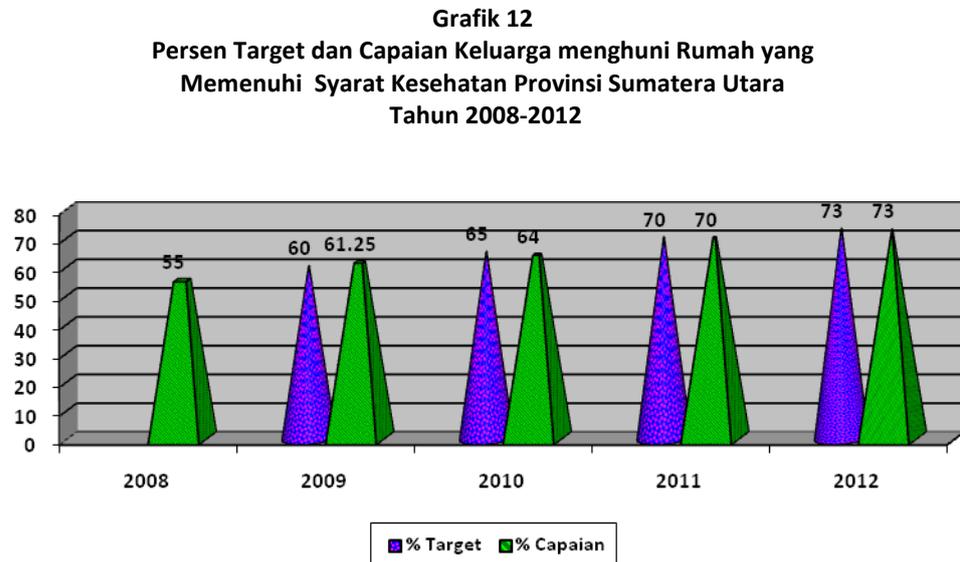
NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	75%	73%	97,33
2	Persentase keluarga menggunakan air bersih	70%	60%	85,71
3	Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	65%	66%	101,54
4	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	70%	65%	92,86
5	Persentase Kab/Kota Sehat	25%	30%	120
6	Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi	40%	41,75%	104,37
7	Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis	78%	45%	57,69
8	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan	100%	100%	100

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 8 indikator kinerja Program Lingkungan Sehat, enam indikator (75%) yaitu indikator ke-1, indikator ke-3 sampai 6 dan indikator ke-8 berkategori BAIK, satu indikator (12,5%) yaitu indikator ke-2 berkategori SEDANG, dan satu indikator (12,5%) yaitu indikator ke-7 berkategori SANGAT KURANG. Ke depan, pencapaian indikator persentase keluarga menggunakan air bersih dan air minum yang memenuhi syarat bakteriologis perlu menjadi perhatian dan prioritas pelaksanaan kegiatan pada Program Lingkungan Sehat.

Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2008, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.



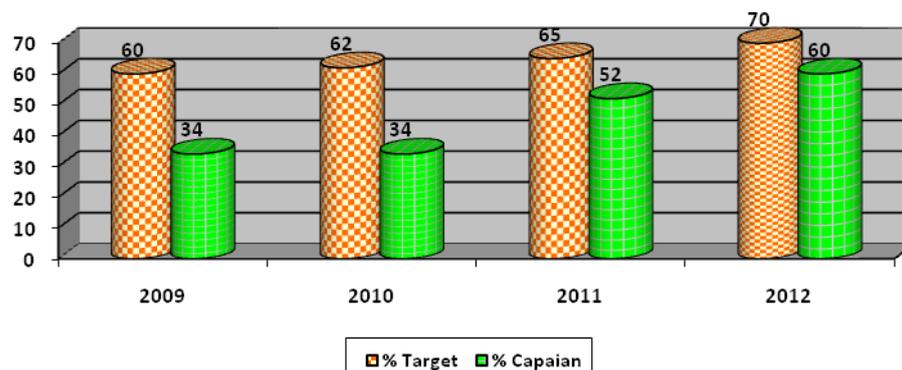
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Kurun waktu 2008-2012, persentase keluarga yang menghuni rumah memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, dari 3.110.203 unit rumah yang ada di Sumatera Utara sebanyak 1.492.891 unit (47,99%) mendapatkan pemeriksaan dan yang memenuhi syarat kesehatan adalah 1.089.810 unit (73%). Angka ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 73%.

2. Persentase keluarga menggunakan air bersih

Persentase keluarga menggunakan air bersih mengalami menunjukkan peningkatan sejak tahun 2010. Pada tahun 2012 meningkat sekitar 8% dari tahun 2011. Namun bila diperhadapkan dengan target yang ditetapkan pencapaian selama kurun waktu 2009-2012, belum mampu mencapai target tahunan yang ditetapkan, seperti lebih jelas tergambar pada grafik berikut :

Grafik 13
Persen Target dan Capaian Keluarga Menggunakan Air Bersih
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2012



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2009-2012

Masalah air bersih dan rumah sehat merupakan masalah yang sangat kompleks, membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang kuat, serta dukungan perilaku masyarakat dan perbaikan sosial ekonomi penduduk. Sejak tahun 2009-2011, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana untuk pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih (SAB) di 10 (sepuluh) Kab/Kota yaitu Langkat, Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir, Dairi, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Labuhan Batu. Pada tahun 2012, pengadaan stimulan air bersih dilaksanakan di Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab Samosir, Kab. Mandailing Natal, Kab Padang Lawas Utara dan Kab. Labuhan Batu Utara. Kegiatan-kegiatan ini mampu meningkatkan akses rumah tangga terhadap ahkir bersih namun belum mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Keterlibatan institusi yang menangani prasarana pemukiman dan prasarana wilayah bersama-sama masyarakat yang diberdayakan sangatlah penting dalam upaya penyediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Dan diharapkan dengan pembangunan stimulan SAB ini, pemerintah Kab/Kota termotivasi untuk melanjutkan pembangunan SAB sehingga akses masyarakat terhadap air bersih dapat ditingkatkan.

3. *Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan*

Berbeda halnya dengan ke-2 indikator Program Lingkungan Sehat yang sebelumnya, pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012, dari 1.492.891 rumah tangga yang diperiksa jambannya terdapat 985.309 rumah tangga yang memiliki jamban memenuhi syarat kesehatan (66%). Persentase ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 61%, dan tahun 2010 yaitu 60%. Pencapaian tahun 2012 telah mampu mencapai angka target yang ditetapkan yaitu 65%. Membangun sebuah lingkungan yang sehat bagi penduduk hanya dapat dicapai bila lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dinas lainnya dan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kab/Kota saling bekerja sama dalam membangun dan menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sehat serta mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan tersebut.

4. *Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan*

Pencapaian persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan sejak tahun 2010, yaitu 47% (2010), 63% (2011) dan 70,30% (2012). Pada tahun 2012, dari 14.654 unit TTU yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 10.300 unit atau 70,30%.

5. *Persentase Kab/Kota Sehat*

Pada tahun 2012 dari 33 kab/kota yang ada di Sumatera Utara terdapat 10 Kab/Kota Sehat, sehingga persentase Kab/Kota Sehat adalah sebesar 30% dan telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 25%. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2011 yaitu 24,3% dan tahun 2010 yaitu 15%. Pada tahun 2010, Kabupaten/Kota yang termasuk Kabupaten/Kota Sehat adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Pada tahun 2011, kabupaten/Kota Sehat bertambah 2 (dua) yaitu Kota Tebing Tinggi dan Binjai, dan pada tahun 2012 bertambah 2 (dua) Kabupaten/Kota sehat yaitu Kota Tanjung Balai dan Kab. Simalungun.

6. *Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi*

Sampai dengan akhir tahun 2012, dari 570 puskesmas yang ada, yang memiliki klinik sanitasi yang aktif yaitu 238 puskesmas atau 41,75%.

Pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian tahun 2011 yaitu 38,71% dan tahun 2010 yaitu sebesar 30%, dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 40%.

7. *Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis*

Pada tahun 2012, dari 40 sampel air minum dan bersih yang diperiksa, sebanyak 18 sampel atau 45% yang memenuhi syarat bakteriologis. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 43% dan tahun 2010 yaitu 2010. Walaupun demikian, angka pencapaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 78% pada tahun 2012.

8. *Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan*

Pencapaian persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan sejak tahun 2010 telah mencapai 100% sesuai dengan

target yang diharapkan yaitu 100%. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan.

B. *Kegiatan-kegiatan Tahun 2012*

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.298.030.000,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai

berikut :

1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana
2. Pengadaan Stimulan Jamban Keluarga
3. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi
5. Pilot Project Program Kota Sehat
6. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
7. Sosialisasi Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

8. Pengawasan Kualitas Air Bersih
9. Pilot Project Penyediaan Air Bersih Sumur Bor di Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Lingkungan Sehat adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.275.725.000,- atau 98,28%.

2.6.4. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 26 (dua puluh enam) indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Angka Case Detection Rate Penyakit TB	80%	82,1%	102,62
2	Angka keberhasilan pengobatan TB	95%	95,2%	100,21
3	Case Fatality Rate (CFR) diare pada saat KLB	1,33%	1,56%	85,26
4	ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART	55%	76%	138,18
5	Prevalensi Kasus HIV penduduk	0,040%	0,049%	122,5
6	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk	<5/100.000 pddk	1,4/100.000 pddk	100
7	Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk	<0,6/100.000 pddk	0,073/100.000 pddk	100
8	Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita	60%	15,70%	26,17

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
9	Prevalensi kecacangan pada anak sekolah	20%	32,30%	61,92
10	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)	1,3/1.000 Pddk	1,02/1.000 Pddk	127,45
11	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	40/100.000 pddk	23/100.000 pddk	57,5
12	Kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard	100%	100%	100
13	Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, leptospirosis) yang ditangani sesuai standard	85%	89%	104,71
14	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis	55%	85%	154,55
15	Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor	40%	40%	100
16	Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta	8%	15,7%	51
17	Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit	75%	76,56%	102,08
18	Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB	85%	100%	117,65
19	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk	>2/100.000 pddk	2,34/100.000 pddk	100
20	Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji	<2,1/1.000 Pddk	2,9/1.000 Pddk	72,41
21	Persentase desa yang mencapai <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> .	80%	67,8%	84,75
22	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	85%	76,6%	90,11

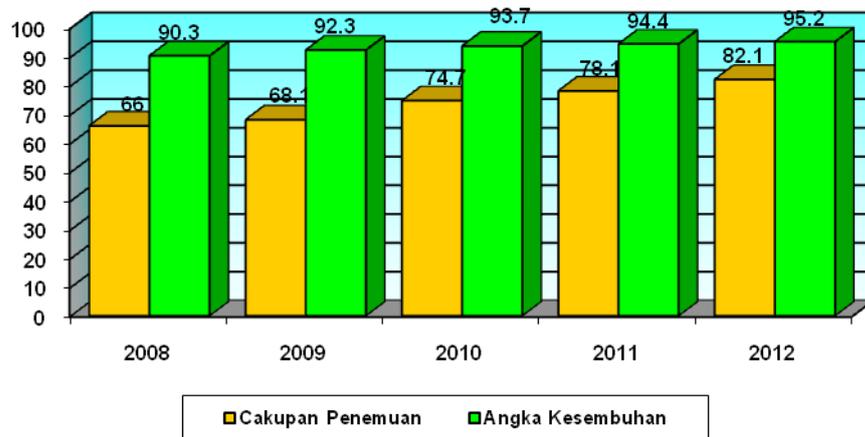
NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
23	Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap	85%	97,3%	114,5
24	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular	85%	85%	100
25	Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra	35%	100%	286
26	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana	85%	90%	105,88

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 26 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdapat tiga indikator (12%) yaitu indikator ke-8,11 dan 16 berkategori SANGAT KURANG, dua indikator (8%) yaitu indikator ke-9 dan ke-20 berkategori KURANG, dua indikator (8%) yaitu indikator ke-3 dan 21 berkategori SEDANG, dan lainnya sebanyak 19 indikator (72%) berkategori BAIK. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 14
Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan
Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008–2012



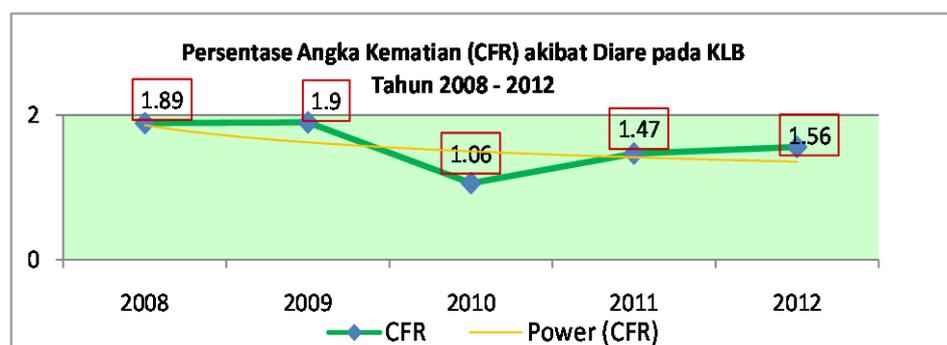
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Pada tahun 2012, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 17.776 kasus atau 82,1% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.664 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Pencapaian tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 78,1% dan tahun 2010 yaitu 74,7%.

Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2012. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)

Grafik 15



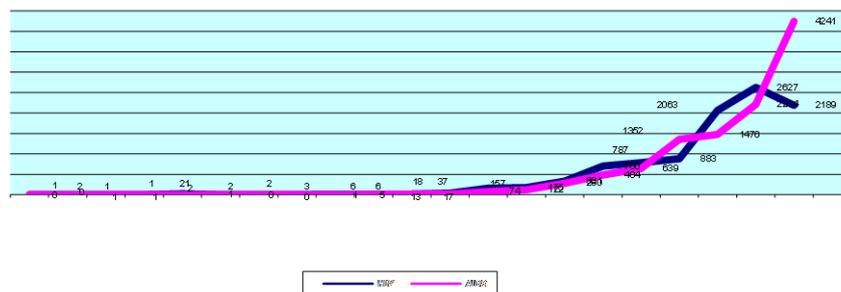
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera dan tahun 2012 telah terjadi KLB diare di 2 Kab/Kota, yaitu yakni di Kota Gunung Sitoli dengan jumlah 58 orang penderita dan 2 orang meninggal dunia, sedangkan di Kabupaten Madina jumlah penderita sebanyak 70 orang dan tidak ada kasus meninggal dunia. Dengan demikian CFR Diare pada saat KLB di perhitungkan sebesar 1,56 %, dan relative menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 1,47%. Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat KLB menunjukkan kecenderungan penurunan. Walaupun mengalami penurunan, CFR diare pada saat KLB masih diatas target nasional yaitu ≤ 1,2%. Hanya pada tahun 2010 capaian indikator ini mampu melampaui target nasional yaitu 1,06%. Ini menunjukkan bahwa tingkat penemuan dan tata laksana penderita diare pada saat KLB sudah baik tetapi harus tetap ditingkatkan.

3. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 16
Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992 - 2012



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV/AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2012, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat tajam dari 4841 kasus pada tahun 2011 menjadi 6.430 kasus dengan perincian kasus HIV sebanyak 2.189 kasus, dan kasus AIDS 4.241 kasus. Dari 6.430 penderita HIV/AIDS tahun 2012, yang memenuhi syarat untuk pengobatan ARV adalah 4.241 penderita dan yang mendapatkan ARV sebanyak 3.223 penderita atau 76 %. Persentase ODHA mendapatkan ARV mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian 2011 yaitu 73,2% dan tahun 2010 yaitu 67,48%.

Peningkatan kasus yang terjadi setelah tahun 2000 merupakan upaya membongkar fenomena gunung es “*ice berg fenomenm*” yaitu jumlah kasus yang ditemukan lebih sedikit dari jumlah sebenarnya di dalam populasi. Keberhasilan penemuan penderita ini salah satunya disebabkan bertambahnya jumlah layanan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) di Sumatera Utara.

VCT merupakan pintu masuk bagi penemuan kasus disamping pelaksanaan

pengobatan dan perawatan pasien serta penyampaian informasi ke masyarakat khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok populasi berisiko tinggi. Walaupun penemuan kasus HIV/AIDS meningkat namun belum maksimal, berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Kemenkes RI, pada tahun 2011 diperkirakan ada 11.836 penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara dan sampai tahun 2012 jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan baru mencapai 6.430 orang atau 54,32%.

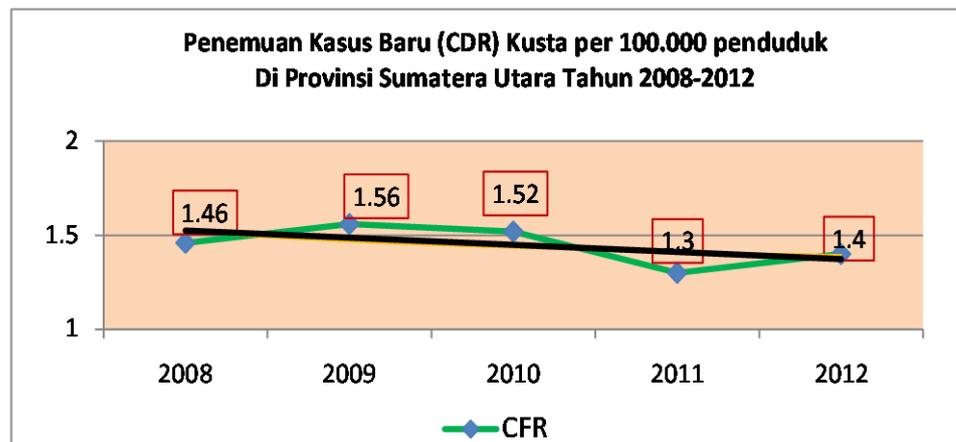
4. Prevalensi Kasus HIV Penduduk

Dengan jumlah penderita HIV/AIDS sampai tahun 2012 yaitu 6.430 orang, maka diperhitungkan prevalensi HIV/AIDS penduduk yaitu pada tahun 2012 adalah 0,049%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 0,040%, maka hasil capaian di atas target yang ditetapkan, dan sangat perlu mendapatkan perhatian melihatnya cepatnya peningkatan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara. Mengingat kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan hanya di permukaan saja, maka semakin banyak penemuan baru kasus HIV/AIDS semakin baik dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS. Untuk itu kedepan sangat dibutuhkan ketersediaan dan peningkatan mutu pelayanan VCT, CST, IMS, PITC dan PMTCT di seluruh Kab/Kota.

5. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk

Permasalahan penyakit kusta ini bila dikaji secara mendalam merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan kemanusiaan seutuhnya. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya.

Grafik 17



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Pada tahun 2012, jumlah penderita baru kusta yang ditemukan sebanyak 178

Penderita atau 1,4 per 100.000 penduduk. Dari grafik terlihat bahwa angka

penderita kusta baru cenderung menurun, namun pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2011 yaitu 1,3 per 100.000 penduduk, namun tetap mampu dipertahankan <5 per 100.000 penduduk; sesuai dengan target renstra dan target nasional.

6. Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia/100.000 Penduduk

Pada tahun 2012, jumlah kasus baru Frambusia yang ditemukan sebanyak 10 kasus yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk tahun 2012 yaitu 0,08. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 dan 2010 yaitu 0,015/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target yaitu < 0,6/100.000 penduduk maka kasus baru Frambusia dapat ditekan untuk tetap dibawah angka < 0,6/100.000 penduduk.

7. Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita

Pneumonia atau radang paru masih merupakan masalah kesehatan yang serius dan mengancam jiwa, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pneumonia merupakan proses radang akut pada jaringan paru (alveoli) yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit.

Lingkungan fisik rumah merupakan faktor resiko terhadap kejadian pneumonia pada balita antara lain : kepadatan hunian, jenis rumah, lokasi dapur, ventilasi rumah, dan pemakaian bahan bakar kayu.

Pada tahun 2012, di Sumatera Utara Tahun jumlah kasus pneumonia yang di temukan yaitu sebanyak 20,622 kasus atau 15,7% dari jumlah perkiraan kasus pneumonia usia balita yaitu 131,036 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun 2011 yaitu 14,7% namun masih jauh di bawah target yang di tetapkan yakni 60 %.

Rendahnya penemuan kasus pneumonia disebabkan antara lain :

- Laporan dari Puskesmas ke Kab/kota dan ke Provinsi belum lengkap; bahkan 3 Kab/Kota yaitu Kota Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, dan Nias Utara tidak mengirimkan laporan selama tahun 2012.
- Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di Puskesmas/ Poliklinik belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi kerja/rotasi.
- Pencatatan dan pelaporan tidak berdasarkan klasifikasi penyakit (Pneumonia, Pneumonia Berat, dan Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa sehingga banyak kasus pneumonia di masukkan ke ISPA Biasa).
- Laporan Pneumonia Balita masih berbasis Puskesmas sehingga sumber data kasus pneumonia belum mencakup rumah sakit, klinik, praktek dokter dan sarana kesehatan lain.

8. Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah

Prevalensi kecacingan pada anak sekolah diharapkan mampu diturunkan hingga menjadi < 10%. Berdasarkan survey kecacingan pada anak SD yang dilaksanakan tahun 2012 diperoleh hasil prevalensi kecacingan pada anak sekolah khususnya SD adalah sebesar 32,3%; dengan persentase Cacing Gelang 21%, Cacing Cambuk 11% dan Cacing tambang 0%. Angka ini lebih tinggi dari

pencapaian 2011 yaitu 28%, sehingga yg ditetapkan tahun 2012 yaitu 20% belum mampu dicapai.

9. **Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)**

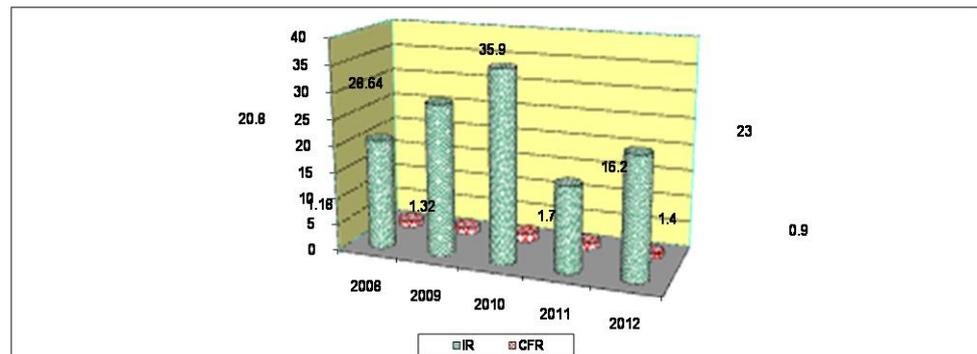
Seperti kebanyakan penyakit tropis lainnya, malaria merupakan salah satu penyebab kematian di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi, sanitasi yang buruk, serta daerah yang terlalu padat, membantu memudahkan penyebaran penyakit tersebut. Ada beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi daerah endemis *Malaria*, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Asahan, Langkat, Karo, dan Tapanuli Selatan.

Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API = Annual Parasite Incidence) dihitung berdasarkan angka kesakitan malaria (berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium) per 1.000 penduduk dalam 1 tahun di daerah endemis malaria. Pada tahun 2012 ditemukan 13.632 kasus positif Malaria, sehingga API adalah sebesar 1,02 per 1000 penduduk. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 1,44%; tahun 2010 yaitu 1,9% dan tahun 2009 yaitu 1,8%.

10. **Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk**

Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan kurun waktu 2008-2010. Peningkatan IR DBD begitu tajam sekitar 9% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR mencapai diatas 35% dengan jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 8.889 orang. Pada tahun 2011, IR DBD turun secara drastis menjadi 16,2% dengan jumlah penderita sebanyak 5.545 orang, dan pada tahun 2012 kembali menunjukkan peningkatan dengan IR 23% dengan jumlah penderita sebanyak 4.427 orang. Bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2012 yaitu 40/100.000 penduduk, maka hasil capaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan target IR DBD Nasional yaitu <53/100.000 penduduk maka penemuan kasus penderita DBD di Provinsi Sumatera Utara belum semuanya mampu ditemukan.

Grafik 18
Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012



Di sisi lain angka CFR (Case Fatality Rate) DBD menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008, dan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yaitu 1,7%. Pada tahun 2012, pencapaian CFR DBD sudah mampu diturunkan menjadi 0,9% dan mampu mencapai target nasional yaitu <1%. Ini menunjukkan kecepatan dan penanganan kasus penderita DBD sudah mampu ditingkatkan.

11. Kasus Suspek Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani sesuai Standard

Kasus suspect Flu burung/Avian Influenza mulai muncul di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu dengan ditemukannya 9 (sembilan)

Orang diduga menderita penyakit Flu Burung, tetapi hasil pemeriksaan

laboratorium terhadap pemeriksaan darah penderita dinyatakan negatif AI. Kemudian pada tahun 2006 ditemukan 15 orang dari Kabupaten Karo yang dinyatakan Suspect Flu Burung. Kejadian yang terjadi di Kab. Karo ini merupakan kluster terbesar di dunia dan tingkat kematian tertinggi di Indonesia (CFR 85%). Pada tahun 2007, sebanyak 34 orang dinyatakan suspect, 1 orang diantaranya positif dan meninggal dunia. Dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan suspect Flu Burung yaitu sebanyak 51 kasus dengan jumlah terbesar di Kabupaten Asahan (16 kasus) tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Sejak tahun 2009 sampai 2011 tidak ditemukan kasus flu burung, namun pada tahun 2012 ditemukan 2 (dua) kasus suspect Flu burung yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi dan ke-2 kasus (1000%) yang ditangani sesuai standard.

12. Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta

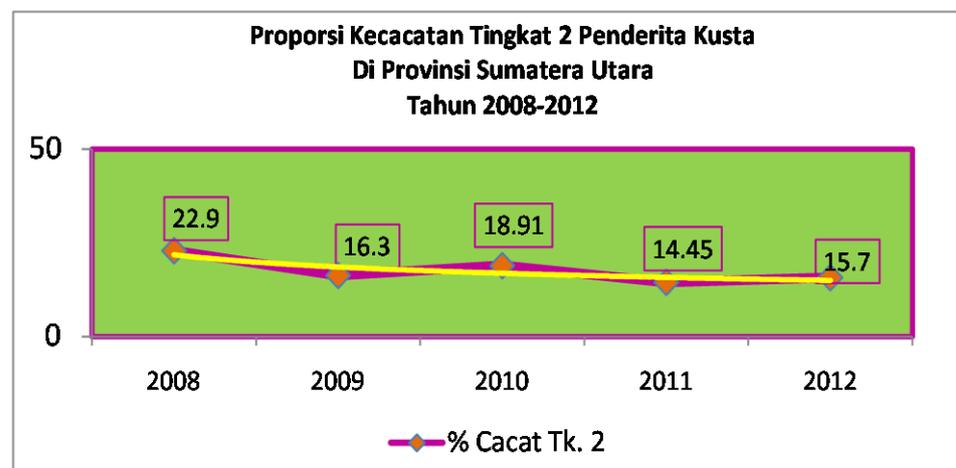
Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita

sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara.

Pada umumnya penyakit kusta menimbulkan kecacatan yang menyebabkan penderita tidak dapat mandiri sehingga menjadi beban bagi orang lain.

Proporsi kecacatan tingkat 2 menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 mencapai angka sekitar 23% dan pada tahun 2012 menurun menjadi sekitar 15,7%. Namun, adanya kejadian kecacatan tingkat 2 ini mengindikasikan masih adanya keterlambatan penemuan kasus dan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan.

Grafik 19



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, namun pencapaian 2012 tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 8% . .

13. Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Penyakit

Kelengkapan dan ketepatan pelaporan penyakit ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta tata laksana penyakit.

Pencapaian kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit pada tahun 2012 hanya 76,56%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 78,50%.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 75%, maka capaian indikator telah mampu mencapai target yang ditetapkan.

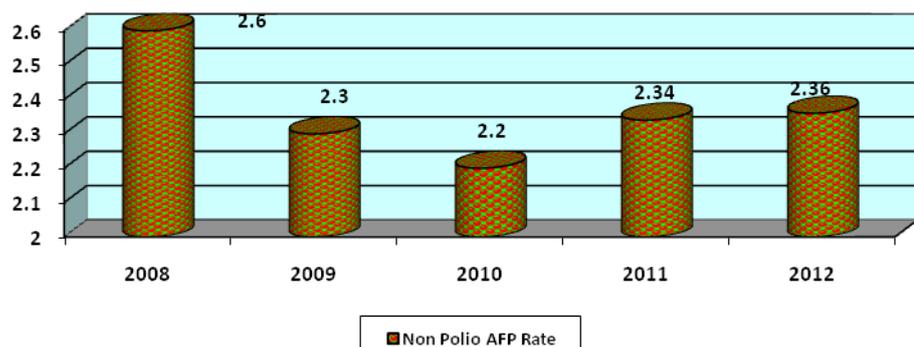
14. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB

Pada tahun 2012, terjadi 57 kasus KLB dan seluruh kasus (100%) dilakukan Penyelidikan epidemiologi <24 jam. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85%. Frekuensi KLB tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 36 kasus KLB, dan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam juga mengalami peningkatan dari 31 kasus atau 85% tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan epidemiologi <24 jam di wilayah KLB umumnya telah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan mampu menimalisir kejadian kematian pada saat KLB.

15. Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per 100.000 Penduduk

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi dunia bebas polio, sejak tahun 1995 Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu pemberian vaksin polio pada anak < 5 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan dari pelaksanaan imunisasi tambahan ini harus dibarengi dengan persentase penemuan penderita AFP yaitu 2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Perkembangan AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 20
Non Polio AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-
2012



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

Angka AFP Sumatera Utara sejak tahun 2006 telah mampu mencapai target nasional yaitu $>2/100.000$ anak berusia < 15 tahun per tahun. Pada tahun 2012, dari 101 kasus AFP yang ditargetkan, mampu ditemukan sebanyak 88 kasus dengan specimen adekuat yaitu 100%, sehingga AFP Rate mencapai $2,34/100.000$ anak berusia < 15 tahun per tahun pada tahun 2012.

16. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 Jemaah Haji

Program Kesehatan Haji secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia.

Pada tahun 2012, dari 8.230 jemaah haji berasal dari Sumatera Utara, sebanyak 24 jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Dengan jumlah tersebut angka kematian jemaah haji Sumatera Utara mencapai $2,92/1.000$ jemaah haji.

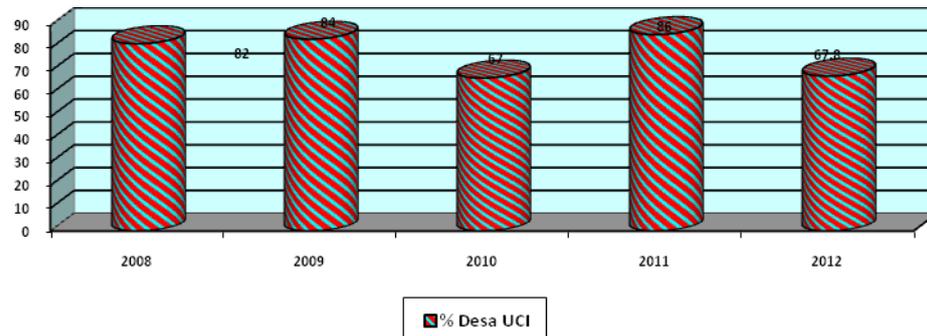
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 8.500 jemaah haji 18 jemaah diantaranya meninggal dunia dan angka kematian jemaah haji Sumatera Utara yaitu $2,12/1.000$ jemaah haji.

Dibandingkan dengan tahun 2010, angka kematian jemaah haji pada tahun 2012 juga lebih tinggi, dimana pada tahun 2010 pencapaiannya sebesar $2,7/1.000$ jemaah haji. Pencapaian ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu $<2/1.000$ jemaah haji, bahkan cenderung mengalami peningkatan, sehingga pelaksanaan program jemaah haji perlu ditingkatkan sehingga tahun-tahun mendatang sehingga angka kematian jemaah haji dapat diturunkan.

17. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005-2007, persentase desa UCI berada dibawah angka 80%.

Grafik 21
Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-2012



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2012

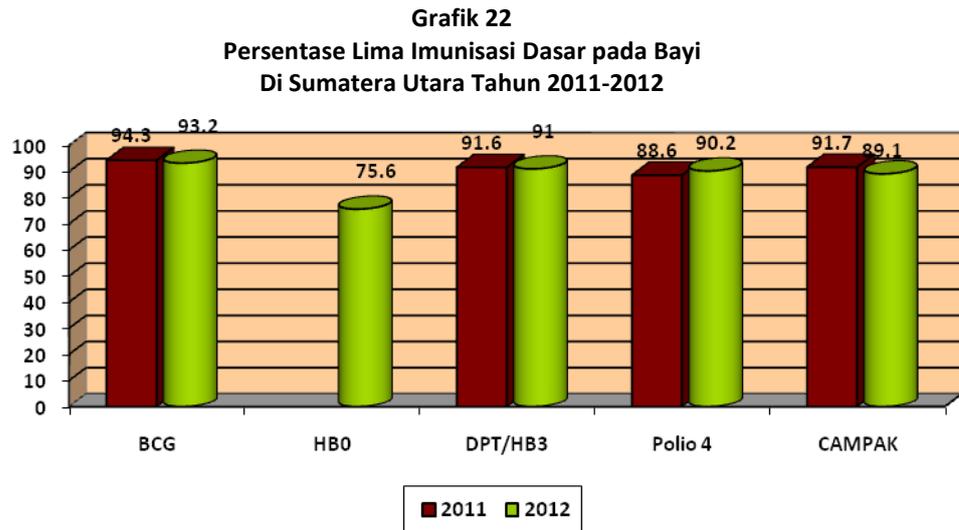
Pada tahun 2008-2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%, namun kembali mengalami penurunan hampir 20% sehingga hanya mencapai 67,8% pada tahun 2012. Pencapaian ini tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80% pada tahun 2012.

Fluktuatifnya pencapaian desa UCI ini menunjukkan masih belum mantapnya dalam manajemen program imunisasi di kabupaten/kota dan puskesmas, sehingga desa-desa UCI pada tahun sebelumnya tidak mampu dipertahankan untuk tahun depan. Perlu adanya penguatan manajemen program imunisasi sampai ke tempat pelayanan terkecil, sehingga mampu mencegah KLB PD3I di Sumatera Utara.

18. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2012 adalah 76,6%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 85%, maka angka tersebut belum mampu mencapai target dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2011 yaitu 88,6% dan tahun 2010 yaitu 93%.

Pencapaian 5 (lima) dasar pada bayi di Sumatera Utara tahun 2012, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



19. Persentase Anak Sekolah Usia Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Pencapaian persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap tahun 2012 yaitu 97,3% mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2011 yaitu 96%; dan telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 85%.

20. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menghadapi “*triple burden of diseases*” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular seperti penyakit karena perilaku tidak sehat dan degeneratif serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung). Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini.

Pada tahun 2012, terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular yaitu Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias, Padang Lawas dan Padang Lawas

Utara; sehingga persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular hanya mencapai 78,8%. Pencapaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2011 yaitu seluruh Kab/Kota (100%) telah melaksanakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular.

21. *Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra*

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra tahun 2011, yaitu sebanyak 8 kab/kota (27,3%) yaitu Kota Pematang Siantar, Sibolga, Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Nias, Nias Selatan dan Samosir. Pada tahun 2012, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 35%, maka hasil capaian 2012 jauh melampaui target yang ditetapkan.

22. *Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan Wabah dan Bencana*

Sampai tahun 2012, seluruh Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana atau 100%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 85%, maka hasil capaian ini sudah melampaui target.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 6.279.835.350, dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar
2. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
3. Akselerasi Imunisasi-Universal Child Immunization (UCI)
4. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
 5. Surveilans Kesehatan Haji
 6. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 7. Pembinaan Surveilans Kesehatan Matra
 8. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
 9. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular pada UPT
10. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor)
11. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya
12. Pengendalian Penyakit Malaria
13. Pengendalian Penyakit Filariasis
14. Pengendalian Penyakit Tuberculosis
15. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
16. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
17. Pengendalian Penyakit Kusta
18. Pengendalian Penyakit Frambusia
19. Pengendalian Penyakit Diare dan Demam Typoid
20. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Zoonosis)
21. Pengendalian Penyakit Kecacingan
22. Operasional Pengelolaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan Sehat

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 6.216.545.355,- atau 98,99%.

2.6.5. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Di dalam Penetapan Kinerja terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja Program Upaya Kesehatan Perorangan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit	1,42%	1,48%	105%
2	Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat	85%	84,8%	99,76
3	Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	18 RSUD	13 RSUD	72,22%
4	Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	8 RSUD	2 RSUD	25%
5	Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)	70%	54,84%	78,34%

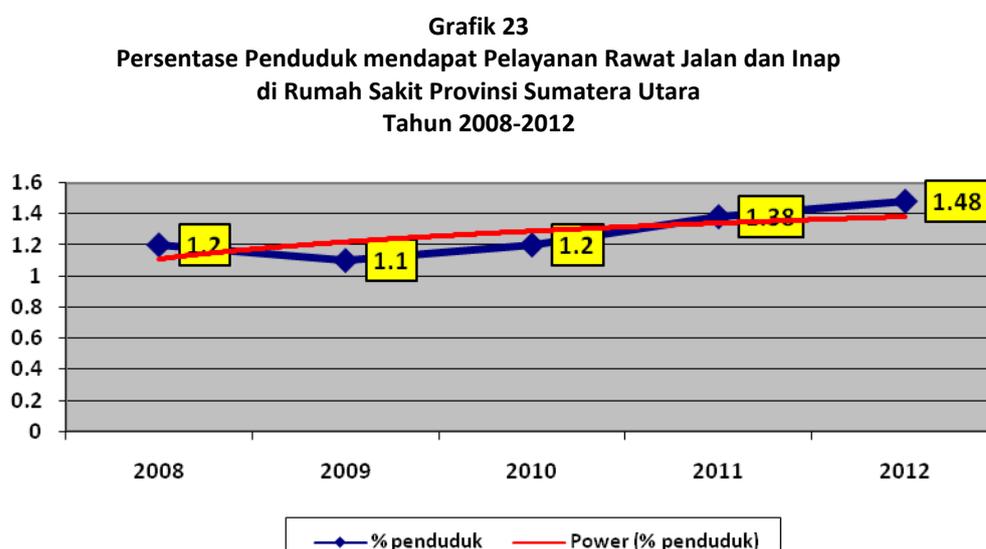
NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
6	Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan	70%	37,9%	54,14%
7	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	30%	37,04%	123,47%
8	Persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas	46%	28,04%	60,96%
9	Tercapainya persentase RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana	20%	37,04%	185,2%
10	Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard	75%	61%	81,33%
11	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut)	24 K/K	20 K/K	83,33%
12	Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di RS Kusta	2 RS	2 RS	100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 12 (dua belas) indikator kinerja Upaya Kesehatan Perorangan, terdapat lima indikator (42%) yaitu indikator ke-1, 2, 7, 9 dan 12 yang berkategori BAIK, dua indikator (16%) yaitu indikator ke-10 dan 11 berkategori SEDANG, tiga indikator (25%) yaitu indikator ke-3, 5 dan 8 berkategori KURANG, dan dua indikator (16%) yaitu indikator ke-4 dan 6 berkategori SANGAT KURANG. Indikator-indikator yang pencapaian berkategori kurang dan sangat kurang berhubungan dengan masih kurangnya komitmen dari pemilik rumah sakit untuk memenuhi standard sarana dan prasarana rumah sakit serta untuk melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD khususnya di RSUD.

Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. **Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit**

Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) menunjukkan kecendrungan adanya peningkatan kurun waktu 2008-2012, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini.



Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2012

Tahun 2012, penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap (pemerintah dan swasta) adalah 193.880 orang; dengan perkiraan jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 13.000.000 jiwa, maka diperhitungkan persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap yaitu 1,48%. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 1,38%; dan telah mencapai target tahun 2012 yaitu 1,42%.

2. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat

Sampai dengan akhir 2012, dari 198 rumah sakit yang ada di Sumatera Utara terdapat 168 rumah sakit yang telah melaksanakan pelayanan gawat darurat, sehingga persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat mencapai 84,8%. Khusus untuk RSUD, dari 31 RSUD yang ada di Sumatera Utara hanya 16 RSUD atau 52% yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standard, seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 40
RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	RSUD Mampu PONEK
1	RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai
2	RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
3	RSUD Pakam Kabupaten Deli Serdang
4	RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
5	RSUD Dr. F.L Tobing Kota Sibolga
6	RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu
7	RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
8	RSUD Kota Padang Sidempuan
9	RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
10	RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo
11	RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai
12	RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
13	RSUD Gunung Sitoli Kabupaten Nias
14	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir
15	RSUD Kabupaten Mandailing Natal.
16	RSUD Kabupaten Sidikalang.

3. Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penyediaan sarana rumah sakit yang mampu PONEK sangat dibutuhkan, terutama pada kasus-kasus kegawatdaruratan. Terbentuknya RSUD mampu PONEK sangat tergantung kepada tersedianya tenaga dokter spesialis khususnya spesialis kandungan dan anak; sarana penunjang medik, kompetensi tim PONEK serta dukungan manajemen yang dilihat dari adanya SK Tim PONEK. Sampai tahun 2012, terdapat 13 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan PONEK, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 41
RSUD Mampu PONEK di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 - 2012

TAHUN	RSUD Mampu PONEK
2010	1. TANJUNG PURA – LANGKAT
	2. DR. FL. TOBING – SIBOLGA
	3. DR. TENGKU MANSYUR - TJ. BALAI
	4. TARUTUNG – TAPANULI UTARA
	5. GUNUNG SITOLI – NIAS*
	6. LUBUK PAKAM DELI – SERDANG
2011	7. DR. RM DJOELHAM – BINJAI
	8. DR. PIRNGADI – MEDAN
	9. DR. KUMPULAN PANE – TEBING TINGGI
	10. RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU
	11. KABANJAHE – KARO
2012	12. HADRIANUS SINAGA - SAMOSIR
	13. KOTA PADANG SIDEMPUAN
	14. SIDIKALANG

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2010-2012

Pada tahun 2010, RSUD Gunung Sitoli adalah RS PONEK, namun akibat kekosongan dokter spesialis kandungan pada tahun 2011, maka RSUD Gunung Sitoli tidak lagi termasuk di dalam RSUD Mampu PONEK.

4. Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011.

Sampai tahun 2012, dari 8 RSUD ditargetkan menjadi BLUD hanya 2 RSUD yang telah menjadi BLUD, yaitu: RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi pada tahun 2010 dan RSUD Dr. Pirngadi Medan menjadi BLUD pada tahun 2011.

Namun ada 5 (lima) RSUD yang pada tahun 2012 telah melakukan persiapan menuju BLUD yaitu : RSUD Pakam-Deli Serdang, RSUD Dr. F.L Tobing-Sibolga, RSUD Dr. Djasamen Saragih-Pematang Siantar, RSUD Pandan-Tapanuli Tengah dan RSUD Tarutung-Tapanuli Utara. Diharapkan ke-5 RSUD ini akan mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi BLUD pada awal 2013.

5. Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

Rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM RS adalah rumah sakit yang telah terakreditasi. RS yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana, pelayanan, dan standard jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Pada tahun 2011, jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) adalah RSUD yang telah terakreditasi dan masih valid akreditasinya sebanyak 10 RSUD dari 29 RSUD yang ada di Sumatera Utara atau 34,5%. Pada tahun 2012, jumlah RSUD yang telah terakreditasi meningkat jumlahnya menjadi 17 RSUD, sehingga capaian kinerja pada indikator jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) mencapai 54,84%. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 70%.

6. *Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan*

Luasnya wilayah Sumatera Utara serta belum terpenuhinya jumlah tenaga medis, khususnya tenaga spesialis di seluruh RSUD, maka untuk mengurangi cost (pembiayaan) dan beban kerja akibat rujukan pasien terutama di rumah-rumah sakit besar, seperti RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP H. Adam Malik Medan, maka pembentukan **“Regionalisasi Sistem Rujukan”** perlu dilaksanakan di Sumatera Utara. Arah menuju Regionalisasi Sistem Rujukan telah dilaksanakan sejak tahun 2009, melalui sosialisasi ke RSUD. Dan pada tahun 2011, ditargetkan telah terbentuk Nota Kesepakatan Pembentukan Regionalisasi Sistem Rujukan antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Direktur RSUD Sumatera Utara, dimana minimal 50% (25 RSUD) menandatangani kesepakatan tersebut. Sama halnya dengan tahun 2011, pada tahun 2012, jumlah RSUD yang telah menandatangani kesepakatan yaitu 11 RSUD (37,9%), yaitu : RSUD Dr. Pirngadi Medan, RSUD Pakam Deli Serdang, RSUD Dr. R.M. Djoelhm Binjai, RSUD Rantau Prapat Labuhan Baru, RSUD FL. Tobing Sibolga, RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir, RSUD Parapat Simalungun, RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi, RSUD Sidikalang Dairi, RSUD Porsea Tobasa dan RSUD Tanjung Pura Langkat.

7. *Persentase rumah sakit yang terakreditasi*

Sampai dengan tahun 2012, dari 189 rumah sakit yang ada di Sumatera Utara yang terakreditasi adalah sebanyak 74 Rumah Sakit atau 39,15%. Pencapaian tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 yaitu 16,93% dan tahun 2010 yaitu 11,45%; sehingga target pencapaian tahun 2012 yaitu 30% telah tercapai. Perkembangan rumah sakit terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 42
Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2012

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
RSU PEMERINTAH		
1. RSUD Kota Padang Sidempuan	2012	5 pelayanan
2. RSUD Sultan Sulaiman - Sergei	2012	5 pelayanan
3. RSUD Panyabungan - Natal	2012	5 pelayanan
4. RS Jiwa Daerah Prov Sumut	2012	5 pelayanan
5. RSUD Pandan Tapanuli Tengah	2012	5 pelayanan
6. RSUD Tapanuli Selatan	2012	5 pelayanan
7. RSUD Gunung Sitoli	2012	5 pelayanan
8. RSUD Dr. F.L Tobing – Sibolga	2011	12 Pelayanan
9. RSUD Rantau Prapat	2011	16 Pelayanan
10. RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam	2011	16 Pelayanan
11. RSUDDjasamen Saragih Pematang Siantar	2011	12 Pelayanan
12. RSUD Abdul Manan Kisaran	2011	5 Pelayanan
13. RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi	2010	12 Pelayanan
14. RSUD Dr. Mansyur Tj. Balai	2010	5 Pelayanan
15. RSUD Sidikalang	2009	5 Pelayanan
16. RSUD Dr. Djamaloedin – Binjai	2009	5 Pelayanan
17. RSUP H. Adam Malik	2009	16 Pelayanan
18. RSUD Dr. Pirngadi Medan	2007	16 Pelayanan
19. RSUD Tarutung	2001	5 Pelayanan
RSU SWASTA		
1. RS Grand Meditra Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
2. RSU Sembiring Delitua	2012	5 pelayanan
3. RS Estomihi Medan	2012	5 pelayanan
4. RSU Mitra Sejati Medan	2012	5 pelayanan
5. RSU Sarah Medan	2012	5 pelayanan
6. RSU Bidadari Binjai	2012	5 pelayanan
7. RSU Sari Mutiara Medan	2012	5 pelayanan
8. RSU Deli Medan	2012	5 pelayanan
9. RSU Bunda Thamrin Medan	2012	5 pelayanan
10. RSU Sri Torgamba Labusel	2012	5 pelayanan
11. RS Columbia Asia Medan	2012	5 pelayanan
12. RS Methodist Medan	2012	5 pelayanan
13. RSU Nur'aini Labuhanbatu Selatan	2012	5 pelayanan

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
14. RS Permata Bunda Medan	2012	5 pelayanan
15. RS Sri Pamela Tebing Tinggi	2012	5 pelayanan
16. RSU Materna Medan	2012	5 pelayanan
17. RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
18. RSU Bhakti Medan	2012	5 pelayanan
19. RS Tanjung Selamat Langkat	2012	5 pelayanan
20. RS dr. Gerhard Lumban Tobing	2012	5 pelayanan
21. RS Indrya Husada Labura	2012	5 pelayanan
22. RS Bangkatan Binjai	2012	5 pelayanan
23. RSU Sundari Medan	2012	5 pelayanan
24. RS Laras Simalungun	2012	5 pelayanan
25. Rumkital Dr. Komang Makes Mdn	2012	5 pelayanan
26. RS Horas Insani P. Siantar	2012	5 pelayanan
27. RS Methodist Susanna Wesley	2012	5 pelayanan
28. RSU Melati Perbaungan	2012	5 pelayanan
29. RSU Trianda Serdang Bedagai	2012	5 pelayanan
30. RSU Prof. Dr. Boloni	2012	5 pelayanan
31. RSU Vina Estetica Medan	2012	5 pelayanan
32. RSU Artha Medica Binjai	2012	5 pelayanan
33. Rumkit Abdul Manik Lanud	2012	5 pelayanan
34. RSU Sinar Husni Medan	2012	5 pelayanan
35. RSU Sumatera Eye Center	2012	5 pelayanan
36. RSU Delima Medan	2012	5 pelayanan
37. RSU Bina Kasih Medan	2012	5 pelayanan
38. RSIA Sri Ratu	2012	5 pelayanan
39. Martha Priska-Medan	2011	16 Pelayanan
40. HKBP Balige	2011	5 Pelayanan
41. Vita Insani – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
42. Islam Malahayati	2011	5 Pelayanan
43. Harapan – Siantar	2011	5 Pelayanan
44. Rumkit Tk. II Putri Hijau	2011	5 Pelayanan
45. Rumkit Tk. IV – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
46. Rumkit Binjai	2011	5 Pelayanan
47. RS Bhayangkara T. IV Tebing Tinggi	2011	5 Pelayanan
48. Permata madina	2010	5 Pelayanan
49. Advent - Medan	2009	5 Pelayanan
50. Bhayangkara Medan	2009	5 Pelayanan
51. Imelda – Medan	2008	5 Pelayanan
52. Elisabeth-Medan	2006	12 Pelayanan
53. PTPN II Temb. Deli	2005	5 Pelayanan
54. Herna – Medan	2002	5 Pelayanan
55. Haji Medan	2002	5 Pelayanan

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2012

8. Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana

Sampai dengan tahun 2012, dari 189 rumah sakit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 53 RSU (28,04%) yaitu 15 RSUD, 1 RSU TNI-AL dan 37 RSU Swasta yang telah ditetapkan kelasnya.

**Tabel 43
Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2012**

NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
	RSU PEMERINTAH		
1	RSUD Sipirok	C	1999
2	RSUD Tarutung	B	2000
3	RSUD Rantau Prapat	B	2009
4	RSUD Parapat	D	1994
5	RSUD Pakam Deli Serdang	B	2008
6	RSUD Dolok Sanggul	C	1999
7	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir	C	2008
8	RSUD Sultan Sulaiman Sergej	C	2008
9	RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga	B	2009
10	RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. Balai	C	1987
11	RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantara	B	1992
12	RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi	B	2009
	RSU SWASTA		
13	RSUD Dr. Pirngadi Medan	B Pend	2007
14	RSUD Dr. Djoelham Binjai	B	2008
15	RSUD Padang Sidempuan	B	1999
16	RSU TNI-AL Tk. III Komang Makes	D	2012
17	RSU Mitra Sejati Medan	C	2009
18	RSU Martha Friska Medan	B	2009
19	RSU Sembiring Delitua	C	2009
20	RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan	B	2009
21	RSU Permata Bunda Medan	B	2010
22	RSU Badrul Aini Medan	C	2010
23	RSU Sarah Medan	D	2010
24	RSU Sari Mutiara Medan	B	2010
25	RSU Nur'aini Kota Pinang	D	2010
26	RSU Herna Tebing Tinggi	D	2010
27	RSIA Eva	C	2010
28	RSU Vita Insani	C	2011

NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
29	RSU Advent Medan	C	2011
30	RSU Estomihi	C	2011
31	RSU Colombia Asia	B	2011
32	RSU Deli	C	2011
33	RSU Sembiring Deli Tua	B	2011
34	RSU Grand Medistra	B	2011
35	RSU Sinar Husni Deli Serdang	D	2011
36	RSU Melati Perbungan	D	2011
37	RSU Rumkit Tk. II Putri Hijau	B	2011
38	RSU Artha Medika Binjai	C	2011
39	RSU Latersia Binjai	C	2011
40	RSU Bina Kasih Medan	B	2012
41.	RSU Bidadari Binjai	C	2012
42.	RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	C	2012
43.	RSU Ameta Sejahtera	D	2012
44.	RSU Delima Medan	D	2012
45.	RSU Sundari Medan	C	2012
46.	RSU Methodist Medan	C	2012
47.	RSU Sufina Aziz Medan	D	2012
48.	RSU Bunda Thamrin Medan	C	2012
49.	RSU Susana Wesley Medan	C	2012
50.	RSU Sinar Husni Medan	C	2012
51.	RSK Accuplast Medan	C	2012
52.	RSK Mata Medan Baru	C	2012
53.	RSIA Stella Maris Medan	C	2012

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2012

Dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah RSU yang ditetapkan kelasnya mengalami peningkatan yaitu dari sebelumnya 38 RSU. Dan pada tahun 2012 terdapat 30 RSU lain yang telah dipersiapkan untuk penetapan kelas, namun belum divitasi oleh Kemenkes dan belum dikeluarkan SK Penetapan kelasnya. Untuk ditetapkan kelasnya; dan diharapkan pada tahun 2012 Surat Penetapan Kelas sudah dapat diterima. Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya merupakan salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi.

9. **Persentase rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana**

Rumah Sakit yang telah menerapkan standard sarana dan prasarana adalah rumah sakit yang telah terakreditasi dan akreditasinya masih berlaku (valid).

Pada tahun 2010, rumah sakit yang terakreditasi dan menerapkan standard sarana dan prasarana sebanyak 15 rumah sakit (7,14%), tahun 2011 meningkat jumlahnya menjadi 24 rumah sakit (12,7%), dan tahun 2012 meningkat menjadi 74 rumah sakit (39,15%).

9. Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard

Sampai tahun 2012, dari 115 puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard sebanyak 70 puskesmas (61%). Angka ini masih sama dengan pencapaian tahun 2011 dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2012 yaitu 75%. Penyebaran puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard, dapat dilihat jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 44
Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Haji sesuai Standard
berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	PUSK PELY HAJI	SESUAI STANDARD
2	MANDAILING NATAL	4	-
3	TAPANULI SELATAN	5	-
4	TAPANULI TENGAH	2	-
7	LABUHAN BATU	8	8
8	ASAHAN	3	3
9	SIMALUNGUN	2	-
10	DAIRI	1	-
11	KARO	1	-
12	DELI SERDANG	8	-
13	LANGKAT	7	4
16	PAKPAK BHARAT	1	-
18	SERDANG BEDAGAI	4	-
19	BATUBARA	11	11
20	PADANG LAWAS	2	-
21	PADANG LAWAS UTARA	6	6
22	LABUHAN BATU SELATAN	8	8
23	LABUHAN BATU UTARA	5	5
26	SIBOLGA	2	-
27	TANJUNGBALAI	4	4
28	PEMATANG SIANTAR	3	-
29	TEBING TINGGI	3	-
30	MEDAN	16	16
31	BINJAI	2	-
32	PADANGSIDIMPUAN	5	5
33	GUNUNG SITOLI	1	-
JUMLAH		115	70

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2012.

10. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut)

Sampai tahun 2012, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sebanyak 20 Kab/Kota. Distribusi Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 45

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pilihan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2012

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	JENIS PELAYANAN
2011	1. Medan	Kesehatan Jiwa
	2. Tanjung Balai	Kesehatan Jiwa
	3. Padang Sidempuan	Kesehatan Jiwa
	4. Langkat	Kesehatan Jiwa
	5. Samosir	Kesehatan Jiwa
	6. Serdang Bedagai	Kesehatan Jiwa
	7. Nias Selatan	Kesehatan Jiwa
	8. Dairi	Kesehatan Jiwa
	9. Toba Samosir	Kesehatan Jiwa
	10. Pematang Siantar	Kesehatan Indera
	11. Batubara	Kesehatan Indera
	12. Gunung Sitoli	Kesehatan Indera
\	13. Padang Lawas	
	14. Mandailing Natal	
	15. Labuhan batu	
2012	1. Binjai	Kesehatan Jiwa
	2. Tebing Tinggi	Kesehatan Jiwa
	3. Deli Serdang	Kesehatan Jiwa
	4. Karo	Kesehatan Jiwa
	5. Simalungun	Kesehatan Jiwa

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2011-2012.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 104.099.509.300,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi Tim PONEK RS Kab/Kota
2. Fasilitasi Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).

3. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Darurat di RSUD Kab/Kota dan Konsultasi Program ke Kemenkes
4. Pengadaan Kantong Darah dan Reagen bagi PMI Provinsi Sumatera Utara
5. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT
6. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT
7. Pengadaan Alat Bantu Kesehatan bagi Penderita Cacat
8. Pelayanan X-Ray Keliling Kabupaten/Kota
9. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung
10. Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) ke RSUD Kabupaten/Kota
11. Review Akhir Kegiatan Kesehatan Haji
12. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN)
13. Sosialisasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
14. Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program Kesehatan Jiwa ke Kemenkes
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh UPT KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT)
16. Screening Gangguan Penglihatan dan Pendengaran di Kabupaten/Kota
17. Pengembangan Pelayanan Rekam Medik
18. Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan
19. Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
20. Bimbingan Teknis dalam rangka Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
21. Workshop Akreditasi Rumah Sakit
22. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Komite Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
23. Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas untuk Rumah Sakit Swasta
24. Pemantapan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
25. Crash Program Surveyor dalam rangka Akreditasi Rumah Sakit.

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 99.814.405.821,- atau 95,88%.

2.6.6. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja 6 (enam) indikator kinerja Program Sumber Daya Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Sumber Daya Kesehatan
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	100%	13,74%	13,74
2	Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi	15 pelatihan	3 pelatihan	20
3	Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi	90%	90%	100
4	Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan	20 Kab/Kota	33 Kab/Kota	165
5	Ratio tenaga medis per puskesmas	≥ 1	0,97	97
6	Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH)	26 K/K	5 K/K	19,23

Dari persen capaian terlihat, bahwa persen pencapaian indikator Program Sumber Daya Kesehatan diatas tiga indikator (50%) yaitu indikator ke-3,4 dan 5 berkategori BAIK dan tiga indikator (50%) yaitu indikator ke-1,2 dan 6 berkategori SANGAT KURANG. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecendrungan pencapaian sampai tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi

Pada tahun 2012, Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah selesai diproses sejumlah 2.978 dari 21.672 berkas usulan yang dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta, sehingga pencapaian persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi hanya mencapai 13,74%; sangat jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi

Pelatihan-pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 pelatihan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji
- b. Pelatihan Manajemen Klinik Kebidanan di Puskesmas, dan
- c. Pelatihan Manajemen Diklat.

3. Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi

Institusi pendidikan di bawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu institusi pendidikan D3 yaitu sebanyak 141 institusi yang tersebar di seluruh kab/kota. Pada tahun 2012, dari jumlah tersebut sebanyak 121 institusi atau 90% dilaksanakan pembinaan dan pengawasan. Pencapaian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu 119 institusi atau 89,5%, dan tahun 2010 yaitu 79,20% dan tahun 2009 yaitu 75%. Pencapaian tahun 2012, telah mampu mencapai target yang yang ditetapkan yaitu 90%.

4. Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan

Pada tahun 2012, jumlah Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan meningkat menjadi 20 Kab/Kota yang sebelumnya pada tahun 2011 yaitu 15 Kab/Kota. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional yaitu: Kota Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Batubara, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Jumlah kab/kota yang

menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2010, yaitu 10 kab/kota.

5. *Ratio tenaga medis per puskesmas*

Pada tahun 2012, dari 546 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 526 puskesmas yang telah memiliki tenaga medis setidaknya 1 orang. Puskesmas yang belum memiliki tenaga medis sebanyak 18 puskesmas, sehingga ratio tenaga medis per puskesmas mencapai 0,97; angka ini tidak berbeda dengan pencapaian pada tahun 2011.

C. *Kegiatan-kegiatan Tahun 2012*

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Sumber Daya Kesehatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.616.130.150,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Operasional Pengelolaan Program Sumber Daya Kesehatan
2. Pelatihan Manajemen Diklat
3. Pelatihan Manajemen Kinerja Klinik Bidan di Puskesmas
4. Pertemuan Pemantapan PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional dr/drg, Perawat dan Bidan
5. Pertemuan Berkala Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
6. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
7. Pembinaan/Perencanaan SDM Kesehatan Kabupaten/Kota
8. Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan
9. Sosialisasi Program Internship Dokter Indonesia
10. Pembentukan Saka Bakti Husada (SBH) Siaga Bencana
11. Validasi Basis Data SDM Kesehatan
12. Sosialisasi Pembentukan tim Penilai Jabatan Fungsional bagi Kab/Kota
13. Sosialisasi Permenkes RI No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Sumber Daya Kesehatan adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.523.526.050,- atau 94,27%.

2.6.7. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Tahun 2012

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
1	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100%	100%	100%
2	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan	70%	53,4%	76,29%
3	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah	23 Kab/Kota	15 Kab/Kota	65,21%
4	Persentase Gakin (Keluarga Miskin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan Kelas III rumah sakit	100%	100%	100%
5	Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD	9%	7%	77,78%
6	Jumlah hukum kesehatan yang disosialisasikan	3 Peraturan / Tahun	1 Peraturan / Tahun	33,33%
7	dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan yang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
8	Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
9	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	7 Dokumen / Tahun	7 Dokumen / Tahun	100%
10	Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan	100%	100%	100%
11	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100%

Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 11 indikator kinerja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdapat satu indikator (9%) yaitu indikator ke-6 yang berkategori SANGAT KURANG, tiga indikator (27%) berkategori KURANG, yaitu indikator ke-2, 3 dan 5 dan tujuh indikator berkategori BAIK (64%) yaitu indikator 1,4,7, 8,9,10, dan 11. Melihat bahwa untuk meningkatkan capaian indikator yang berkategori sangat kurang sangat memerlukan kerjasama dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kab/Kota, maka penguatan komitmen dan kerjasama dalam pembiayaan kesehatan merupakan hal yang menjadi prioritas pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan ke depan. Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan

Sesuai dengan jumlah kuota penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diterbitkan oleh Kemenkes RI, maka keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebanyak 4.124.247 jiwa atau sekitar 31,6% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Dan jumlah masyarakat miskin berdasarkan kuota Kemenkes ini sudah melebihi jumlah

penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara berdasarkan data BPS tahun 2010, yaitu 1.474,230 jiwa atau 11,27%. Dengan demikian seluruh masyarakat miskin (100%) di Sumatera Utara telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan

Pembiayaan kesehatan yang bersumber masyarakat, baik perorangan maupun kelompok diarahkan pada pembiayaan upaya kesehatan yang terorganisir melalui pembentukan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatannya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,6% dari tahun 2011, yaitu dari 53,4% menjadi 55%. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya kab/kota yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah mencapai 18 kab/kota, sehingga jumlah penduduk yang tercover dalam Jamkesda yang sebelumnya 1.051.403 jiwa menjadi 1.269.363 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk yang telah memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menjadi 7.123.971 jiwa atau 55% dari jumlah penduduk Sumatera Utara, yang sebelumnya pada tahun 2011 yaitu 6.906.011 jiwa. Adapun jumlah peserta jaminan kesehatan dirinci menurut jenis jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diperinci
Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012

NO	JENIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	JUMLAH
1	JAMKESMAS	4.124.247
2	ASURANSI SOSIAL	859.939
3	ASURANSI KOMERSIAL	193.573
4	TNI/POLRI	22.758
5	JAMSOSTEK	654.091
6	JAMKESDA	1.269.363
JUMLAH		7.123.971

Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2012

Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2011 belum mampu mencapai target Renstra Dinkes Provsu dan target nasional yaitu 60%. Sulitnya mencapai target tersebut disebabkan

karena sebagian besar penduduk Sumatera Utara adalah kelompok pekerja informal.

3. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, terdapat 4 Kab/Kota yang bertambah menyelenggarakan Jamkesda, sehingga seharusnya jumlah Kab/Kota penyelenggara Jamkesda di Sumatera Utara sudah mencapai 20 Kab/Kota; namun karena dari 16 Kab/Kota penyelenggara Jamkesda pada tahun 2011 terdapat 2 Kab/Kota yang tidak melanjutkan penyelenggaraan Jamkesda pada tahun 2012, maka jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda adalah sebanyak 18 Kab/Kota sampai dengan akhir tahun 2012. Perkembangan Kab/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49
Kabupaten/Kota Penyelenggara Jamkesda
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012

TAHUN	KAB/KOTA PENYELENGGARA JAMKESDA	KET
2010	1. MEDAN	
	2. PEMATANG SIANTAR	
	3. TEBING TINGGI	
	4. TANJUNG BALAI	
	5. TOBA SAMOSIR	
2011	6. DELI SERDANG	
	7. TAPANULI UTARA	
	8. SAMOSIR	Tidak lanjut di 2012
	9. PADANG LAWAS	
	10. PAKPAK BHARAT	
	11. LABUHAN BATU	
	12. ASAHAN	
	13. PADANG SIDEMPUAN	
	14. SERDANG BEDAGAI	
	15. MANDAILING NATAL	Tidak lanjut di 2012
	16. BINJAI	
TAHUN	17. BATUBARA	
2012	18. LABUHAN BATU SELATAN	
	19. DAIRI	
	20. NIAS SELATAN	

Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2012

4. *Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD*

Pada tahun 2012, dana APBD Provinsi Sumatera Utara untuk bidang kesehatan mengalami kembali penurunan. Tahun 2012, dana APBD Provinsi (biaya langsung + tidak langsung) untuk bidang kesehatan hanya mencapai sekitar 3,20% dari total dana APBD Provinsi; mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu 3,52% dan tahun 2010 yaitu 4,54%. Persentase ini sangat jauh dari harapan Undang-Undang Kesehatan yaitu 10% dari total APBD di luar gaji. Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk bidang kesehatan juga tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persentase alokasi pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/Kota (belanja langsung + belanja tidak langsung) mencapai sekitar 7%; namun bila diluar belanja tidak langsung maka persentase ini turun menjadi sekitar 2% dari total dana APBD Kabupaten/Kota. Ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan bidang kesehatan lebih dari 50% adalah untuk membayar gaji pegawai dan hanya sebahagian kecil untuk pelaksanaan kegiatan/program kesehatan.

5. *Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK)*

Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2011. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.

6. *Jumlah dokumen perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan*

Dokumen-dokumen perencanaan dan pembiayaan yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen pada tahun 2011, yaitu: Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Inventaris Barang dan Jasa. Dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Rencana Kerja (Renja)/Triwulan, Laporan Realisasi Keuangan (Bulanan), Laporan Tahunan Kegiatan/Program, dan Laporan Semester.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program KMPK pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 35.282.916.450,- dengan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK
2. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC) dan Rapat-Rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO dalam rangka Sustainability PHP II
4. Pertemuan Regional Lintas Batas Bidang Kesehatan dalam rangka Penyusunan Model Penanggulangan Masalah Kesehatan (Penyakit Menular, Bencana, Gizi Buruk dan Pelayanan Kesehatan)
5. Pembinaan/Bimbingan Teknis Kesehatan Lintas Batas dan Konsultasi ke Pusat
6. Sidang Paripurna Anggota JHC dalam rangka Peningkatan Pencapaian Visi dan Misi Gubsu "Rakyat Tidak Sakit"
7. Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
8. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
9. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumut
10. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan
11. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
12. Evaluasi Midterm Program Jaminan Kesehatan bagi Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota
13. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota dalam Pengelolaan Laporan Program Jaminan Kesehatan
14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota
15. Pemantapan Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten/Kota
16. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda)
17. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan
18. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahunan

19. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester Hasil-Hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota se-Sumatera Utara
20. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2011
21. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kabupaten/Kota
22. Operasional Bank Data dan Web Site Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
23. Pembinaan Organisasi, Hukum, dan peraturan Perundang-Undangan
24. Bimbingan Teknis Monev Pembangunan Kesehatan
25. Pemantapan Manajemen Data dan Sistem Informasi Kesehatan

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 35.220.451.625,- atau 99,82%.

2.6.8. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Didalam Penetapan Kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2012, dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Tahun 2011

NO	INDIKATOR	SASARAN TAHUN 2011	CAPAIAN TAHUN 2011	% CAPAIAN
1	Jumlah penelitian pembangunan kesehatan	3 Penelitian / tahun	1 Keg Pengembangan Pembangunan Kesehatan	33.33%

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2012

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 untuk Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah Bench Marking Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 160.100.000,-. Sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah 100% dengan jumlah realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 152.795.000,- atau 95,44 %.

Persentase Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat

Capaian indikator ini bahwa dari target yang diperjajikan semula sebagaimana yang tertuang pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah 33 Kab/ Kota, realisasi 33 Kab/ Kota sehingga dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100 %. Capaian ini tentu tidak terlepas dari program/ kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2012, yaitu sebagai berikut :

Sesuai dengan Permensos RI No. 08 Tahun 2012, Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran pelayanan sosial ada 26 jenis berubah dari sebelumnya yang berjumlah 22 jenis. Pertambahan jenis PMKS berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, meliputi PMKS pemulung, korban trafiking, kelompok minoritas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak dengan kedisabilitas. Yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Penanganan warga/kelompok masyarakat yang dikategorikan PMKS.
- 2) Mendorong dan memperkuat PSKS yang tumbuh dari individu ysg tumbuh dari individu dan komunitas masyarakat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penanganan PMKS meliputi :

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 3) Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pada Tahun 2011 Penanganan tersebut diberikan kepada 2027 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Sistim Panti dan 2070 orang dengan sistim Non Panti, sedangkan pada Tahun 2012 diberikan kepada 2027 orang sistim Panti dan 3807 orang sistim Non Panti. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dikembangkan, dimana melalui APBD Tahun 2012 kepada LKM-KUBE Fakir Miskin telah diberikan bantuan sosial berupa penambahan modal usaha sebesar Rp. 148.000.000,- untuk LKM-KUBE Langkat.

PMKS yang telah difasilitasi untuk memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 meliputi :

- 1) Sistim Panti 2011 sebanyak 2027 orang.
- 2) Sistim Panti 2012 sebanyak 2027 orang.
- 3) Sistim Non Panti 2011 sebanyak 2070 orang.
- 4) Sistim Non Panti 2012 sebanyak 3807 orang.



PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya, Program ini memuat kegiatan, yaitu :

- 1) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan.
- 2) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Pedesaan.
- 3) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan.
- 4) Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- 5) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi.
- 6) Pembinaan Potensi dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- 7) Pembinaan dan Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Rentan.
- 8) Pembinaan dan Pembentukan KUBE dilokasi Binaan PKK Terpadu.
- 9) Pembinaan LKM dan KUBE Fakir Miskin.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan UEP Anak Jalanan.
- 2) Pembinaan dan Pemberian Bantuan Stimulan UEP Ortu Anjal.
- 3) Pertemuan Pemantapan dan Pemberian Bantuan Bagi Organisasi Lanjut Usia.
- 4) Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Cacat.
- 5) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi WTS.
- 6) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis.
- 7) Bimbingan Pencegahan HIV /Aids.
- 8) Pembinaan dan Penanganan Panti Asuhan/Jompo.
- 9) Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Cacat.
- 10) Rehab TMP Bukit Barisan Medan dan Penggantian Burung Garuda.
- 11) Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan bagi UPT.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bimbingan Pengembangan Desa Pelopor Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- 3) Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna.
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial Desa.
- 5) Pembinaan wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
- 6) Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha.
- 7) Pertemuan Forum Komunikasi PSM.
- 8) Karang Taruna Expo.
- 9) Penerbitan Majalah Getar.
- 10) Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.
- 11) Pembinaan dan Penyantunan Keluarga Veteran Yang tidak mampu.
- 12) Penilaian Pemberian Penghargaan bagi pihak yang berperan aktif menyelenggarakan Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat.

4. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, Program ini memuat kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling.

5. Program Perlindungan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana.
- 2) Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana.
- 3) Distribusi Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana).
- 4) Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- 5) Rapat Koordinasi TAGANA se Sumatera Utara.
- 6) Pemetaan Daerah Rawan Bencana.
- 7) Pembinaan Keserasian Sosial Daerah.
- 8) Pembinaan Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).
- 9) Bimbingan Pemantapan Pendamping dan Operator PKH.
- 10) Pembinaan dan Latihan Keterampilan Bagi Korban Tindak Kekerasan.
- 11) Pembinaan Pengusaha, Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang.
- 12) Sosialisasi Pelaksanaan UGB dan Pengumpulan Uang/Barang.
- 13) Sosialisasi Program Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
- 14) Bakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Regional Sumatera Tahun 2012.

6. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan dan Pembuatan LAKIP, Laporan Tahunan dan LKPJ.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- 5) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Sosialisasi Penanganan PMKS.
- 7) Sosialisasi PERPRES No.54 Tahun 2010.

4. Persentase Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan

Realisasi kinerja pada Indikator ini telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaian kinerja dimaksud adalah 100 %, sebagaimana tercantum pada **Tabel VII** di bawah ini.

TABEL 35
CAPAIAN INDIKATOR
PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN
DI BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, KETAHANAN PANGAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan :					
a Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan per tahun	15	%	15	%	100%
1. SL-PTT Padi Non Hibrida (Ha)	2620	Ha	2620	Ha	100%
2. SL-PTT Padi Hibrida (Ha)	437	Ha	437	Ha	100%
3. SL-PTT Padi Lahan Kering (Ha)	1310	Ha	1310	Ha	100%
4. SL-PTT Jagung (Ha)	1605	Ha	1605	Ha	100%
5. SL-PTT Kedelai (Ha)	80	Ha	80	Ha	100%
6. Subsidi Benih (Ton)	47	Ha	47	Ha	100%
b Persentase peningkatan Produksi Hortikultura	15	%	15	%	100%
1. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)	12	Ha	12	Ha	100%
2. Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (M2)	1736	M2	1736	M2	100%
3. Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (M2)	579	M2	579	M2	100%
c Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian					
1. Jumlah Irigasi Pada Lahan-Lahan Pertanian	18.532	km	18.532	km	100%
2. Pembangunan Jalan Usaha Tani dan lain-lain	16	Kab/ Kota	16	Kab/ Kota	100%
3. Luas Areal Pertanian Baru	626	Ha	626	Ha	100%
4. Jumlah Pengadaan Alat Mesin Pertanian	323	Unit	323	Unit	100%
5. Tingkat Penyaluran Pupuk	1.098	Ton	1.098	Ton	100%
6. Tingkat Penyaluran Pestisida	7.590	Ton	7.590	Ton	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan :					
d Persentase peningkatan Kemitraan dan Pemasaran Hasil Pertanian	20	%	20	%	100.00%
1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	226	Unit	226	Unit	100%
2. Jumlah Fasilitas Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri (Pameran)	17	Kali	17	Kali	100%
3. Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi (Lembaga)	7	Kali	7	Kali	100%
e Persentase peningkatan penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu di sektor perkebunan					#DIV/0!
1. Jumlah bantuan bibit unggul kepada petani per komoditas per hektar	4	paket	2	paket : ha	50.00%
-Bibit karet	30,000,000.	batang	15,000,000	batang	50.00%
2. Frekwensi peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi,	28	kali	28	kali	100.00%
diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang					
berwawasan lingkungan					
3. Luas arel peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang	414.4	Ha	212.0	kali	51.16%
berwawasan lingkungan					
Persentase Peningkatan Swasembada pangan :	100	%	1	%	1.00%
a Meningkatkan ketersediaan pangan beras secara berkelanjutan serta mempertahankan Swasembada Pangan	132.12				0.00%
1. Beras (Ton)	2,159,846	Ton	2,159,846	Ton	100%
2. Jagung (Ton)	1,055,063	Ton	1,055,063	Ton	100%
3. Kedele (Ton)	46,138	Ton	46,138	Ton	100%
4. Ubikayu (Ton)	676,253	Ton	676,253	Ton	100%
5. Kacang Tanah (Ton)	21,356	Ton	21,356	Ton	100%
6. Cabe Merah (Ton)	116,495	Ton	116,495	Ton	100%
7. Daging Sapi (Ton)	14,172	Ton	14,172	Ton	100%
8. Telur (Ton)	152,007	Ton	152,007	Ton	100%
9. Ikan (Ton)	534,554	Ton	534,554	Ton	100%
10. Minyak Goreng (Ton)	2,377,030	Ton	2,377,030	Ton	100%
11. Gula Pasir (Ton)	229,992	Ton	229,992	Ton	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
b Ketersediaan beras untuk dikonsumsi	2,159,846		2,159,846		100%
Jumlah Kelembagaan Pangan yang mendukung ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat di setiap Kab/Kota di Sumatera Utara					
- Lumbung Pangan	115	unit	115	unit	100%
Gapoktan	5	Kelompok	5	Kelompok	100%
	33	Kab/Kota	33	Kab/Kota	
d Surplus/ Penyangga per tahun (ton) (5-3)	363,893	Ton	363,893	Ton	100%
e Produksi GKG (Ton)	3,813,591	Ton	3,813,591	Ton	100%
f Luas Panen (Ha)	854,609	Ha	854,609	Ha	100%
g Produktivitas (Kw/ Ha)	44.62	Kw/Ha	44.62	Kw/Ha	100%
h Luas Tanam (Ha)	872,050	Ha	872,050	Ha	100%
d Persentase peningkatan Kemitraan dan Pemasaran Hasil Pertanian	20	%	20	%	100.00%
1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	226	Unit	226	Unit	100%
2. Jumlah Fasilitas Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri (Pameran)	17	Kali	17	Kali	100%
3. Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi (Lembaga)	7	Kali	7	Kali	100%
e Persentase peningkatan penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu di sektor perkebunan					#DIV/0!
1. Jumlah bantuan bibit unggul kepada petani per komoditas per hektar	4	paket	2	paket : ha	50.00%
-Bibit karet	30,000,00	batang	15,000,00	batang	50.00%
2. Frekwensi peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan	28	kali	28	kali	100.00%
3. Luas arel peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan	414.4	Ha	212.0	kali	51.16%
Persentase Peningkatan Swasembada pangan :	100	%	1	%	1.00%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
. Meningkatkan ketersediaan pangan beras secara berkelanjutan serta mempertahankan Swasembada Pangan	132.12				0.00%
1. Beras (Ton)	2,159,846	Ton	2,159,846	Ton	100%
2. Jagung (Ton)	1,055,063	Ton	1,055,063	Ton	100%
3. Kedele (Ton)	46,138	Ton	46,138	Ton	100%
4. Ubikayu (Ton)	676,253	Ton	676,253	Ton	100%
5. Kacang Tanah (Ton)	21,356	Ton	21,356	Ton	100%
6. Cabe Merah (Ton)	116,495	Ton	116,495	Ton	100%
7. Daging Sapi (Ton)	14,172	Ton	14,172	Ton	100%
8. Telur (Ton)	152,007	Ton	152,007	Ton	100%
9. Ikan (Ton)	534,554	Ton	534,554	Ton	100%
10. Minyak Goreng (Ton)	2,377,030	Ton	2,377,030	Ton	100%
11. Gula Pasir (Ton)	229,992	Ton	229,992	Ton	100%
b Ketersediaan beras untuk dikonsumsi	2,159,846		2,159,846		100%
. Jumlah Kelembagaan Pangan yang mendukung ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat di setiap Kab/Kota di Sumatera Utara					
- Lumbung Pangan	115	unit	115	unit	100%
- Gapoktan (Gapoktan)	5	Kelompok	5	Kelompok	100%
	33	Kab/Kota	33	Kab/Kota	
d Surplus/ Penyangga per tahun (ton) (5-3)	363,893	Ton	363,893	Ton	100%
. e Produksi GKG (Ton)	3,813,591	Ton	3,813,591	Ton	100%
. f. Luas Panen (Ha)	854,609	Ha	854,609	Ha	100%
. g Produktivitas (Kw/ Ha)	44.62	Kw/Ha	44.62	Kw/Ha	100%
. h Luas Tanam (Ha)	872,050	Ha	872,050	Ha	100%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dari target kinerja secara umum telah tercapai, maka dengan demikian capaian kinerja secara umum adalah 100 %. Sekalipun masih ada beberapa yang belum mencapai target yang diperjanjikan semula pada awal tahun 2012.

Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesejahteraan petani, antara lain : pendapatan, tingkat upah dan daya beli yang di ukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), serta terbukanya akses bagi setiap pelaku usaha pertanian terhadap sumber daya produktif pertanian (*modal, informasi, teknologi, lahan dan air*). Rumah tangga pertanian di Sumatera Utara berdasarkan sensus pertanian tahun 2003 sebanyak 1.262.421 rumah tangga dan anggota rumah tangga pertanian dari rumah tangga pertanian sebanyak 5.747.429 jiwa yang terdiri dari 2.923.376 laki-laki (50,86%) dan 2.824.053 perempuan (49,14%) sehingga rata-rata setiap rumah tangga pertanian mempunyai 4,55 anggota rumah tangga.



Product Domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. Perhitungan PDRB Sumatera Utara selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi dimana dasar perhitungan harga konstan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik s/d Triwulan III 2012, Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara dari sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar 22,01, sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan sektor pertanian ini sebesar 22,48.

Tabel 36
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011 dan Tahun 2012

No	Uraian	2011	2012*
	Nilai Tukar Petani Sektor Pertanian	103,42	101,71
1	NTP Pangan	99,52	100,29
2	NTP Hortikultura	111,98	108,70

Sumber : *Data BPS Prov. Sumut s/d Triwulan III Tahun 2012

Lahan sawah, terutama lahan sawah berpengairan merupakan lahan paling potensial dalam konteks pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan, khusus kaitannya dengan upaya peningkatan produksi pangan terutama

dalam rangka pelestarian swasembada beras dan percepatan produksi jagung serta kedele di Provinsi Sumatera Utara.

Bila dilihat kondisi lahan sawah berpengairan yang ada pada tahun 2011 terdapat kenaikan luas areal dibanding dengan potensi lahan sawah berpengairan pada akhir tahun 2010.

Pada tahun 2010 potensi lahan sawah berpengairan di Provinsi Sumatera Utara seluas 293.257 Ha, potensinya naik di tahun 2011 menjadi 295,965 Ha yang berarti bertambah seluas 2.708 Ha. Pada Lahan Sawah Tidak Berpengairan luasnya dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan.



PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**, Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Pelatihan Penguatan Kapasitas Bagi Petugas Pertanian Pendamping Kelompok Tani / Gapoktan Penerima Dana PUAP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Pelatihan Kemandirian Kelompok Tani / Gapoktan Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota Daerah Agropolitan.
 - 3) Pelatihan Kemandirian Kelompok Tani / Gapoktan Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota Daerah Agromarinepolitan.
 - 4) Pelatihan Pemecahan Masalah Usahatani Bagi Petugas Pertanian Terampil di Pulau Nias.
 - 5) Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Wanita Tani di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
 - 6) Kegiatan Operasional UPT. BLPLP.
 - 7) Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS.
 - 8) Pertemuan Pra Musrenbang dan Musrenbang Pertanian Provinsi Sumatera Utara TA. 2013.
 - 9) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) TA.2013 - 2017 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara TA. 2013.
 - 10) Pelatihan Aplikasi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 2013.
 - 11) Pemantapan Penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 2013 Menggunakan Aplikasi APBD.
 - 12) Pembinaan dan optimasi SAI dan SIMAK-BMN.

- 13) Sinkronisasi Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura.
- 14) Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 15) Rapat Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Semester I s/d II).
- 16) Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi.
- 17) Rapat Evaluasi Bulanan (1 s/d 12) MONEV.
- 18) Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian TA. 2011.
- 19) Publikasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian (Pelatihan Statistik dan Publikasi Data).
- 20) Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama Dengan BPS Provinsi Sumatera Utara.
- 21) Pelatihan Perhitungan Angka Ramalan Tanaman Pangan.
- 22) Pembinaan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 23) Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender.
- 24) Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian (ARAM, ASEM, ATAP).
- 25) Penyusunan SAKIP/LAKIP SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara TA. 2013.
- 26) Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik.
- 27) Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
- 28) Publikasi Pembangunan Pertanian Melalui Media Elektronik.
- 29) Pelatihan Audit Kinerja SKPD (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara).
- 30) Pembuatan Buku Panorama Provinsi Sumatera Utara dan Buku Potensi Pertanian di Sumatera Utara.
- 31) Publikasi Kegiatan PF2N Provinsi Sumatera Utara.
- 32) Pembinaan Organisasi dan Outbond Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
- 33) Pelaksanaan Ubinan dengan BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 34) Pariwara Agronomist.
- 35) Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian TA. 2013.
- 36) Konsultasi Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian.
- 37) Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern.
- 38) Pertemuan dan Dialog Mantri Tani dan Petani Sumatera Utara.

- 39) Publikasi dan Promosi Peningkatan Produksi Pertanian Sumatera Utara.
- 40) Monitoring dan Evaluasi Usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- 41) Rapat Koordinasi percepatan SP dengan Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten/Kota.
- 42) Pembuatan buku pola tanam dan tertib tanam.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pelatihan PL-II SLPTT Padi dan Jagung.
- 2) Pembinaan dan Bimbingan SL/LL PTT Padi dan Jagung.
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Melalui SL/LL-PTT Padi Non Hibrida (1 klp = 25 Ha).
- 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Melalui SL/LL-PTT Jagung Hibrida (1 klp = 15 Ha).
- 5) Pengembangan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 6) Pengembangan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Asahan.
- 7) Pengembangan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Pengembangan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Jagung di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 9) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kedelai Untuk Mendukung Gema Pangan.
- 10) Pengembangan Kacang Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara, Tobasamosir, Samosir dan Humbang Hasundutan Untuk Mendukung Gema Pangan.
- 11) Analisis dan Evaluasi Lahan untuk Program Ekstensifikasi Jagung dalam Rangka Meningkatkan Produksi Jagung di Sumatera Utara.
- 12) Analisis Kebutuhan Pupuk Organik untuk Memenuhi Kebutuhan Pupuk dalam Pengembangan Tanaman Pangan Padi di Sumatera Utara.
- 13) Dukungan Peralatan Pertanian bagi Penangkar Benih Padi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 14) Penguatan Kelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Benih SLPTT Padi Non Hibrida.
- 15) Penguatan Kelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Benih SLPTT Jagung Hibrida.

- 16) Pengadaan Benih Padi dan Palawija Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Sumatera Utara.
- 17) Pertemuan Teknis BBI/BBU se Sumatera Utara.
- 18) Pembinaan Penangkar Benih Tanaman.
- 19) Koordinasi Teknis Perbenihan Tanaman Pangan.
- 20) Pengembangan Teknologi Jagung dengan Pendekatan PTT.
- 21) Pengembangan Teknologi Kedelai dengan Pendekatan PTT.
- 22) Perbanyak dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa.
- 23) Operasional UPT. BBI Murni Tanjung Morawa.
- 24) Peningkatan Penangkar Padi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa.
- 25) Uji Adaptasi Pengembangan Padi Varietas Unggul Baru di Sumatera Utara.
- 26) Pengadaan alat mesin pertanian di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa.
- 27) Peningkatan Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Palawija 15 Ha di UPT BBI Tj. Selamat.
- 28) Pembinaan Penangkar Benih Kabupaten/Kota.
- 29) Operasional UPT.BBI. Tj. Selamat.
- 30) Perbanyak Benih Padi Sawah (FS-SS) 5 Ha di UPT BBI Gabehutaraja.
- 31) Perbanyak Benih Kacang Tanah (FS-SS) di UPT BBI Gabehutaraja.
- 32) Pengembangan dan Perbanyak Benih Kentang (G3-G4) di UPT. BBI. Gabehutaraja.
- 33) Operasional BBI Gabe Hutaraja.
- 34) Perbanyak Benih Jagung (BS-FS) 2 Ha di UPT BBI Gabehutaraja.
- 35) Perbanyak Benih Jagung (FS-SS) di UPT BBI Gabehutaraja.
- 36) Pengembangan Benih/Bibit Hortikultura di UPT BBI Gedung Johor.
- 37) Operasional UPT BBI Gedung Johor.
- 38) Operasional UPT BBI Arse Sipirok.
- 39) Pengembangan dan perbanyak benih/bibit hortikultura di UPT. BBI. Arse Sipirok.
- 40) Peningkatan SDM Calon Petani/Klompok Tani Penangkar Benih Hortikultura di UPT. BBI. Arse Sipirok.
- 41) Operasional UPT BBI Kutagadung.
- 42) Perbanyak Planlet Kentang G0.
- 43) Perbanyak Benih Kentang G0 - G1.
- 44) Perbanyak Benih Kentang G2 - G3 di UPT. BBI. Kutagadung.
- 45) Perbanyak Benih Kentang G2 - G3 di Unit Simarjarunjung.
- 46) Penanaman Rotasi di UPT. BBI. Kutagadung.
- 47) Operasional UPT. BPTPH-I Medan.
- 48) Penerapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) pada Tanaman Pangan.

- 49) Penerapan Sekolah Lapang Iklim (SLI).
- 50) Pembinaan Peningkatan Operasional UPT BTPH dan Laboratorium PHP Medan Johor, Tj. Morawa, P. Kerasaan dan Padang Balangka.
- 51) Peningkatan Sarana Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Peningkatan Operasional Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Medan.
- 53) Peningkatan Operasional Kendaraan roda-2 Petugas POPT UPT. BTPH Sumatera Utara.
- 54) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan.
- 55) Pengadaan Sarana Kerja Petugas POPT-PHP.
- 56) Surveillance Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Pangan di wilayah Lab. PHP.
- 57) Penerapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) pada Tanaman Hortikultura.
- 58) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura.
- 59) Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 Wilayah Kerja.
- 60) Pembinaan dan Pengujian Mutu Alsintan.
- 61) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI.
- 62) Operasional UPT. BPSB IV Medan.
- 63) Pengembangan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan UPT. BPSB IV.
- 64) Pengembangan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura UPT. BPSB IV.
- 65) Uji Kesehatan Mutu Benih UPT BPSB IV.
- 66) Pengujian Analisa Mutu Benih UPT BPSB IV.
- 67) Kongres Nasional Sumber Daya Genetik.
- 68) Pengembangan Benih/Bibit Tanaman Hias di Persiapan Pengembangan UPT BBI Tanaman Hias Asam Kumbang.
- 69) Identifikasi Tanaman Hias ke Kabupaten/Kota.
- 70) Pembinaan dan Pelatihan Petani Penangkar Tanaman Hias di Persiapan Pengembangan UPT BBI Tanaman Hias Asam Kumbang.
- 71) Operasional di Persiapan Pengembangan UPT BBI Tanaman Hias Asam Kumbang.
- 72) Peningkatan SDM Petugas di Persiapan Pengembangan UPT. BBI Tanaman Hias Asam Kumbang.
- 73) Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian.
- 74) Pembinaan dan Pendampingan Sentra Mekanisasi.

- 75) Sosialisasi Pengujian Mutu Alsintan.
- 76) Pemantauan Peredaran, Penggunaan Alsintan.
- 77) Operasional UPT. Perbengkelan dan Pelatihan Alsintan Distan Provsu.
- 78) Work Shop Petugas dan Kontak Bengkel ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- 79) Inventarisasi dan Evaluasi Pengembangan Kontak Bengkel.
- 80) Pelatihan Kontak Bengkel.
- 81) Pelatihan Petani Pengguna Alsin.
- 82) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Asahan.
- 83) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 84) Peningkatan Kualitas Packing Kacang Sihobuk di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 85) Analisis Pengembangan Komoditi Salak Provinsi Sumatera Utara.
- 86) Pengadaan Alat Mesin Pertanian Power Thresher di Kabupaten Batu Bara.
- 87) Pengadaan Alat Mesin Pertanian Power Thresher di Kabupaten Nias Selatan.
- 88) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Simalungun.
- 89) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 90) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Langkat.
- 91) Analisis Pengembangan Komoditi Pisang Barangan Provinsi Sumatera Utara.
- 92) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 93) Pengadaan Alat Corn Sheller di Kabupaten Padang Lawas.
- 94) Pengembangan Packaging dan Grading House.
- 95) Perlombaan P3A Tingkat Propinsi Sumatera Utara.
- 96) Pengkajian Iklim dan Updating Data Curah Hujan.
- 97) Dukungan Kegiatan WISMP.
- 98) Penyusunan SID untuk Cetak Sawah Baru di Sumatera Utara.
- 99) Analisis Pemasaran Komoditi Jeruk Provinsi Sumatera Utara.
- 100) Analisis Pemasaran Komoditi Manggis Provinsi Sumatera Utara.
- 101) Pengembangan System Of Rice Intensification serta Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 102) Pengembangan System Of Rice Intensification serta Bantuan Peralatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 103) Pengembangan System Of Rice Intensification serta Bantuan Peralatan di Kabupaten Batu Bara.
- 104) Rapat Koordinasi Alat dan Mesin Pertanian.
- 105) Monitoring Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian di Sumatera Utara.

- 106) Pengadaan Alat Mesin Pertanian kepada Petani dalam Mendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Taxi Pump.
- 107) Pertemuan dengan Stake Holder Pupuk dan Pestisida.
- 108) Monitoring Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Sumatera Utara.
- 109) Penayangan Feature Radio Tentang Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
- 110) Penyediaan Bahan Bacaan Majalah Sinar Tani.
- 111) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Murni Tanjung Morawa.
- 112) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Kuta Gadung.
- 113) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Tanjung Selamat.
- 114) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Arse Sipirok.
- 115) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 116) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BBI. Gedung Johor.
- 117) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BLPLP.
- 118) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. Perbengkelan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian.
- 119) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BTPH.
- 120) Sosialisasi Pengembangan Potensi Pertanian UPT. BPSB.
- 121) Pengadaan Sarana Prasarana Komoditi Sayuran Dataran Rendah Provinsi Sumatera Utara.
- 122) Pengadaan Alat Prossessing Benih Tanaman Pangan di Kabupaten Langkat.
- 123) Pengadaan Alat Prossessing Benih di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 124) Pengadaan Alsintan untuk Serikat Petani Indonesia.
- 125) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Multi Guna ke Kabupaten Mandailing Natal.
- 126) Pengembangan Jalan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 127) Pengembangan Jalan Pertanian di Kabupaten Mandailing Natal.
- 128) Kajian Tingkat Produktivitas Padi Sawah pada Lahan Gambut di Pantai Timur Sumatera Utara.
- 129) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 130) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 131) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Mandailing Natal.
- 132) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kota Padangsidempuan.

- 133) Pengadaan Alat Perangkat Uji Tanah dan Pupuk.
- 134) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Hand Traktor untuk Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 135) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Cultivator untuk Kota Padangsidimpuan.
- 136) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Cultivator untuk Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 137) Peningkatan Jalan Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 138) Peningkatan Jalan Pertanian Kota Binjai.
- 139) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 140) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Langkat.
- 141) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kota Binjai.
- 142) Studi Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
- 143) Peningkatan Jalan Pertanian di Kabupaten Mandailing Natal.
- 144) Peningkatan Jalan Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu.
- 145) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Labuhanbatu.
- 146) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 147) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Langkat.
- 148) Bantuan Langsung Pupuk (BLP) ke Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- 149) Paket Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 150) Peningkatan Jalan Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 151) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 152) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 153) Pengadaan Alsintan Traktor Roda 4 ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 154) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 155) Pembuatan Selasar Penghubung Kantor UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 156) Pembangunan Aula UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 157) Pengadaan Sarana Prasarana Aula UPT. BBI. Gabe Hutaraja.

- 158) Rehabilitasi Screen House dan Rumah Bedeng UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 159) Pembangunan Mess UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 160) Pembangunan Saluran Drainase UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 161) Perbaikan Lantai Jemur Gabe I di UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 162) Perbaikan Lantai Jemur Gabe II di UPT. BBI. Gabe Hutaraja.
- 163) Pembangunan Jalan Pertanian Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir.
- 164) Pembangunan Jalan Pertanian Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah.
- 165) Pembangunan Jalan Pertanian Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah.
- 166) Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) (Bangunan Pelengkap) Dusun Selat Cina Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir.
- 167) Pembuatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) (Bangunan Pelengkap) Desa Sibaragot Kecamatan Bilah Barat.
- 168) Pembuatan Rumah Kompos dan Kelengkapannya Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah.
- 169) Pembangunan Jalan Pertanian Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat.
- 170) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kota Padangsidimpuan.
- 171) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Padang Lawas.
- 172) Pengembangan Jalan Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.
- 173) Pengembangan Jalan Pertanian Kabupaten Langkat.
- 174) Pengembangan Jalan Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 175) Pengembangan Jalan Pertanian Kota Padangsidimpuan.
- 176) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 177) Pompanisasi di kabupaten Serdang Bedagai.
- 178) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Mandailing Natal.
- 179) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 180) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Padang Lawas.
- 181) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 182) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Langkat.
- 183) Paket Teknologi Berimbang ke Kabupaten Serdang Bedagai.
- 184) Pengembangan Jalan Pertanian Kabupaten Simalungun.
- 185) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Simalungun.
- 186) Pengadaan Alsintan Hand Traktor ke Kabupaten Simalungun.

- 187) Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pengujian Mutu dan Pestisida BPTPH-I Medan.
- 188) Pengembangan Komoditi Jagung Hibrida di Kabupaten Dairi.
- 189) Pengembangan Komoditi Jagung Hibrida di Kota Pematangsiantar.
- 190) Pengembangan Komoditi Jagung Hibrida di Kabupaten Samosir.
- 191) Pengembangan Komoditi Jagung Hibrida di Kabupaten Tobasamosir.
- 192) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 193) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Mandailing Natal.
- 194) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 195) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Langkat.
- 196) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 197) Pembuatan Sistem Informasi Barang Inventaris Dinas Pertanian Provsu.
- 198) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- 199) Pengembangan Jalan Pertanian Desa Sei Beras Kata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- 200) Pengembangan Rumah Kompos dan Peralatan di Kota Medan.
- 201) Pengadaan Sarana Alat dan Mesin Pertanian di Desa Sei Buluh Kecamatan Bamban kabupaten Serdang Bedagai.
- 202) Pengembangan Jalan Pertanian Desa Pertanian Desa Lumban ratus Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
- 203) Pengembangan dan peningkatan produksi padi Kabupaten Asahan.
- 204) Pengembangan dan peningkatan produksi Jagung Kabupaten Serdang Bedagai.
- 205) Pengadaan benih/bibit penguatan kelembagaan BLBU padi Non Hibrida.
- 206) Pengadaan benih/bibit penguatan kelembagaan BLBU Jagung Hibrida.
- 207) Fasilitasi Bibit Buah-buahan unggul untuk petani.
- 208) Operasional Laboratorium kultur jaringan.
- 209) Pelaksanaan SID JIDES/JITUT Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 210) Pelaksanaan SID JIDES/JITUT Kabupaten Serdang Bedagai.
- 211) Pelaksanaan SID JIDES/JITUT Kabupaten Deli Serdang.
- 212) Pelaksanaan SID JIDES/JITUT Kabupaten Langkat.
- 213) Pengadaan Hand Traktor di Kabupaten Karo.

- 214) Pengadaan Hand Traktor di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 215) Fasilitas Pupuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 216) Pengembangan JIDES di Kabupaten Dairi.
- 217) Pengadaan Pupuk Cair Organik dan Pupuk Organik Padat.
- 218) Pengembangan dan pengawasan Alsintan di Sumatera Utara.
- 219) Pengadaan Patisida.
- 220) Pengadaan Tanaman Koleksi Tanaman Jambu Air di UPT. BI. Hortikultura Arse Sipirok.
- 221) Pembinaan Penangkar Benih.
- 222) Gelar Teknologi Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.
- 223) Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 224) Rehabilitasi JIDES di Desa Hutaraja Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 225) Rehabilitasi JIDES di Desa Pasaribu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 226) Rehabilitasi JIDES di Desa Peatungkup Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 227) Rehabilitasi JIDES di Desa Gadong Gala Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 228) Rehabilitasi JIDES di Desa Sidolgi Kabupaten Tapanuli Utara.
- 229) Bintel Aplikasi Geographic Information System (GIS).
- 230) Bintel Sistem Informasi Barang Inventaris Dinas Pertanian dan UPT

3. Program Pengembangan Agribisnis, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Pemasaran Dalam Negeri.
- 2) Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian.
- 3) Penata Pelayanan Pasar dan Kelembagaan Agribisnis.
- 4) Monitoring dan Pengawasan Kebijakan Perberasan.
- 5) Pengembangan Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian.
- 6) Mengikuti Pekan Pasar Tani.
- 7) Pemberdayaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
- 8) Pengembangan SILO Jagung di Tobasamosir.
- 9) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
- 10) Pameran PF2N di Sumatera Utara.
- 11) Pertemuan Investasi Hortikultura.

- 12) Pembinaan Gapoktan Ekspor Hortikultura di Kawasan Sentra Produksi.
- 13) Pengembangan dan Koordinasi Perpadu dalam Peningkatan Kualitas Beras.
- 14) Pemantapan dan Pemeliharaan Perluasan Areal Durian di Kabupaten.
- 15) Pengembangan Agribisnis Salak di Kabupaten Deli Serdang.
- 16) Pengembangan Agribisnis Sayuran Organik dengan Penerapan GAP/SOP Sayuran di Kota Binjai.
- 17) Pengembangan Agribisnis Sayuran Organik dengan Penerapan GAP/SOP Sayuran di Kota Medan.
- 18) Pengembangan Komoditas Ekspor Jagung Manis di Kabupaten Langkat, Simalungun.
- 19) Pengembangan Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Samosir dan Dairi.
- 20) Pengembangan Agribisnis Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kab Deli Serdang.
- 21) SL Penerapan GAP/SOP Sayuran.
- 22) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pola Tanam dan Pola Produksi Sayuran.
- 23) Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara.
- 24) Pembinaan Desa Mandiri T.P. PKK Provinsi Sumatera Utara.
- 25) Sosialisasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
- 26) Peningkatan Produksi Hortikultura Melalui Penyediaan Bantuan Benih/Bibit Hortikultura Sayuran dan Tanaman Hias.
- 27) Penumbuhkembangan Penangkar Benih Tanaman Hias dengan Penerapan Teknologi Spesifik.
- 28) Fasilitasi Benih/Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara.
- 29) Penumbuhan Penangkar ubi kayu di Lokalita Agropolitan.
- 30) Pengadaan Benih Jagung di Lokalita Agropolitan.
- 31) Pengembangan Teknologi Pemupukan Ubi Kayu di Lokalita Agropolitan.
- 32) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Jagung di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Kabupaten Simalungun.
- 33) Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan melalui Pengembangan Penangkar Benih Ubi Jalar di Desa Panji Dabutar Kabupaten Dairi.
- 34) Pengembangan Penangkar Bibit Jagung di Kawasan Agropolitan.
- 35) Teknologi Pengembangan Ubi Jalar, Ubi Kayu dan Jagung di Kawasan Agromarinepolitan.

- 36) Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan melalui Pengembangan Penangkar Benih Kentang di Desa Saribu Dolok Kabupaten Simalungun.
- 37) Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan di Kabupaten Batubara dengan tanaman cabe merah.
- 38) Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan komoditi durian.
- 39) Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan di Kabupaten Mandailing Natal dengan komoditi Manggis.
- 40) Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan di Kabupaten Deli Serdang dengan komoditi duku.
- 41) Peningkatan mutu cabe merah melalui penerapan GAP/SOP di Langkat.
- 42) Fasilitasi Benih/Bibit Tanaman Sayuran.
- 43) Pengembangan pananganan pengolahan hasil untuk kelompok home industri.
- 44) Pengembangan tanaman buah pekarangan.
- 45) Kegiatan Karnaval HUT Provinsi Sumatera Utara.
- 46) Pengembangan Agribisnis Jeruk Maga di Kabupaten Mandailing Natal.
- 47) Pengembangan Agribisnis Manggis.
- 48) Pengembangan Agribisnis Buah Naga.
- 49) Cetak buku tanaman Pekarangan Dinas Provinsi.
- 50) Peningkatan Tehnologi Pengelola PPK ke Jawa Barat.

KETAHANAN PANGAN

Secara umum, situasi ketahanan pangan Sumatera Utara tahun 2011 -2012 cenderung semakin membaik dan kondusif. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik ditunjukkan oleh beberapa indikator/pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan cadangan pangan di Sumatera Utara Tahun 2011 – 2012
Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana,

pengendalian harga beras konsumen. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Pengisian lumbung pangan rata – rata 20 – 30 ton gabah kering giling per unit lumbung. Pembangunan fisik lumbung bervariasi, dari sharing APBD Pemerintah Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan : (1) tersedia cadangan pangan daerah dan terpenuhinya cadangan pangan bagi petani/anggota kelompok, (2) terjadinya akumulasi modal usaha kelompok sebagai pendorong ekonomi perdesaan yang berorientasi kemitraan usaha antar kelompok dan mitra usaha lainnya dan (3) terjadi perubahan perilaku anggota kelompok/petani yang selama ini langsung menjual hasil panennya ke pedagang, menjadi budaya menyimpan atau menunggu menjual padinya pada saat harga gabah naik. Pengembangan cadangan pangan pemerintah yang telah dilaksanakan tahun 2011 – 2012 seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 37

Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2011 – 2012

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Total
1	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	22 Unit	31 Unit	53 Unit
2	Cadangan Pangan Pemerintah	1	98,5 ton beras	98,5 ton beras

- 2) Beberapa produksi komoditas penting mengalami pertumbuhan positif, Produksi beras mengalami kenaikan dari 2.052.613 ton tahun 2011 meningkat menjadi 2.098.760 ton pada tahun 2012 (ARAM II), begitu juga produksi jagung, kacang tanah. Dilihat dari ketersediaan bahan pangan , ketersediaan komoditi pangan yang surplus selama tahun 2011 – 2012 adalah beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah,telur, ikan, dan gula pasir. (data terlampir).
- 3) Progres/perkembangan Swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2010 – 2012 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil Perimbangan swasembada beras tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada

Beras (SSB) 113,22 % yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 13,22 % per kapita. Ketersediaan beras sebesar 154,94 Kg/Kapita/Tahun (hanya berasal dari produksi lokal), bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 136,85 Kg/Kapita/Tahun , hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perdagangan/pengiriman keluar daerah maka Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Sementara Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. Konsumsi beras penduduk Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar 134,80 Kg/kap/tahun. (data perkembangan Swasembada pangan beras di Sumatera Utara Tahun 2011 s.d Tahun 2012 tertera pada tabel berikut).

Tabel 38
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
di Sumatera Utara Tahun 2011 – 2012

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012 (ARAM II)
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	13.103.596	13.545.566
2	Kebutuhan Beras (ton)	1.793.227	1.853.711
3	Produksi Beras (ton)	2.052.613	2.098.760
4	Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	259.386	245.049
5	% SSB	114,46	113,22

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

- 4) Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Kejadian kerawanan pangan kronis disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat menangani permasalahan kekurangan pangan yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Penanganan daerah rawan pangan yang dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu;

- a. Kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan transien (pasca bencana), sasaran lokasi yang mengalami musibah bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Samosir, pada tahun 2012.
- b. Penguatan modal usaha kelompok (PMUK) pada daerah rawan pangan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan/miskin melalui Program Aksi Gema Pangan (Gema Pangan) di 150 desa/kelurahan di 33 kabupaten/kota.
- c. Melakukan koordinasi, pemantauan dan analisis setiap bulannya untuk mengetahui situasi pangan dan gizi secara dini yang nantinya digunakan untuk intervensi serta pengambilan kebijakan dan perumusan program ketahanan pangan.
- d. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan untuk mengetahui lokasi dan faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan serta intervensi hasil penyusunan melalui pemberian bantuan dan Penguatan Usaha Kelompok (PMUK) untuk kategori rawan dan agak rawan pangan.
- e. Pengembangan Ketersediaan dan penanganan rawan pangan melalui program aksi Desa Mandiri Pangan di desa/kelurahan miskin

Tabel 39

Penangan Daerah Rawan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2011 – 2012

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012 (ARAM II)
1	Penanggulangan daerah rawan pangan transien	3 Desa/Kelurahan	16 Kecamatan
2	Proram Aksi Gema Pangan	-	163 Desa
3	Program aksi Desa Mandiri Pangan	18 Desa	15 Desa
4	Intervensi hasil penyusunan peta kerawanan pangan	3 Desa	-

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

- 5) Produksi gabah kering giling di Sumatera Utara tahun 2012 (ARAM II) sebesar 3.688.507 ton setara dengan 2.098.760 ton beras.

6) Selain keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan pokok beras, Sumatera Utara juga berhasil dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Pada saat harga pangan pokok strategis di pasar tidak stabil dan berfluktuasi akibat menurunnya produksi pangan strategis dunia, harga pangan di pasar dalam negeri juga berpengaruh, namun demikian harga pangan khususnya beras masih lebih stabil (Grafik. 1)

Stabilitas harga pangan pokok strategis tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang cukup baik dalam merespon adanya krisis ekonomi, krisis bahan bakar minyak dan pangan yang terjadi secara global. Respon pemerintah tersebut diantaranya :

- a. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pembelian gabah dan beras.
- b. Kebijakan pengadaan cadangan pangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Perum Bulog.
- c. Kebijakan pembelian gabah/beras saat panen raya melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) dan Lembaga Usaha.
- d. Ekonomi pedesaan (LUEP) stabilitas harga pangan pokok strategis khususnya beras dan jagung juga terwujud karena adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas.

7) Berdasarkan hasil survey ekonomi nasional (Susenas), konsumsi energi penduduk Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 1997,2 Kkal/Kap/Hari naik 0,16% dari tahun 2011 (1.994 kkal/kap/hari) dan konsumsi protein tahun 2012 sebesar 62,8 gr/kap/hari naik 9,03 % dari tahun 2011 (57,6 gr/kap/hari). Skor PPH mengalami peningkatan dari tahun 2011 (76,3) menjadi 80,44 di tahun 2012.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, khususnya penguatan cadangan pangan dan mewujudkan stabilitas harga bahan pangan di daerah, sejak tahun 2009 – 2011 telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang tersebar di 14 kabupaten sentra produksi padi melalui pemberian bantuan pada Gapoktan yaitu pada tahun – I mendapat Rp. 150 Juta yang dimanfaatkan untuk pembangunan gudang, pengadaan cadangan pangan dan pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran, dengan demikian hingga akhir tahun 2011 telah dilaksanakan pengembangan

untuk 64 Gudang Gapoktan dan penyediaan cadangan pangan masyarakat bagi anggota masing-masing gapoktan. Selain itu telah dilaksanakan pembangunan fisik lumbung, pembangunan lantai jemur dan pengisian lumbung sebanyak 115 lumbung sejak tahun 2007 – 2011 yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Untuk tahun berikutnya masih terus dilanjutkan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dimana merupakan indikator standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Utara.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan produksi bahan pangan pokok strategis yang berbasis sumber daya yang ada antara lain dengan melaksanakan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui pendekatan jangka pendek seperti membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk penyediaan lapangan kerja dan pendapatan. Kegiatan usaha pertanian yang dikembangkan berupa usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya setempat lainnya secara optimal yang ditunjang dengan peningkatan jumlah kualitas infrastruktur atau fasilitas penunjang. Rekomendasi kegiatan nyatanya berupa :

- 1) Pengembangan CPPD akan dimulai dengan proyek percontohan di wilayah kabupaten
- 2) Kebijakan yang mengikat untuk menggunakan pangan lokal non terigu dan non beras yang dimulai dengan komitmen pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengkonsumsi makanan lokal tersebut dalam setiap acara rapat/pertemuan yang diselenggarakan, sehingga akan menjadi teladan kepada masyarakat sekaligus membantu menghidupkan usaha ekonomi produktif masyarakat yang menghasilkan makanan lokal non terigu dan non beras.
- 3) Meningkatkan ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat non beras, antara lain (ubi kayu, ubi jalar, pisang) dan meningkatkan protein pangan hewani (telur, susu, ikan, dan daging).
- 4) Pengembangan teknologi pengolahan pasca panen untuk menghasilkan pangan yang aman, sehat, bergizi, serta halal berbasis sumber daya lokal.
- 5) Pengembangan gerai/outlet penjualan pangan berbahan baku lokal non beras dan non terigu di perkotaan dan pedesaan dengan penampilan yang modis, higienis, dan harga yang kompetitif namun tetap terjangkau masyarakat luas.

Pendekatan jangka menengah dan panjang : memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendekatan

pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa kegiatan nyata yang direkomendasikan adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat non beras, antara lain (ubi kayu, ubi jalar, pisang) dan meningkatkan protein pangan hewani (telur, susu, ikan, dan daging).
- 2) Pengembangan teknologi pengolahan pasca panen untuk menghasilkan pangan yang aman, sehat, bergizi, serta halal berbasis sumber daya lokal.
- 3) Sosialisasi P2KP/3B kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah/swasta/lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial dan lain-lain.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pengembangan teknologi pangan kearifan lokal dengan (1) memberikan bantuan mesin pengolahan ubi kayu menjadi tepung MOCAF (*Modified Cassava Flour*) sebagai substitusi tepung terigu. Pada saat ini telah berproduksi \pm 1 ton/bulan; (2) memberikan bantuan mesin pengolahan ikan pora – pora menjadi makanan siap saji beserta kemasannya; (3) memberikan bantuan PMUK pembinaan cluster ubi jalar serta kemasannya. Selain itu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan pemberdayaan kelompok optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi masyarakat dengan memberikan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok.

Dalam rangka menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi umbi – umbian di Sumatera Utara, Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara mengangkat kembali kearifan lokal “Manggadong” yakni pola makan menikmati umbi – umbian sebelum mengonsumsi nasi sehingga konsumsi nasi menjadi berkurang. Manggadong merupakan tradisi mengonsumsi umbi – umbian sebagai makanan pembuka yang menjadi kebiasaan luhur dan telah diterapkan sejak dahulu di daerah Tapanuli. Pola konsumsi nasi secukupnya dengan dibarengi lauk pauk yang beragam, kita tidak perlu mengkhawatirkan asupan gizi, karena takaran gizi dari umbi – umbian juga mampu menggantikan zat yang dibutuhkan tubuh dari nasi.

Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang antara masing – masing kelompok bahan pangan ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH yakni sebesar 95% pada tahun 2015 telah dilaksanakan upaya – upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengkonsumsi pangan ke arah yang semakin beragam, bergizi, berimbang berbasis sumber daya lokal melalui sosialisasi, promosi pendampingan serta pelatihan.

Pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar adalah salah satu tupoksi Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan SK Gubernur Nomor : 521.23/3260/K/Tahun 2004 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Instansi yang berwenang dalam Penanganan Keamanan Pangan Buah dan Sayuran Segar di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan siap saji adalah Dinas kesehatan dan Pangan Olahan adalah Balai POM.

Untuk meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, maka Badan Ketahanan Pangan telah melakukan pengujian terhadap 96 sampel buah dan sayuran dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara, baik pangan segar di pasaran maupun di lokasi (sentra) produksi. Dari hasil pengawasan ditemukan beberapa komoditi yang terdeteksi mengandung residu pestisida dan bahkan telah melampaui Batas Maximum Residu, untuk ini Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan menyurati instansi teknis kabupaten/kota agar melaksanakan pembinaan khususnya penggunaan pestisida.

Disamping itu juga Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar telah melaksanakan sertifikasi terhadap sayuran dan beberapa komoditi lainnya dalam proses sertifikasi, yang artinya memberikan kenyamanan pada masyarakat/konsumen dalam mengkonsumsi pangan segar hasil pertanian.



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengawasan, Peredaran Mutu Buah dan Sayuran Segar serta uji Laboratorium Residu Pestisida.
- 2) Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar.
- 3) Fasilitasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Pekan Raya Jakarta, Penang Fair, Teknologi Tepat Guna, Sumut Expo Tahun 2012, Agro Expo Tahun 2012, Pekan Budaya Nasional, Agro dan Good Expo 2012, Sriwijaya Expo 2012, Sumatera Expo dan Gelar Potensi Investasi.
- 4) Sosialisasi Konsumsi Pangan 3B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) bagi TP PKK Provinsi dan Darma Wanita Persatuan tingkat Provinsi.
- 5) Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Penyusunan Menu 3B dalam rangka HPS Tingkat Nasional.
- 6) Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- 8) Pembinaan Daerah Rawan Pangan Transien dan Kronis.
- 9) Penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) tingkat kecamatan.
- 10) Pertemuan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- 11) Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Utara.
- 12) Pembinaan dan Penanggulangan Gizi Buruk di Daerah Rawan Pangan.
- 13) Pengawasan Penangan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan PIRT.
- 14) Penangan Mutu dan Keamanan Pangan Oleh Kabupaten.
- 15) Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
- 16) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi mutu dan Keamanan Pangan.
- 17) Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan/LM3.
- 18) Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Cadangan Pangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
- 19) Analisis kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Padi Sawah dalam rangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 20) Penyusunan dan Pelatihan Neraca Bahan Makanan Tahun 2012.

- 21) Pengembangan Kemitraan Agribisnis Pangan di Kawasan Sentra Produksi Palawija/Hortikultura Berbasis komunitas Petani/klmpk Petani dan Swasta di 4 Kabupaten/Kota.
- 22) Pendampingan Petugas Gema Pangan di 33 Kabupaten/Kota.
- 23) Identifikasi dan Verifikasi Pelaksanaan Program Aksi Gema Pangan.
- 24) Fasilitasi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- 25) Fasilitasi Koordinasi Forum SKPD Bidang Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.
- 26) Pertemuan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) dalam rangka monitoring Ketahanan Pangan Sumatera Utara.
- 27) Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2012.
- 28) Fasilitasi Koordinasi dan Penggerakan Gema Pangan dan Swasembada Pangan.
- 29) Penyusunan Statistik Keahanan Pangan.
- 30) Fasilitasi Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Mendukung Pemantapan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara.
- 31) Evaluasi Ketahanan Pangan Tahun 2011 dan Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2012 Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- 32) Penyebarluasan Informasi Ketahanan Pangan Melalui Media Cetak, Elektronik, Website, Radio.
- 33) Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal.
- 34) Pengembangan Pangan Lokal Pembuatan Kerupuk Ikan pada kelompok Nelayan Wanita di Wilayah Agromarinepolitan.
- 35) Akselerasi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Pola Manggadong Se-Sumatera Utara.
- 36) Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Perbaikan Gizi Keluarga Lokasi Masyarakat Sekitar Perkebunan Tidak Produktif.
- 37) Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi.
- 38) Pengembangan Agribisnis dan Promosi Mocaf Mendukung Diversifikasi Pangan.
- 39) Survey Pola Pangan Harapan Tahun 2012 di Sumatera Utara.
- 40) Penyusunan Road Map Pengembangan Pangan Lokal Non Beras di Sumatera Utara.
- 41) Kajian Gizi dan Mutu Makanan Jajanan Anak Sekolah di Sumatera Utara.
- 42) Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Perbaikan Gizi di Lahan Marginal Mendukung Program Percetakan Sawah di Sumatera Utara.
- 43) Workshop Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan bagi Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

- 44) Apresiasi dan Pelatihan Survey Pemantauan Kerawanan Pangan bagi Petugas Kabupaten/Kota.
- 45) Penyusunan Rencana Kerja Ketahanan Pangan Tahun 2013.
- 46) Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan.
- 47) Survey Pemantauan Masyarakat yang Mengalami Defisit Angka Kecukupan Energi (AKE) Tahun 2012.
- 48) Fasilitasi Koordinasi Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.
- 49) Penyusunan Grand Design Ketahanan Pangan Berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Periode 2011 – 2025.
- 50) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Medan.
- 51) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Binjai.
- 52) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Deli Serdang.
- 53) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Langkat.
- 54) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 55) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Tebing Tinggi.

- 56) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Karo.
- 57) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Batu Bara.
- 58) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Simalungun.
- 59) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Pematangsiantar.
- 60) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Asahan.
- 61) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Tanjungbalai.
- 62) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Dairi
- 63) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- 64) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Labuhanbatu.
- 65) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 66) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 67) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 68) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Samosir.
- 69) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Tobasamosir.
- 70) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 71) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

- 72) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Padang Lawas.
- 73) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Sibolga.
- 74) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 75) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 76) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Padangsidimpuan.
- 77) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Mandailing Natal.
- 78) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kota Gunungsitoli.
- 79) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Nias.

- 80) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Nias Selatan.
- 81) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Nias Barat.
- 82) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM, PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan, Akses Pangan dan Kios PANGKIN) di Kabupaten Nias Utara.
- 83) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Batu Bara.
- 84) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Asahan.
- 85) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas.
- 86) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Langkat.
- 87) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 88) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
- 89) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 90) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Simalungun
- 91) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Karo.
- 92) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Dairi.
- 93) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Langkat.
- 94) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Serdang Bedagai.
- 95) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Simalungun.
- 96) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Tobasamosir.

- 97) Stabilitas Harga Jagung melalui DPM - LUEP Kabupaten Deli Serdang.
- 98) Pembinaan dan Penilaian, Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
- 99) Tingkat Nasional kepada lembaga Masyarakat, Aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelompok PKK, LUEP dan Lembaga Keagamaan
- 100) Penyusunan Peta Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi.
- 101) Kegiatan Investigasi Awal Perencanaan Harga Referensi Daerah (HRD) Jagung dan atau Cabe.
- 102) Pemantauan Harga Distribusi Beras di Sumatera Utara.
- 103) Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten Mendukung Kemandirian Pangan.
- 104) Pemberdayaan Daerah dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan, Programming dan Pengembangan Inisiatif Lokal.
- 105) Pengkayaan Informasi Bidang Ketahanan Pangan.
- 106) Pemantauan dan Pembinaan 115 Kelompok Lumbung Pangan di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 107) Analisis Harga dan Distribusi Bahan Pangan di Sumatera Utara.
- 108) Analisis Peluang Peningkatan Pendapatan Petani dan Produksi Padi di Kabupaten Deli Serdang.
- 109) Analisis Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal dalam Meningkatkan Keanekaragaman Pangan di Sumatera Utara
- 110) Analisis Masalah, Kendala dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Komoditi Pangan Pokok di Sumatera Utara.
- 111) Analisis Model Pengembangan Agribisnis Jagung di Sumatera Utara.
- 112) Kajian Analisis Bersama Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tentang Harga Gabah di Tingkat Produsen dan Konsumen.
- 113) Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Tunda Jual.
- 114) Penyebaran Informasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pola 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman) Pada Masyarakat Sumatera Utara Dalam Rangka Peningkatan/Pemantapan Program Ketahanan Pangan.
- 115) Kajian Pengembangan Potensi Pangan.
- 116) Apresiasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Tahap Kemandirian, Pengembangan dan Penumbuhan.

- 117) Pemberdayaan Perempuan dalam Penanganan Pangan dan Gizi.
- 118) Evaluasi dan Monitoring Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- 119) Pemantauan dan Pembinaan Akses Pangan.
- 120) Apresiasi Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Miskin di Pedesaan/ Perkotaan.
- 121) Penguatan Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Dairi.
- 122) Penguatan Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 123) Penguatan Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kota Padangsidimpuan.
- 124) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 125) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Batu Bara.
- 126) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 127) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 128) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Serdang Bedagai
- 129) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 130) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 131) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Tobasamosir.
- 132) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Langkat.
- 133) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Simalungun.
- 134) Sosialisasi Penyusunan Lakip Ketahanan Pangan Sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- 135) Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran Draft Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan 2013 – 2017.
- 136) Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Perbaikan Gizi Keluarga.
- 137) Investigasi Mekanisme Serta Pengadaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- 138) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Dairi.
- 139) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Samosir.
- 140) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Tobasamosir.
- 141) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 142) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Simalungun.
- 143) Penguatan Modal Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di Daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan Kabupaten Karo.
- 144) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 145) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
- 146) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 147) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
- 148) Pemberdayaan Kelompok Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Dairi.
- 149) Review Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 dan Rencana Program/Kegiatan TA. 2013.
- 150) Kajian Neraca Bahan Pangan Pokok Di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara.
- 151) Kajian Rasio Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara.
- 152) Analisis Ketersediaan Pangan Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan di Sumatera Utara.
- 153) Pengembangan Industrialisasi Pangan Berbahan Mocaf Dalam Rangka Substitusi Bahan Pangan Terigu.
- 154) Pelatihan Manajemen Gema Pangan Bagi Aparat Pemerintahan DesaLokasi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan.

- 155) Inventarisasi Dalam Rangka Pemberian Bantuan Modal Usaha Kelompok Untuk Program Aksi Gema Pangan pada Daerah Rawan Pangan.
- 156) Proyeksi Ketersediaan Pangan 2015 Dalam Rangka Pemantapan Pangan dan Kerentanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara.
- 157) Kajian Pengaruh Harga Referensi Daerah (HRD) berbagai Komoditas Pangan di Provinsi Sumatera Utara.
- 158) Identifikasi Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
- 159) Penyusunan Peta Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Utara.
- 160) Kajian Model Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Utara.
- 161) Kajian Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.
- 162) Kajian Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Kemiskinan/Akses dan Ketersediaan Pangan di Sumatera Utara.
- 163) Akselerasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Sinergi Pemberdayaan Potensi dan Budaya Lokal.
- 164) Fasilitasi Forum dan Expo Pangan dalam Rangka Kebijakan Kuliner Nusantara.
- 165) Workshop Penguatan P-LDPM 2009-2012 bagi Tenaga Pendamping dan Tim Teknis Kabupaten.
- 166) Apresiasi Agribisnis bagi Pemuda Tani dalam Upaya Peningkatan Akses Masyarakat.
- 167) Pemasyarakatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Serta Uji Laboratorium Buah dan Sayuran Segar.
- 168) Fasilitasi Aspek Manajemen Kelompok dan Teknik Pengolahan Pangan bagi Kelompok Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- 169) Manajemen Usaha Peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Swasembada Pangan Strategis (Beras, Jagung, Kedele, Daging Sapi dan Gula) di Provinsi Sumatera Utara.
- 170) Upaya Penguatan Motivasi Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan yang dapat Mendukung Proses Pencapaian Ketahanan Pangan.
- 171) Monitoring dan Pembinaan Teknis Ketahanan Pangan pada AgroIndustri di Kawasan Sentra Produksi Padi Berbasis Komunitas Petani/Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Bedagai.

172) Pelatihan PRA bagi Pendamping TPD dan LKD Desa Mandiri Pangan.

PERKEBUNAN

Luas perkebunan di Sumatera Utara sampai tahun 2011 sesuai dengan Angka Tetap Statistik Perkebunan Sumatera Utara tercatat seluas 1.999.574,74 Ha, bertambah seluas 3.171,90 Ha (0,16 %) dari tahun 2010, yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas : 1.099.443,45 Ha (54.99%) atau bertambah seluas 5.490,86 Ha (0,50 %), PTPN : 424.186,29 Ha (21.21%) atau bertambah 87,31 Ha (0,02 %), Perkebunan Besar Swasta Negara (PBSN): 322.155,47 Ha (15.80%) berkurang seluas : 6.151,55 Ha (1,91 %) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA) : 156.195.80 Ha (8.00%) bertambah seluas 3.745,28 Ha (2,40 %).

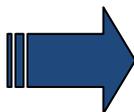
Berdasarkan estimasi angka sementara statistik perkebunan tahun 2012, luas areal perkebunan Sumatera Utara seluas 2.000.149,24 ha atau meningkat seluas 574.50 Ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 1.099.766,92 ha, PTPN 424.313,56 ha, PBSN 316.086,70 ha dan PBSA 159.982,06 ha. Pertambahan luas tanaman perkebunan terutama pada komoditas kelapa sawit sebesar 322.71 Ha terutama pada perkebunan rakyat yaitu 121.74 Ha, Hal ini dikarenakan tanaman kelapa sawit masih menjadi tanaman primadona bagi sebagian besar petani di Sumatera Utara.

Total produksi perkebunan di Sumatera Utara sampai tahun 2011 tercatat 15.932674,94 Ton atau meningkat sebesar 475.449, 72 Ton (3,08 %) dari tahun 2010, yang terdiri dari perkebunan rakyat 5.936.156,71 Ton (37.26 %) bertambah sebesar 222.398,40 ton (3,89%), PTPN : 5.091.438,81 Ton (31.96%) bertambah sebesar 133.556,49 ton ((2,69%), Perkebunan Besar Swasta Negara (PBSN) 3.258.086,78 Ton (20.45%) bertambah 68.492,58 ton (2,15%) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA) 1.646.992,64 Ton (10.34%) bertamabah 51.002,25 ton (3,20%).

Pada tahun 2012 estimasi angka sementara produksi tanaman perkebunan di Sumatera Utara sebesar 16.258.170,61 ton terdiri dari perkebunan rakyat 6.088.712,25 ton (37.26%), PTPN 5.222.013,90 (31.96%), PBSN 3.259.386,82 (20.45%) dan PBSN 1.688.057,64 (10.34%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 produksi tanaman perkebunan di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 325.495,67 ton. Peningkatan produksi tanaman perkebunan didominasi oleh komoditas

unggulan seperti kelapa sawit mencapai 309.439,78 ton, karet 9.188,13 ton, kopi 1.484.85 ton dan kakao 2.422,91 ton.

Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat dimasing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan lptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kopi
- 2) Tindak Lanjut Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Karet, Kakao dan Kopi

2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemeliharaan tanaman Karet TBM di kebun induk Suka Laju Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2) Pemeliharaan Tanaman Karet TBM di Kebun Induk Sipea-Pea Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Tanjung Beringin Kabupaten Padang Lawas.
- 4) Pemeliharaan tanaman kopi TBM di Kebun Induk Siarang-arang Kabupaten Tapanuli Utara.



- 5) Pemeliharaan Tanaman Kakao TBM di Kebun Induk Pudun Jae Padangsidempuan.
- 6) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- 7) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Besitang.
- 8) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Jaharum.
- 9) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Perbesi.
- 10) Pemeliharaan Kebun Induk Aek Tapa, Sigambal/Aek Riung dan Tj. Siram.
- 11) Pemeliharaan Kebun Induk Hessa Air Genting dan Piasa Ulu .

CAPAIAN PERSENTASE PEMBANGUNAN DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Secara keseluruhan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun budidaya perikanan telah mengalami perkembangan, baik dilaut maupun di perairan umum daratan. Hasil penangkapan ikan pada tahun 2011 sebesar 408.748,20 Ton dan pada tahun 2012 sebesar 424.244,10 Ton, sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2011 sebesar 126.386,4 Ton dan pada tahun 2012 sebesar 143.447 Ton.

Untuk mengetahui produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 40 berikut ini.

Tabel 40
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Pada Tahun 2011 dan 2012

No	Rincian	Potensi	Produksi 2011	Produksi 2012
1	Penangkapan Ikan	1.352.990,0	408.748,20	424.244,10
2	Budidaya Perikanan	300.647,5	126.386,40	143.447,00
TOTAL			535.134,60	567.691,10

Sumber : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .

Ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2011. Pada tahun 2011 ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 51.508.650 Kg dengan nilai U\$ 213.663.776,33 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 52.719.290 Kg dengan nilai U\$ 225.434.288,08. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2011 sebesar 34,66 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2012 tetap sebesar 34,66 kg/kapita/tahun. Penyerapan tenaga kerja sektor perikanan pada tahun 2011 sebanyak 212.825 orang dan pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 212.825 orang.

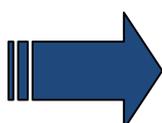
Sedangkan untuk realisasi PAD Tahun 2011 sebesar Rp 1.939.737.600,- dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.646.243.800,-

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 41
Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2011 dan 2012

No	Rincian	Capaian 2011	Capaian 2012
1	Produksi Perikanan Tangkap	408.748,20	424.244,10
2	Produksi Perikanan Budidaya	126.386,40	143.447,00
3	Ekspor Hasil Perikanan	51.508.650 Kg	52.719.290 Kg
4	Tingkat Konsumsi Ikan	34,66 kg/kapita/tahun	34,66 kg/kapita/tahun
5	Penyerapan Tenaga Kerja	212.825 orang	212.825 orang
6	Realisasi PAD	Rp. 1.939.737.600,-	Rp. 1.646.243.800,-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pogram ini mmencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi dan pengumpulan kegiatan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.
- 3) Sosialisasi Program-program Kelautan dan Perikanan.
- 4) Laporan Tahunan DKP Provsu.

- 5) Rapat Koordinasi Perencanaan dengan Kabupaten/Kota.
- 6) Pengelolaan Informasi dan Data Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 7) Pengadaan Rumah Ikan di Kabupaten Nias Utara.
- 8) Lomba Mancing di Laut Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 9) Forum Komunikasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- 10) Pengawasan dan Pengendalian Legalisasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
- 11) Evaluasi dan Penilaian POKMASWAS.
- 12) Pembinaan POKMASWAS.
- 13) Perawatan dan Docking Kapal di Danau Toba.
- 14) Operasi Gabungan Pengawasan di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat.
- 15) Operasi Rutin dan Pengawasan Sumberdaya Ikan.
- 16) Perawatan dan Docking Kapal Patroli Perikanan.
- 17) Forum Koordinasi Penegakan Hukum bidang Perikanan di Sumatera Utara.
- 18) Operasi Gabungan Penertiban Pelanggaran Peraturan Perikanan di Sumatera Utara.
- 19) Operasi Pengawasan Rutin Kapal Patroli di Danau Toba dalam rangka Pelestarian Sumberdaya Ikan.
- 20) Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum.
- 21) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Labuhanbatu).
- 22) Pengadaan Jaring Millenium di Lokasi Agromarinepolitan (Belawan).
- 23) Pengadaan jaring millenium di lokasi Agromarinepolitan (Labuhanbatu Utara).
- 24) Pengadaan Jaring Millenium di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Serdang Bedagai).
- 25) Pengadaan Jaring Millenium di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Batubara).
- 26) Pengadaan Jaring Kepiting di Lokasi Agromarinepolitan (Batubara) (DAK).
- 27) Pengadaan Jaring Kepiting di Lokasi Agromarinepolitan (Langkat).
- 28) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Batubara.
- 29) Pengadaan kapal 30 GT dan alat penangkapan ikan (DAK).
- 30) Pengadaan Rumpon di Lokasi Agromarinepolitan (Mandailing Natal).
- 31) Optimalisasi Subbag Perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja.
- 32) Pengadaan Rumpon di Lokasi Agromarinepolitan (Labuhanbatu).

- 33) Pengadaan Rumpon di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Tapanuli Selatan).
- 34) Pengadaan Rumpon di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Tapanuli Tengah).
- 35) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.
- 36) Pengadaan Jaring Kepiting di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Asahan).
- 37) Pengadaan Jaring Kepiting di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Labuhanbatu).
- 38) Pengadaan Mesin dan Perlengkapannya di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Asahan).
- 39) Pengadaan Mesin dan Perlengkapannya di Lokasi Agromarinepolitan (Kabupaten Mandailing Natal).
- 40) Pengadaan Jaring Aso-Aso pada Lokasi Agromarinepolitan di Kabupaten Nias.
- 41) Pengadaan Jaring Aso-Aso pada Lokasi Agromarinepolitan di Kabupaten Nias Selatan.
- 42) Studi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- 43) Pengadaan Cool Box dan keranjang ikan di Kabupaten Deli Serdang.
- 44) Pengadaan Cool Box dan keranjang ikan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 45) Rencana Penyusunan Buku Ekologi Ekosistem Pantai Timur Sumatera Utara.
- 46) Pengadaan Leaflet alat tangkap BPPI Belawan untuk Bahan Pelatihan kepada Masyarakat.
- 47) Modifikasi alat bantu penangkapan ikan WINCH untuk alat tangkap mini purse seine.
- 48) Desiminasi Teknologi Alat Tangkap Ikan Jaring Milenium bagi Nelayan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 50) Pembangunan Steger Kapal Pengawasan di Danau Toba.
- 51) Pengadaan Kapal dan Perlengkapannya untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Bahari di Kabupaten Batubara.
- 52) Pengadaan Alat tangkap Gillnet untuk KUB di Kecamatan Batahan.



- 53) Pengadaan 2 unit Kapal Purshine beserta perlengkapannya.
- 54) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan MUJUR JAYA Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 55) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan SINAR SAMUDERA Kec Lima Puluh.
- 56) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan FAJAR BAHAGIA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
- 57) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) Sinar laut di Pantai Labu
- 58) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan ANUGERAH Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 59) Pengadaan Alat Tangkap Jaring untuk Kelompok Nelayan Bahari (KENARI) Stabat.
- 60) Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan Coolbox untuk Kelompok Nelayan SEJATI Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 61) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk KUB di Kecamatan Muara batang gadis.
- 62) Pengadaan Alat Tangkap Aso-Aso untuk KUB di Kecamatan Batahan.
- 63) Pengadaan Alat Tangkap Aso-Aso untuk KUB di Desa Panggautan.
- 64) Pengadaan Alat Tangkap Aso-Aso untuk KUB di Desa Pulau tamang.
- 65) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) di Percut.
- 66) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan KUALA INDAH Kota Tanjungbalai.
- 67) Pengadaan Jaring Millenium di Kabupaten Asahan.
- 68) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan BERDIKARI Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
- 69) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan JARING KEPITING Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
- 70) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan SAMUDRA MANDIRI Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
- 71) Pengadaan Jaring Millenium di Kabupaten Deli Serdang.
- 72) Pengadaan Kapal Ikan untuk Kelompok Nelayan CUBAHAK Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- 73) Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan Cool Box untuk Kelompok Nelayan NELAYAN PANAHI HIJAU Kecamatan Medan Marelan.

- 74) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan TUAMANG Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 75) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan CAMAR LAUT Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 76) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan TUNAS BARU Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 77) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan REMAJA DELI Desa Karang Deli Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
- 78) Pengadaan Alat Tangkap Gillnet untuk Kelompok Nelayan SENTOSA JAYA Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 79) Pengadaan Alat Tangkap Jaring Kembang pada Kelompok Nelayan MITRA DELI di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 80) Pengadaan Mesin Kapal pada Kelompok Nelayan MITRA DELI di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 81) Pengadaan Cool Box pada Kelompok Nelayan MITRA DELI di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 82) Pengadaan Pancing Cumi pada Kelompok Nelayan MITRA DELI di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 83) Pembinaan Lubuk Larangan.
- 84) Pengadaan kapal kayu dan alat tangkap utk Kub.Harapan Laut kota Tanjung balai.
- 85) Pengadaan kapal kayu dan alat tangkap utk Kub.Pulau Mas kota Tanjungbalai.
- 86) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk Kub.Putra Bahari Kota Tanjungbalai.
- 87) Pengadaan kapal tradisonal dan alat tangkap nelayan untuk Kub.Cahaya Nelayan Kota Tanjungbalai.
- 88) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk Kub.Tuah Bunda kota Tanjung Balai.
- 89) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Mutiara Pesisir Kota Tanjungbalai.
- 90) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Nelayan Jaya Kota Tanjungbalai.
- 91) Rehab Kantor KARES Simpang Sicanang Belawan.
- 92) Pengadaan kapal tradisional untuk Kub. Tuah Laut Kota Tanjungbalai.
- 93) Pengadaan kapal tradisional untuk Kub. Hasil Laut Kota Tanjungbalai.
- 94) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap untuk KUB Maju Bersama di Kabupaten Batubara.

95) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Sumber rezeki Kota Tanjungbalai.

96) Pengadaan Kapal dan Alat tangkap untuk Kelompok Nelayan DOA RESTU di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.



97) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk Kub. Jaya Prima Kota Tanjungbalai.

98) Pengadaan Rumah Ikan di Pantai Timur Sumatera Utara.

99) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan SINAR SAMUDERA Kec Lima Puluh.

100) Pengadaan Rumah Ikan di Pantai Barat Sumatera Utara.

101) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) Sinar laut di Pantai Labu.

102) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan ANUGERAH Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.

103) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) di Percut

104) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan KUALA INDAH Kota Tanjung Balai.

105) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan BERDIKARI Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

106) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan JARING KEPITING Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

107) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan SAMUDRA MANDIRI Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

108) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan CUBAHAK Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

109) Operasional pengawasan apartemen ikan di 4 (empat) Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Agropolitan dan Pulau-Pulau Terluar, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Gerakan Bersih Pantai (Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang dan Batubara).

- 2) Pembuatan Terumbu Karang Buatan dalam rangka Rehabilitasi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 4) Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir di Kabupaten Padang Lawas.
- 5) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Mandailing Natal.
- 6) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 7) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 8) Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Keluarganya melalui Asuransi.
- 9) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui bantuan benih ikan di Kabupaten Padang Lawas.
- 10) Operasional Kapal MCS Coremap II.
- 11) Peningkatan Penyadaran Masyarakat tentang Rehabilitasi Kawasan Pesisir di Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara (Lokalita Agromarinepolitan Tapanuli Tengah dan Serdang Bedagai).
- 12) Operasional PPP P.Tello.
- 13) Biaya Pemeliharaan Kapal Patroli MCS.
- 14) Pengadaan Mangrove di Wilayah Pesisir (Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- 15) Pengadaan Mangrove di Wilayah Pesisir (Kabupaten Asahan).
- 16) Monev Karang (Reef Check) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 17) Pengembangan Silvofishery di Kabupaten Deli serdang.
- 18) Sosialisasi tentang mitigasi bencana di Nias Barat.
- 19) Sosialisasi tentang mitigasi bencana di Nias Utara.
- 20) Doking Kapal PATroli MCS di Pulau Tello.
- 21) Transplantasi Terumbu Karang.
- 22) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Asahan.
- 23) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 24) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kota Sibolga.
- 25) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Deli Serdang.
- 26) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Batubara.
- 27) Pembuatan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Labuhanbatu.

- 28) Pengadaan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Nias Barat.
- 29) Pengadaan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 30) Pengadaan Terumbu Karang Buatan di Kabupaten Nias Selatan.
- 31) Pelatihan Penyelaman dalam rangka Pelestarian Terumbu Karang (Medan dan Tapanuli Tengah).
- 32) Biaya Perawatan Peralatan Selam.
- 33) Pembuatan Terumbu Karang Buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 34) Penyusunan Master Plan Industri Kelautan dan Perikanan untuk menunjang Program Minapolitan di Sumatera Utara.
- 35) Monitoring Logam Berat pada Daerah Penangkapan Ikan.
- 36) Perencanaan Minapolitan Tahan Bencana di Kabupaten Nias Utara.
- 37) Perencanaan Minapolitan Tahan Bencana Kabupaten Serdang Bedagai.
- 38) Apresiasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan se Kabupaten/ Kota Tk. Provsu.

3. Program Pengembangan Agrobisnis, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Promosi Usaha dengan Mengikuti Pameran di dalam dan luar negeri.
- 2) Cek Fisik Kapal.
- 3) Rehab TPI Medang Deras di Kabupaten Batubara.
- 4) Lomba Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 5) Pelatihan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di UPTD BPPI Belawan.
- 6) Pelatihan Permesinan/Perbengkelan bagi Nelayan di UPTD BPPI Belawan.
- 7) Operasional Kapal Latih UPTD BPPI Belawan.
- 8) Pengadaan Suku Cadang Kapal Latih UPTD BPPI Belawan.
- 9) Docking Kapal Latih UPTD BPPI Belawan.
- 10) Pengadaan Alat Tangkap Ikan untuk alat peraga pelatihan di UPTD BPPI Belawan.
- 11) Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Kelompok Nelayan Binaan UPTD BPPI Belawan di luar lokasi Agromarinepolitan.
- 12) Rehab TPI Kuala Indah Sei suka di Kabupaten Batubara.
- 13) Renovasi Pagar UPTD BPPI Belawan.
- 14) Pengadaan Peralatan Perbengkelan bagi Kelompok Nelayan Binaan UPTD BPPI Belawan.

- 15) Rehab TPI Perupuk Lima puluh di Kabupaten Batubara.
- 16) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Asahan.
- 17) Temu Teknis Penangkapan Ikan di BPPI Semarang.
- 18) Sistem Informasi Teknologi Penangkapan Ikan di Sumatera Utara.
- 19) Pembuatan/Pengadaan Maket Alat Tangkap di UPTD BPPI Belawan.
- 20) Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN di Sumatera Utara.
- 21) Biaya Operasional PPI Tanjungbalai.
- 22) Operasional Sertifikasi Approval Supplier.
- 23) Operasional Petugas Pembina Mutu dalam rangka Asistensi Penerapan GMP/SSOP.
- 24) Monitoring Sanitasi Keekerangan.
- 25) Monitoring dan Pengendalian Mutu Ikan untuk Konsumsi Ikan dalam negeri dan Ikan Import untuk Masyarakat.
- 26) Bimbingan Teknis Usaha Perikanan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara.
- 27) Pelatihan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) bagi Petugas QC pada Unit Pengolahan Hasil Perikanan.
- 28) Operasional Balai LPPMHP Medan.
- 29) Pemeliharaan Fasilitas Balai LPPMHP Medan.
- 30) Penambahan Kelengkapan Bangunan Balai LPPMHP Medan.
- 31) Pengembangan Balai LPPMHP sebagai Lembaga Inspeksi (Program IPPI).
- 32) Peningkatan Kompetensi Balai LPPMHP Medan.
- 33) Operasional Kantor UPTD BPPI Belawan.
- 34) Rehab Ruang Kantor Dinas UPTD BPPI Belawan.
- 35) Operasional Genset Balai LPPMHP.
- 36) Pola Pengembangan produk perikanan bernilai tambah di Sumatera Utara.
- 37) Pengecatan Pagar di Sialang Buah.
- 38) Peningkatan Kompetensi perencanaan DKP Provsu.

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di Sentra Budidaya Tambak, Air Tawar Jaring Apung dan Balai Benih Ikan dalam rangka mendukung Minapolitan.
- 2) Pengembangan dan Optimalisasi Laboratorium Pengolahan Kesehatan Ikan.
- 3) Fasilitas Pembudidaya Air Tawar berupa Pengadaan Benih Nila di Kabupaten Dairi.
- 4) Fasilitas Pembudidaya Air Tawar berupa Pengadaan Benih Lele di Kabupaten Dairi.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Peredaran dan Penggunaan Obat Ikan (OIKB) dalam rangka menjamin keamanan produk perikanan budidaya.
- 6) Pembinaan Pengelolaan Stok enhancement (Stocking, Restocking dan Reservat) di kawasan Danau Toba.
- 7) Operasional Laboratorium Kesehatan Ikan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Laboratorium kepada Pembudidaya Ikan.
- 8) Monitoring Residu Antibiotik pada Ikan/udang dan unit usaha budidaya dan kelompok usaha budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB
- 9) Fasilitas Pembudidaya Air Tawar berupa Pengadaan Benih Ikan Mas di Kabupaten Dairi.
- 10) Lomba Masak Serba Ikan dalam rangka Penganekaragaman Pangan untuk meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat.
- 11) Forum dan Seminar Indoaqua tahun 2012 untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.
- 12) Temu Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya dalam rangka Percepatan Penyajian Data Statistik Perikanan Budidaya Sumatera Utara.
- 13) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan melalui Pengadaan Sarana Produksi Budidaya untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di wilayah Barat Sumatera Utara.
- 14) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan melalui Pengadaan Sarana Produksi Budidaya untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di wilayah Timur Sumatera Utara.
- 15) Pengadaan induk ikan mas dan ikan nila di Kabupaten Tapanuli Selatan

- 16) Fasilitas Pembudidaya Air Tawar berupa Pengadaan Benih Patin di Kabupaten Dairi.
- 17) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan obat-obatan dan pakan ternak di Kabupaten Dairi.
- 18) Optimalisasi Prasarana Budidaya Ikan/udang (BBIP Teluk Meku).
- 19) Optimalisasi Prasarana Budidaya Ikan (BBIP Fino).
- 20) Monitoring ketersediaan benih ikan di Sumatera Utara mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
- 21) Pengadaan benih dan calon induk ikan kepada masyarakat.
- 22) Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Nila untuk BBI Lokal/UPR di wilayah timur Sumatera Utara.
- 23) Penebaran/pelepasan ikan berbasis budidaya di perairan sekitar Danau Toba.
- 24) Percontohan Budidaya Kerapu.
- 25) Pelatihan Pembudidaya dan UPR di UPTD BBI Kerasaan.
- 26) Rehab Tambak Dempond Belawan.
- 27) Rehab Rumah Genset Dempond Belawan.
- 28) Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan).
- 29) Pengadaan satu unit tangki air di puspik ambarita.
- 30) Operasional BBIS Kerasaan.
- 31) Operasional Sialang Buah.
- 32) Operasional Dempond Babalan Langkat.
- 33) Operasional Dempond Belawan.
- 34) Operasional BBI Sibiat kabupaten Simalungun.
- 35) Operasional Puspik Ambarita.
- 36) Dana Pendukung Coremap.
- 37) Pengadaan KJA Ramah Lingkungan mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
- 38) Perbaikan Jalan Dempon Sialang Buah.
- 39) Rehabilitasi gudang peralatan dempon sialang buah.
- 40) Rehab reservoart Dempon Belawan.
- 41) Rehab Workshop UPPI Belawan.
- 42) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 43) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Sibolga.
- 44) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 45) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Barat.
- 46) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Utara.
- 47) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Selatan.

- 48) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Gunungsitoli.
- 49) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias.
- 50) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Labuhanbatu.
- 51) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Batubara.
- 52) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Tanjungbalai.
- 53) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Asahan.
- 54) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 55) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang.
- 56) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 57) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Langkat.

Permasalahan :

- 1) Pengelolaan Sumberdaya perikanan belum sepenuhnya dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.
- 2) Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang belum merata, kegiatan usahanya lebih terkonsentrasi di bagian Pantai Timur (Selat Malaka).
- 3) Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab seperti racun, bahan peledak, pengambilan terumbu karang, rusaknya hutan mangrove, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dan penangkapan ikan tanpa izin.
- 4) Terjadinya konflik penggunaan ruang dengan berbagai kepentingan. Dengan demikian, sering terjadi adanya pengusuran lahan budidaya perikanan oleh sektor ekonomi lainnya.
- 5) Kondisi sebagian besar masyarakat petani/nelayan yang terbelit dengan kemiskinan yang cukup lama, sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha.
- 6) Terbatasnya dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia.
- 7) Pemasaran hasil perikanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena belum tersedianya informasi pasar sesuai dengan komoditi yang dihasilkan di setiap Kabupaten/Kota.
- 8) Belum tertatanya pelabuhan perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan yang sesuai dengan tata ruang pelabuhan.

Solusi :

- 1) Pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan.
- 2) Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.
- 3) Penambahan nilai mutu produk melalui penanganan mutu/handling dan diversifikasi pengolahan hasil perikanan.
- 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui program agromarinepolitan.
- 5) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.
- 6) Rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
- 7) Peningkatan peran UPT Dinas dalam rangka pembinaan dan penyuluhan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
- 8) Pemberdayaan wanita nelayan.
- 9) Peningkatan Informasi dan Promosi Sumberdaya Perikanan.
- 10) Peningkatan produksi budidaya perikanan air tawar melalui rangka program agropolitan Dataran Tinggi Bukit barisan.

CAPAIAN PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI TERNAK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Pada akhir pelaksanaan Renstra 2009 - 2013, sasaran ini terus menunjukkan peningkatan keberhasilan. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan populasi ternak besar maupun kecil. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tentu saja didukung oleh program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012. Program kegiatan pendukung keberhasilan sasaran ini antara lain adalah program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan produksi, program penerapan teknologi, program pengembangan agribisnis dan program peningkatan pemasaran hasil produksi.

Adapun beberapa indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan adalah pertumbuhan populasi sapi perah, kambing dan domba. Untuk sapi perah, target pertumbuhan populasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah sebesar 9.69 % (981 ekor), namun realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 5.93 % (947 ekor). Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber bibit sapi perah yang berkualitas dan rendahnya tingkat

pemahaman sumber daya manusia peternakan dalam beternak sapi perah. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus dilaksanakan dalam pengembangan ternak sapi perah ini adalah meningkatkan ketersediaan bibit sapi perah yang berkualitas, melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia peternak sapi perah.

Target peningkatan pertumbuhan populasi ternak kambing dan domba masing-masing adalah 4,36 % (795,411 ekor) dan 5,54 % (343,767 ekor), sedangkan realisasinya adalah 1,00 % (769,802 ekor) untuk ternak kambing dan 2.70 % (334,516 ekor) untuk ternak domba. Hal ini disebabkan karena pelaku agribisnis peternakan Sumatera Utara pada umumnya petani peternak menengah kebawah yang dicirikan penyediaan modal sangat terbatas, sementara untuk mendapatkan modal dalam bentuk kredit masih sulit. Upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah dengan cara memfasilitasi peternak dengan lembaga keuangan dan pemberian modal dan juga memberikan penguatan modal langsung kepada masyarakat peternak.

Tabel 42
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2011 dan 2012 (ekor)

No	Jenis Ternak	Tahun		%
		2011	2012*	
1.	Sapi Perah	894	947	5.93
2.	Sapi potong	541,698	589,981	8.91
3.	Kerbau	114,289	115,733	1.26
4.	Kambing	762,180	769,802	1.00
5.	Domba	325,722	334,516	2.70
6.	Babi	749,354	753,101	0.50
7.	Ayam Buras	11,963,681	12,202,955	2.00
8.	Ayam Petelur	8,994,445	9,129,362	1.50
9.	Ayam Pedaging	40,167,721	40,971,075	2.00
10.	Itik	2,626,968	2,732,047	4.00

Angka Sementara
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu

Hasil pengukuran kinerja untuk produksi daging, telur dan susu pada tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan. Produksi daging dimaksud adalah banyaknya jenis ternak yang dipotong baik itu yang berasal dari populasi ternak yang ada maupun dari jumlah ternak yang didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Utara tetapi dipotong di Provinsi

Sumatera Utara. Dari data statistik diperoleh data produksi daging di Sumatera Utara tahun 2011 sebesar 131,043.88 ton dan pada tahun 2012 sebesar 136,089.07 ton, berarti peningkatan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 3,85 % atau sekitar 5,045.19 ton. Merujuk pada target yang telah ditentukan, hasil ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Target peningkatan produksi menurut Renstra adalah sebesar 4,10 %. Jika target ini tercapai maka produksi daging di Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah sebesar 136,416.68 ton.

Untuk terus meningkatkan produksi daging di Sumatera Utara, pemerintah terus mengupayakan peningkatan populasi ternak besar maupun kecil. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain adalah dengan jalan melakukan penyebaran ternak maupun bibit ternak, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai peternak.

Produksi telur meningkat menjadi 106,718.18 ton atau sekitar 2,31 % dari tahun sebelumnya (104,308.65 ton). Produksi telur yang dimaksud adalah jumlah telur ayam, itik dan puyuh yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara. Target produksi telur yang ditentukan pada tahun 2012 adalah sebesar 108,919.09 ton. Target yang ditetapkan untuk peningkatan produksi telur selain untuk mencukupi kebutuhan lokal Provinsi Sumatera Utara juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Nasional, karena telur yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara sudah melebihi kebutuhan masyarakat lokal. Namun target ini belum tercapai secara optimal, untuk itu diperlukan dukungan dan kerja keras seluruh pihak terkait untuk mensukseskan target ini.

Produksi susu juga mengalami peningkatan menjadi 746.08 ton atau 9,00 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 648,48 ton. Produksi susu yang dimaksud adalah susu segar yang berasal dari sapi perah FH dan PFH dan tidak termasuk susu olahan. Target yang diharapkan pada tahun 2012 adalah sebesar 790.99 ton atau sekitar 15,56 %. Hal ini berarti hasil yang dicapai masih tertinggal sebesar 44.91 ton dari target yang ditentukan. Tidak tercapainya peningkatan populasi sapi perah sesuai dengan target, tentu saja memberikan dampak terhadap produksi susu. Produksi susu yang dicapai pada tahun ini juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Penyebabnya juga sama yaitu karena terbatasnya sumber bibit sapi perah yang berkualitas dan rendahnya tingkat pemahaman sumber daya manusia peternakan dalam beternak Sapi perah.

Tabel 43
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu
Tahun 2011 dan 2012

No	Jenis Komoditi	Tahun (Ton)		%
		2011	2012*	
1.	Daging	131,043.88	136,089.07	3.85
2.	Telur	104,308.65	106,718.18	2.31
3.	Susu	684.48	746.08	9.00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu

Indikator peningkatan potensi konsumsi hewani adalah dengan meningkatnya konsumsi daging, telur dan susu. Sama halnya dengan sasaran-sasaran sebelumnya, hasil pengukuran kinerja untuk peningkatan potensi konsumsi hewani pada tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan. Konsumsi daging di Sumatera Utara meningkat sebesar 2.30 % menjadi 10.22 Kg/Kapita/Tahun dari tahun sebelumnya yaitu 9.99 Kg/Kapita/Tahun, sedangkan target peningkatan yang diharapkan pada tahun ini adalah sebesar 4,13 % atau 10,40 Kg/Kapita/Tahun. Target ini dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan konsumsi daging per kapita/tahun sebesar 10,30 Kg menurut hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2008, namun walaupun belum mencapai target dan memenuhi standar kebutuhan menurut WNPG, paling tidak animo dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi daging sudah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dari tahun-tahun sebelumnya.

Konsumsi potensi telur juga mengalami peningkatan menjadi 8.01 Kg/Kapita/Tahun atau sebesar 0.63 % dari tahun sebelumnya sebesar 7.96 Kg/Kapita/Tahun. Sedangkan target peningkatan konsumsi adalah sebesar 4.02 % atau 8.28 Kg/Kapita/Tahun. Berdasarkan hasil WNPG 2008 kebutuhan konsumsi telur adalah sebesar 6,50 Kg/Kapita/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi telur di masyarakat Sumatera Utara sudah memenuhi bahkan melebihi angka minimal hasil WNPG 2008. Tentu saja keberhasilan ini ditunjang dengan hasil produksi telur yang cukup tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun luar provinsi.

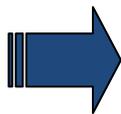
Peningkatan konsumsi susu juga mengalami peningkatan sebesar 20.00 % dari target sebesar 4,07 %. Pada tahun 2011 konsumsi susu sebesar 0,050 Kg/Kapita/Tahun dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0.002 Kg/Kapita/Tahun menjadi 0.052 Kg/Kapita/Tahun. Menurut hasil WNPG 2008 kebutuhan konsumsi susu masyarakat

Indonesia adalah sebesar 7,2 Kg/Kapita/Tahun. Angka ini tentu saja masih jauh dari angka pencapaian di Sumatera Utara. Konsumsi susu tentu saja berkaitan dengan produksi dan populasi ternak perah penghasil susu. Kedua indikator ini masih cukup rendah di Sumatera Utara. Sehingga fokus pemerintah untuk meningkatkan konsumsi susu ini adalah dengan jalan meningkatkan populasi ternak perah dan tentu saja meningkatkan produksi dan ketersediaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan populasi ternak perah terus diupayakan pemerintah antara lain dengan meningkatkan ketersediaan bibit, pakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

Tabel 44
Perkembangan Konsumsi Daging, Telur dan Susu
Tahun 2011 dan 2012

No	Jenis Komoditi	Tahun (Ton)		%
		2011	2012*	
1.	Daging	9.99	10.22	2.30
2.	Telur	7.96	8.01	0.63
3.	Susu	0.05	0.06	20.00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

- **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**, Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan monitoring LM3.
 - 2) Fasilitasi SMD.
 - 3) Pembinaan usaha budidaya ternak di Sumatera Utara.
 - 4) Pelatihan petugas keswan.
 - 5) Pelatihan juru sembelih hewan.
 - 6) Pelatihan petugas kesmavet.
 - 7) Pelatihan keurmater.

Permasalahan :

Masih rendahnya peran kelembagaan peternak dan rendahnya kualitas sumber daya manusia peternak.

Solusi :

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi kelompok-kelompok peternak.

- **Program Peningkatan Produksi**, Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Verifikasi dan validasi data peternakan
 - 2) Apresiasi statistik peternakan
 - 3) Koordinasi pembangunan peternakan regional dan nasional
 - 4) Apresiasi perencanaan
 - 5) Rapat teknis aparat pembangunan peternakan
 - 6) Pertemuan perencana
 - 7) Pokok-pokok pikiran draft renstra 2014-2018
 - 8) Penyusunan renja 2013
 - 9) Sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
 - 10) Identifikasi kegiatan
 - 11) Analisis kapasitas SDM pada usaha penggemukan sapi potong
 - 12) Workshop penyusunan dan verifikasi proposal kegiatan pembangunan peternakan
 - 13) Fasilitasi rencana kerjasama pengembangan ternak ruminansia di kawasan peternakan
 - 14) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - 15) Koordinasi teknis sarana prasarana
 - 16) Pengembangan perbibitan ternak pada kelompok peternak dalam rangka pemberdayaan gender di Tapanuli Selatan
 - 17) Pengembangan perbibitan ternak pada kelompok peternak dalam rangka pemberdayaan gender di Binjai
 - 18) Pengembangan perbibitan ternak pada kelompok peternak dalam rangka pemberdayaan gender di Medan
 - 19) Pengembangan perbibitan ternak sapi bali pada kelompok peternak Labuhanbatu Utara
 - 20) Pengembangan perbibitan ternak sapi pada kelompok peternak Medan Marelan
 - 21) Pengembangan perbibitan ternak sapi pada kelompok peternak Serdang Bedagai
 - 22) Pengembangan perbibitan ternak sapi pada kelompok peternak Deli Serdang
 - 23) Pengembangan perbibitan ternak sapi pada kelompok peternak Asahan
 - 24) Pengembangan perbibitan ternak kerbau pada kelompok peternak Tapanuli Utara
 - 25) Pengembangan perbibitan ternak kerbau pada kelompok peternak Tobasamosir

- 26) Pengembangan perbibitan ternak kambing ras boerka di sei putih
- 27) Pengembangan unit layanan teknis aneka ternak
- 28) Inventarisasi potensi lahan pengembangan HMT dan padang penggembalaan di Kabupaten/Kota
- 29) Pengembangan ternak pada kelompok PKK binaan provinsi di Pakpak Bharat
- 30) Pengembangan ternak pada kelompok PKK binaan provinsi di Tapanuli Selatan
- 31) Pengembangan ternak pada kelompok PKK binaan provinsi di Mandailing Natal
- 32) Pengembangan perbibitan ternak babi Kabupaten Deli Serdang
- 33) Pengembangan perbibitan ternak babi Kabupaten Pakpak Bharat
- 34) Pengembangan perbibitan ternak babi Kabupaten Dairi
- 35) Kerjasama kemitraan dengan perusahaan peternakan
- 36) Pengembangan ternak babi mendukung gerakan mandiri pangan (Gema Pangan) Kabupaten Nias
- 37) Pengembangan ternak babi mendukung gerakan mandiri pangan (Gema Pangan) Kabupaten Nias Barat
- 38) Pengembangan ternak babi mendukung gerakan mandiri pangan (Gema Pangan) Kota Gunungsitoli
- 39) Pengembangan budidaya ternak sapi di Kabupaten Padang lawas Utara
- 40) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Kabupaten Langkat
- 41) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Kabupaten Labuhanbatu
- 42) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 43) Pengembangan budidaya ternak kerbau di Kabupaten Dairi.
- 44) Pengembangan budidaya ternak sapi di Binjai.
- 45) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Medan Labuhan.
- 46) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Asahan.
- 47) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Deli Serdang.
- 48) Pengembangan budidaya ternak sapi potong di Serdang Bedagai.

- 49) Pencegahan dan penanggulangan wabah flu burung (AI).
- 50) Pencegahan dan Pemberantasan rabies.
- 51) Pencegahan dan Pemberantasan brucellosis.
- 52) Pencegahan dan Pemberantasan hog cholera.
- 53) Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik.
- 54) Pengamatan dini penyakit hewan menular.
- 55) Monitoring penyakit hewan menular pasca vaksinasi.
- 56) Pengawasan obat hewan.
- 57) Peningkatan sarana dan prasarana keswan.
- 58) Monitoring dan surveilence residu cemaran mikroba.
- 59) Peningkatan SDM petugas dalam penanganan pengujian sampel.
- 60) Sosialisasi, monitoring dan pengendalian penerapan kesejahteraan hewan di RPH.
- 61) Pembinaan dan Penanggulangan penyakit zoonosis.
- 62) Fasilitasi dan pengemabangan RPH.
- 63) Penyediaan pangan asal hewan ASUH.
- 64) Penjaringan betina produktif di RPH dan masyarakat.
- 65) Survei investigasi design pembangunan RPH (modern).
- 66) Pembangunan sarana dan prasarana BIBD.
- 67) Peningkatan peralatan lab BIBD.
- 68) Peningkatan kinerja BIBD.
- 69) Pengadaan N2 cair.
- 70) Penyusunan recording IB.
- 71) Pengawasan mutu semen beku.
- 72) Pengembangan ternak rusa.
- 73) Pencegahan dini gangguan reproduksi pada akseptor IB.
- 74) Koordinasi teknis BIBD.
- 75) Pengembangan perbibitan burung puyuh.
- 76) Pengembangan perbibitan kelinci.
- 77) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Deli Serdang.
- 78) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 79) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di kota Medan.
- 80) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Batubara.
- 81) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Simalungun.

- 82) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Mandailing Natal.
- 83) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 84) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 85) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di Kabupaten Tobasamosir.
- 86) Pemberdayaan kelompok usaha tani peternakan di kota Tebing Tinggi.

Permasalahan :

Masih rendahnya keanekaragaman produksi hasil ternak, belum terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dan belum dimanfaatkan secara optimal teknologi produksi maupun pasca panen hasil peternakan.

Solusi :

Menstimulasi peningkatan produksi dan populasi ternak dengan mengoptimalkan teknologi dan sumber daya lokal.

- ***Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi***, Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Pengembangan pengolahan produk hasil peternakan
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pasar
 - 3) Akselerasi Pasar Eksport Ternak Kambing / Domba
 - 4) Promosi dan Pameran
 - 5) Diversifikasi Produk Olahan Hasil Peternakan
 - 6) Fasilitasi Pemanfaatan Kredit Usaha Peternakan
 - 7) Lomba Kelompok Ternak
 - 8) Kontes ternak
 - 9) Analisis model pengembangan pemasaran komoditas ternak kelinci di karo
 - 10) Workshop analisis pasar

Permasalahan :

Keterbatasan modal, sarana, prasarana dan teknologi serta keterbatasan informasi dan akses pasar menyebabkan peternak kurang berkembang dalam usaha agribisnisnya.

Solusi :

Memfasilitasi peternak dengan penyedia modal dan melakukan promosi produk daerah ke luar daerah dan luar negeri.

- ***Program Peningkatan Penerapan Teknologi***, Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Pembuatan pabrik pakan mini.
 - 2) Fasilitasi alat pengolah daging bagi kelompok usaha pengolahan hasil peternakan.
 - 3) Fasilitasi usaha kelompok budidaya ternak sapi di Kabupaten Asahan.
 - 4) Fasilitasi usaha kelompok budidaya ternak sapi di Kota Medan.
 - 5) Fasilitasi usaha kelompok budidaya ternak sapi di Kabupaten Deli Serdang.
 - 6) Fasilitasi usaha kelompok budidaya ternak sapi di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 7) Pemanfaatan limbah perkebunan dengan penerapan teknologi pengolahan pakan menjadi pakan ternak sapi di Kabupaten Langkat.
 - 8) Pembinaan dan peningkatan kualitas/mutu hasil pengolahan pasca panen.
 - 9) Pengembangan Teknologi Transfer Embrio.

Permasalahan :

Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk kandang dan laboratorium.

Solusi :

Optimalisasi sarana dan prasarana baik di provinsi dan kabupaten/ kota dari dana APBD dan APBN.

- ***Program Pengembangan Agribisnis***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengembangan agribisnis ternak sapi di Kabupaten Deli Serdang
- 2) Pengembangan agribisnis ternak itik di Kota Medan

- 3) Pengembangan agribisnis ternak itik di Kabupaten Labuhanbatu
 - 4) Pengembangan agribisnis ternak itik di Kabupaten Dairi
 - 5) Pengembangan agribisnis ternak kerbau di Kabupaten Dairi
 - 6) Pengembangan agribisnis ternak babi yang ramah lingkungan di Kabupaten Dairi
 - 7) Pengembangan agribisnis ternak babi yang ramah lingkungan di Kabupaten Karo
 - 8) Pengembangan agribisnis ternak babi yang ramah lingkungan di Kabupaten Pakpak Bharat
 - 9) Integrasi ternak sapi dengan perkebunan di Kabupaten Simalungun
 - 10) Pengembangan agribisnis ternak kerbau di Kabupaten Tapanuli Utara
 - 11) Pengembangan agribisnis ternak kerbau/sapi di Kabupaten Tobasamosir dalam rangka mendukung agropolitan
 - 12) Pengembangan agribisnis ternak kerbau/sapi di Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka mendukung agropolitan
 - 13) Pengembangan agribisnis ternak kerbau/sapi di Kabupaten Karo dalam rangka mendukung agropolitan
- pengembangan agribisnis ternak kerbau/sapi di Kabupaten Samosir dalam rangka mendukung agropolitan

Permasalahan :

Kurangnya akses pelaku usaha untuk memperoleh modal usaha terutama dari bank. Upaya koordinasi dengan pihak perbankan terus dilaksanakan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Solusi :

Memfasilitasi pelaku usaha peternakan dengan lembaga penyedia modal usah

CAPAIAN PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2011 adalah 20,48 % dan pada tahun 2012 menjadi 22,07 %. Pertumbuhan industri di Sumatera Utara pada tahun 2011 adalah 2,05 % dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 3,63 %. Di bawah ini akan diuraikan program/ kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2012, dalam rangka pencapaian indikatornya.

- ***Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah***, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Mutu Kualitas Tenun/Ulos dan Pengadaan Peralatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Kunjungan Kerja Klaster ke Luar Provinsi.

Permasalahan :

Rendahnya kualitas barang-barang produk IKM dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk IKM.

Solusi :

Melaksanakan pelatihan peningkatan mutu produk, bimtek, dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- ***Program Penataan Struktur Industri***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengembangan Desa Binaan melalui pengadaan sarana usaha & pelatihan.
- 2) Koordinasi & Perencanaan program dan Kegiatan Agropolitan dan Agromarinepolitan dalam rangka sinergi antara pusat, provinsi & daerah.

Permasalahan :

Rendahnya kualitas SDM, dan penguasaan teknologi masih terbatas. Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (instansi serumpun) dalam mendata dan merencanakan kegiatan. Belum optimalnya data Industri dan Perdagangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan masa yang akan datang.

Solusi :

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, bimtek, dan pengenalan teknologi mutakhir. Perlu adanya rapat-rapat koordinasi dengan instansi di Kabupaten/Kota (yang serumpun). Perlu adanya pendataan tentang industri dan perdagangan yang ada di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara.

- ***Program Persaingan Usaha***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Partisipasi Gender Indag melalui kegiatan pameran di Jakarta.
- 2) Keikutsertaan & Pengadaan barang-barang untuk pameran TTG tingkat provinsi dan Nasional.

Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
- 2) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara.

Solusi :

- 1) Perlu adanya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.
- 2) Perlu adanya promosi tentang andalan Sumatera Utara secara kontinu.

Capaian kinerja urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara tahun 2011 dan tahun 2012 adalah barang-barang aluminium, getah karet alam, kopi, lemak dan minyak nabati, margarin, olahan minyak lemak nabati dan hewani.
- 2) Volume ekspor Sumatera Utara tahun 2011 adalah 7.400.904 (dalam ton) dan pada tahun 2012 adalah 7.868.133 (dalam ton).
- 3) Nilai ekspor Sumatera Utara tahun 2011 adalah 10.900.910.000 (dalam US\$) dan tahun 2012 adalah 9.553.531.000 (dalam US\$)
- 4) Volume import Sumatera Utara tahun 2011 adalah 6.079.813 (dalam ton) dan tahun 2012 adalah 6.176.535 (dalam ton).

- 5) Nilai import Sumatera Utara tahun 2011 adalah 4.481.449.000 (dalam US\$) dan tahun 2012 adalah 4.739.248.000 (dalam US\$).
- 6) Surplus/minus neraca perdagangan internasional Tahun 2011 adalah surplus sebesar 6.149.461.000 (dalam US\$) dan Tahun 2012 adalah surplus sebesar 4.814.283.000 (dalam US\$).

- **Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengendalian pengawasan garam beryodium
- 2) Pengendalian dan pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan
- 3) Pembinaan wajib SNI komoditi ILMEA
- 4) Sidang Tera/Tera ulang alat UTTP UPTD. Balai Metrologi Medan
- 5) Pengawasan jembatan timbangan dan pompa ukur SPBU serta tangki ukur mobil Metrologi Medan
- 6) Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet UPT Metrologi Medan
- 7) Pengawasan alat UTTP di Pasar-pasar Tradisional di Kabupaten/Kota Metrologi Medan
- 8) Sidang Tera/Tera ulang UTTP UPTD. Balai Metrologi R. Prapat
- 9) Verifikasi alat standar laboratorium UPTD. Metrologi Medan
- 10) Pengawasan alat UTTP Metrologi R. Parapat
- 11) Verifikasi alat standar lab. UPTD Metrologi R. Prapat
- 12) Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan pertekmet Metrologi R. Parapat
- 13) Sidang Tera/Tera ulang alat UTTP UPTD. Balai Metrologi Pematangsiantar
- 14) Verifikasi alat standar laboratorium UPTD. Metrologi Pematangsiantar
- 15) Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung (dari metrologi Pematangsiantar)
- 16) Sidang Tera/Tera ulang alat UTTP UPTD. Balai metrologi Sibolga
- 17) Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung (dari metrologi sibolga)
- 18) Pertemuan teknis kemetrologian (dari metrologi sibolga)
- 19) Verifikasi alat standar lab. UPTD. Metrologi Sibolga

- 20) Promosi dan Pemasaran Produksi dalam negeri melalui berbagai event
- 21) Registrasi Personil Petugas Pengambil Contoh BPSMB Medan
- 22) Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu dan impor
- 23) Akreditasi lembaga sertifikasi produk (LS Pro) Sumatera Utara
- 24) Akreditasi dan Surveillance kemampuan laboratorium penguji mutu dan kalibrasi
- 25) Audit internal laboratorium penguji mutu dan kalibrasi UPTD. BPSMB Medan
- 26) Kaji ulang manajemen dan revisi dokumen

Permasalahan :

Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen. Informasi tentang produk-produk dalam negeri yang belum optimal. Masih banyak alat-alat UTP yang belum standar di Kabupaten/Kota, disebabkan masih minimnya pengawasan dalam hal ini karena kurangnya tenaga penera.

Solusi :

Penguatan sistem dan pelaksanaan [engawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis, serta pelaksanaan pengawasan ukuran takaran timbangan dan pengawasan barang-barang dalam kemasan secara kontinu. Perlu adanyapenambahan tenaga penera.

- **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Program ini memuat kegiatan :

Pengawasan distribusi dan harga 9 bahan pokok.

Permasalahan :

Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 bahan pokok serta barang beredar.

Solusi :

Dilaksanakan pengawasan pendistribusian barang dan harga 9 bahan pokok secara kontinu.

7.1.3 Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor Impor

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengembangan dan Promosi ekspor hasil industri Sumatera Utara di P. Penang.
- 2) Dukungan Operasional Pusat Promosi & Pelatihan Ekspor Daerah (P3ED) Sumatera Utara.
- 3) Pelaksanaan Informasi & Promosi Ekspor UKM oleh P3ED Medan.
- 4) Partisipasi Pameran dan Misi Dagang ke Negara Asia, Afrika & Eropa.
- 5) Partisipasi Pertemuan pada Kerjasama IMT-GT.

Permasalahan :

Adanya barang-barang impor ilegal dan masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang ekspor impor.

Solusi :

Peningkatan Efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan skill dan kemampuan SDM UKM di bidang ekspor impor.

CAPAIAN PERSENTASE PENINGKATAN PEMANFAATAN HUTAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan memiliki luas sebesar 3.684.685,08 ha, yang terdiri dari Hutan Suaka Alam seluas 462,076 ha, Hutan Lindung seluas 1.306.761,42 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 859.609,93 ha, Hutan Produksi 1.015.074,98 ha dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 41.163,47 ha. Dari data yang ada tersebut diatas terdapat luas lahan kritis seluas 434.767,24 ha berdasarkan hasil penafsiran citra landsat. Adapun program pemerintah saat ini adalah untuk melakukan restorasi ekosistem terutama terhadap lahan-lahan kritis dengan cara memulihkan kondisi lahan tersebut dengan melakukan penanaman pohon dan konservasi tanah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Adapun total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara adalah 82.989,63 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 60.512 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 6.045,45 hektar, reboisasi sebanyak 7.421 ha dan penanaman hutan rakyat sebanyak 4.743,53 ha serta kebun bibit seluas 4.267,55 ha. Selain itu juga dilaksanakan pembuatan dam pengendali sebanyak 20 unit, pembuatan gully plug sebanyak 36 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 30 unit. Dengan adanya kegiatan restorasi ekosistem ini diharapkan setiap tahunnya luas lahan kritis akan semakin berkurang dan bahkan memberikan dampak yang positif terhadap perubahan iklim.

Selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan juga di Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reboisasi yang merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini di Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan seluas 31.994,55 hektar yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Selain itu juga turut berperan sertanya pihak swasta untuk turut serta mengelola hutan secara lestari dan berkisambungan berupa pengembangan Hutan Tanaman Industri pada areal-areal yang kurang produktif (bekas

perambahan, alang-alang, semak belukar, lahan kosong) yang berada dalam kawasan hutan sehingga menjadi produktif.

Berbagai program pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan dalam meningkatkan fungsi kawasan hutan agar menjadi lebih produktif dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Provinsi Sumatera Utara, antara lain melalui Pekan Penghijauan, Kecil Menanam Dewasa Menganam (KMDM), Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Aksi/Gerakan Penanaman Serentak Indonesia dan Pekan Pemeliharaan Pohon, Hari Menanam Pohon Indonesia (tanggal 28 Nopember) dan Bulan Menanam Pohon Nasional (bulan Desember), penanaman dalam rangka Gerakan Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree), penanaman 1 milyar pohon (One Billion Indonesia Trees for The World-OBIT), Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) serta dalam rangka mengisi Tahun Kehutanan Internasional 2011. Dalam rangka Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) Tahun 2012, hingga akhir november masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menanam dan memelihara pohon sebanyak 35 juta batang pohon, dari target Provinsi Sumatera Utara sebanyak 50.000.000 batang bibit. Untuk mendukung Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012, dengan target penanaman dan pemeliharaan 50.000.000 bibit pohon, dilaksanakan Kampanye Indonesia Menanam, dengan menggelorakan semangat menanam dan memelihara pohon secara terus menerus sepanjang tahun.

Sumberdaya hutan yang secara langsung dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan adalah Produksi Hasil Hutan berupa kayu dan bukan kayu. Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap tahunnya mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan karena semakin rendahnya produktifitas kayu yang ada di hutan alam dan disamping itu juga adanya moratorium jeda tebang pada hutan alam untuk mengurangi dampak pemanasan global (Global warming). Sebagai alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan kayu pertukangan dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan hutan tanaman (HTI) serta kegiatan hutan rakyat. Pada Tahun 2011, total produksi kayu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak

1.347.612,25 m³, yang terdiri dari 223.254,31 m³ (11,09 %) Kayu Bulat; sebanyak 182.085,79 m³ (9,05 %) Kayu Bulat Sedang; dan sebanyak 1.607.186 m³ (79,86%) Kayu Bulat Kecil. Berdasarkan sumber produksi, diketahui bahwa produksi dari IUPHHK-HA sebanyak 74.956,36 m³, IUPHHK-HT sebanyak 715.529,20 m³, Ijin Lainnya yang Sah sebanyak 217.973,90 m³ dan Hutan Hak/Milik Masyarakat sebanyak 339.152,79. Sedangkan untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011 terdiri dari jenis plywood, sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp, S4S, meubel, veneer dan produk lainnya (yang merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume produksi sebesar 555.213,38 m³. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat wajib didukung dengan dokumen yang sah.

Selain kayu manfaat langsung yang diperoleh dari dalam kawasan hutan adalah hasil hutan bukan kayu yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam memanfaatkan potensi kawasan hutan yang belum dikembangkan secara maksimal. Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011 terdiri dari getah pinus, getah karet dan rotan. Adapun produksi hasil hutan bukan kayu pada tahun 2011 adalah 21.728.660 kg (getah pinus, getah karet dll) dan 65.700 batang rotan. Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten Karo, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal dimana Kabupaten Karo merupakan daerah penghasil getah pinus terbesar pada tahun 2011. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari IUPHHK Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Labuhanbatu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Produksi rotan pada tahun 2010 hanya terdapat pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tobasamosir dan Samosir dengan produksi terbesar berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Di bawah ini akan diuraikan program/ kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2012, dalam rangka pencapaian indikatornya.

- ***Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Optimalisasi Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

- 2) Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- 3) Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Propinsi
- 4) Perencanaan Kegiatan Penertiban Pengusahaan Hutan
- 5) Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota
- 6) Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku Kayu dan Bukan Kayu pada Industri Primer Hasil Hutan pada BPPHH.
- 7) Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) kepada pemegang IUPHHK alam/Tanaman, Industri Primer Hasil Hutan dan Ijin Sah lainnya pada BPPHH.
- 8) Pemeriksaan Realisasi Pemenuhan bahan Baku Industri RPBI dan Persediaan (Stock) Bahan Baku Kayu PPHH.
- 9) Pemantauan Penggunaan, Pengendalian dan Pembinaan Distribusi Dokumen SKSHH pada BPPHH.
- 10) Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan pada BPPHH.
- 11) Monitoring Peredaran Kayu Rakyat pada BPPHH.
- 12) Sosialisasi Penatausahaan Kayu Rakyat.
- 13) Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu Penampungan Hasil Hutan dan Sentra Penjualan Hasil Hutan PPHH.
- 14) Uji Petik Peredaran Hasil Hutan dan Pos Peredaran Hasil Hutan pada PPHH.
- 15) Uji Petik Cross Check Dokumen LHC/LHP/LMK dan SKSKB/FA pada PPHH.
- 16) Identifikasi Jenis Kayu Komersial Sumatera Utara
- 17) Sosialisasi Peraturan Perundangan Peredaran Hasil Hutan

- **Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung
- 2) Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 3) Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan
- 4) Pengendalian Batas IUPHHK - HT
- 5) Pembahasan dan Pengkajian Revisi Kawasan Hutan dalam Rangka Review RTRWP Sumatera Utara

- 6) Koordinasi Perencanaan Kegiatan pada BPPK
- 7) Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu pada BPPK
- 8) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan pada BPPK
- 9) Pengumpulan Dokumen Tata Batas pada PPK I
- 10) Survey Risalah Hutan Lindung pada PPK Wilayah II
- 11) Fasilitas Penyusunan Ranperda Retribusi Tahura BB

- **Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
- 2) Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional dan Lintas Sektoral
- 3) Pengumpulan data dan penyusunan statistik kehutanan Tahun 2011
- 4) Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman
- 5) Sosialisasi / Penyebarluasan informasi dibidang Hutan dan Kehutanan
- 6) Studi Jenis dan Penyebaran Rotan yang dimanfaatkan Masyarakat Sumatera Utara

- **Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
- 2) Operasi penindakan Kejahatan Kehutanan dan Penanganan Pasca Operasi penindakan Kejahatan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara.
- 3) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 4) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Kehutanan.
- 5) Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan.
- 6) Pembinaan dan Monitoring pengelolaan AMDAL Ijin Lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, dll).
- 7) Perencanaan, koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan TAHURA.
- 8) Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Tahura BB.

- ***Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan Pohon Induk dan Penangkar (DAK)
- 2) Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutan dan Kehutanan
- 3) Arahan Suksesi Alam pada Kawasan Hutan di DTA Danau Toba
- 4) Pembinaan Sylvofisheri dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelamatan Kawasan Hutan
- 5) Pengadaan Bibit Simbolis
- 6) Kemah Kerja Rehabilitasi Lahan Nasional (DAK)
- 7) Temu Rimbawan Nasional
- 8) Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon
- 9) Pengadaan Bibit dan Distribusi Bibit Maskot Jenis Pohon Kabupaten/ Kota dan Provinsi
- 10) Pengadaan bibit Mangrove kepada Masyarakat
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 12) Identifikasi Lokasi Pengembangan Tanaman Biofuel di DTA Danau Toba
- 13) Penyelenggaraan Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan TAHURA BB (DAK bidang Kehutanan)
- 14) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk mendukung Toba Go Green (P-APBD)

- ***Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi***

Program ini memuat kegiatan :

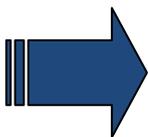
Monitoring dan Evaluasi Peralatan HA/IPKHTI

CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator ini, menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang diperjanjikan semula di awal tahun, yaitu 100% dan dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 45 di bawah ini.

TABEL 45.
CAPAIAN INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase peningkatan kehidupan beragama dalam harmoni keberagaman umat beragama, dengan Sub Indikator, yaitu :	100	%	100	%	100%
a Frekwensi Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar . Agama Islam	2	Kali	2	Kali	100%
b Frekwensi Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar . Agama Non Islam	4	Kali	4	Kali	100%



KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan Peringatan Isra' Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1432 H/2012 dengan target 1 kali, pagu anggaran Rp. 95.000.000,- realisasi target kinerja 1 kali, realisasi anggaran Rp.72.690.000,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 100 %.
2. Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1432 H/2012 dengan target 1 kali, pagu anggaran Rp. 95.000.000,- realisasi target kinerja 1 kali, realisasi anggaran Rp.81.783.800,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 100 %.
3. Kegiatan Perayaan Hari Raya Nyepi dengan target 1 Kali, pagu anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi target kinerja 1 Kali, realisasi anggaran Rp. 0,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 0 %.
4. Kegiatan Perayaan Hari Raya Waisak dengan target 1 Kali, pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi target kinerja 1 Kali, realisasi anggaran Rp. 0,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 0 %.

5. Kegiatan Perayaan Hari Paskah PNS Kantor Gubsu dengan target 1 Kali, pagu anggaran Rp. 70.000.000,- realisasi target kinerja 1 Kali, realisasi anggaran Rp. 0,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 0 %.
6. Kegiatan Perayaan Hari Natal PNS Kantor Gubsu dengan target 1 Kali, pagu anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi target kinerja 1 Kali, realisasi anggaran Rp. 60.000.000,- sehingga di peroleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Permasalahan :

Karena organisasi yang berurusan tidak datang untuk mengurus pencairan dananya meski telah di informasikan

Alternatif Solusi :

Diupayakan untuk di tampung kembali pada APBD 2013.

Sasaran Strategis 2 :

MENINGKATNYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Pencapaian realisasi kinerja dari masing-masing indikator Kinerja Utama dan sub indikator dapat dilihat pada Tabel 46 di bawah ini :

TABEL 46
CAPAIAN INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase penerapan nilai etika aparatur dan etos kerja Aparatur yg Mampu Mendorong Terciptanya Tata Pemerintahan yg Bersih dan Berwibawa	100	%	100	%	100%
a Frekwensi Rapat Tim penyelesaian kasus disiplin PNS	4	Kali	4	Kali	100%
b Jumlah PNS yang berprestasi dan memperoleh penghargaan	2750	org	2750	org	100%
c Frekwensi pelaksanaan Sosialisasi tentang kepegawaian	4	Kali	4	Kali	100%
d Tingkat penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008	1	Pemprov	1	Pemprov	100%
1. Frekwensi Bimbingan Teknis (BINTEK) SATGAS SPIP	1	Kali	1	Kali	100%
2. Jumlah SATGAS yang dibentuk	1	Satgas	1	Satgas	100%
e Tingkat Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersinergi, bersih dan berwibawa :	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
1. Tingkat penyelesaian penyusunan LKPJ tepat waktu	50	SKPD Pemprov	50	SKPD Pemprov	100%
	28	Kab/Kota:	28	Kab/Kota:	100%
2. Tingkat penyelesaian penyusunan LPPD tepat waktu	50	SKPD Pemprov	50	SKPD Pemprov	100%
	28	Kab/Kota:	28	Kab/Kota:	100%
3. Tingkat Koordinasi pelaksanaan PILKADA di Sumatera Utara	1	Desk PILKADA	1	Desk PILKADA	100%
4. Tingkat penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terlaksana dengan baik :	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
5. Jumlah Daerah Otonom Baru yang sudah terevaluasi	7	Kab/Kota	8	Kab/Kota	114%
f Tingkat penyelenggaraan pemerintahan umum :					
1. Frekwensi pelaksanaan rapat dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan	3	kali	3	kali	100%
2. Frekwensi pendataan kependudukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
3. Frekwensi pelaksanaan penilaian kecamatan terbaik di Sumatera Utara	1	kali	1	kali	100%
di Sumatera Utara	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
4. Frekwensi pelaksanaan rapat dalam rangka Penyelesaian	10	Kali	10	Kali	100%
sengketa perbatasan dan pembuatan patok batas wilayah di Sumatera Utara	248	Patok	248	Patok	100%
	12	Kab/ Kota	12	Kab/ Kota	100%
<i>g . Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur :</i>					
1. Pengawasan dan Audit dilingkungan Aparatur Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan baik	1	Provinsi	1	Provinsi	100.00%
	33	Kab/Kota	33	Kab/Kota	
2. Frekwensi pelaksanaan audit reguler					
Jumlah pemeriksaan reguler pada Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
Jumlah pemeriksaan reguler pada Badan/Kantor/Setwan/RSU Jiwa	14	Instansi	15	Instansi	107%
Jumlah pemeriksaan reguler pada Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi	20	Dinas	20	Dinas	100%
Jumlah pemeriksaan reguler pada Asisten Sekda Provsu.	4	Asisten	3	Asisten	75.00%
Jumlah pemeriksaan reguler pada Perusahaan Daerah Provsu	3	Instansi	1	Instansi	33.33%
3. Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan	3	Kali	3	Kali	100%
dengan Inspektorat Kab/Kota se-Sumut	3	Lokasi	3	Lokasi	100%
4. Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan penyusunan PKPT dengan Kab/ Kota se Sumut	1	Kali	1	Kali	100%
5. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah :	100	%	100	%	100%
Frekwensi Pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemprov	1	kali	1	kali	100%
6. Tingkat penyelesaian pengaduan dan penanganan kasus-kasus atas petunjuk Gubernur yang terselesaikan dengan baik :	1	Pemprov	1	Pemprov	100%
- Frekwensi penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda	12	kasus	6	Kasus	50%
- Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemda	12	Kasus	12	Kasus	100%
- Frekwensi pelaksanaan koordinasi dan pembahasan TLHP Itprov dan kasus pengaduan Masyarakat	3	Kali	3	Kali	100%
- Jumlah laporan Pengecekan dan Pemantauan TLHP APF serta penanganan kasus pengaduan pada Unit kerja Pemprov dan Kab/Kota se Sumut	24	set	7	set	29%
7. Frekwensi pelaksanaan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Kali	1	Kali	100%
Pemerintah (LAKIP) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	50	SKPD	50	SKPD	100%

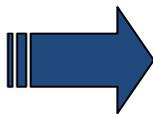
INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
8. Frekwensi pelaksanaan BINTEK dan Sosialisasi tentang Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja dilingkungan Pemprov	3	Kali	3	Kali	100%
sesuai Permenpan No. 29 Thn 2010					
Tingkat pelayanan umum dalam rangka pelayanan publik					
a Frekwensi koordinasi antar instansi pemerintah terkait proses pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	3	Kali	3	Kali	100%
b Frekwensi pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap ijin yang diterbitkan	2	Kali	2	Kali	100%
c Frekwensi pelaksanaan penilaian terhadap Unit-unit Pelayanan		4 Kali			#DIV/0!
Tingkat pengembangan dan penataan kelembagaan yang efektif					
a Frekwensi evaluasi dan pembinaan organisasi perangkat daerah yang dibentuk	1	Kali	1	Kali	100%
- Frekwensi evaluasi dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007	1	Kali	1	Kali	100%
- Frekwensi Evaluasi Kelembagaan Staf Ahli Kab/Kota	1	Kali	1	Kali	100%
b Frekwensi pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap ketersediaan penyusunan TUPOKSI Organisasi Perangkat Daerah dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	1	Kali	1	Kali	100%
c Jumlah Kelembagaan SKPD Pemerintah Daerah yang meningkat dengan baik	50	SKPD Pemprov	50	SKPD Pemprov	100%
Tingkat penataan ketatalaksanaan					
a Frekwensi evaluasi tata naskah dinas	1	Kali	1	Kali	100%
b Frekwensi pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dibidang ketatalaksanaan	2	Kali	2	Kali	100%
Persentase penempatan dan pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan tingkat kompetensi PNS pada masing-masing jenjang dan jenis jabatan :	100	%	80	%	80%
a Frekwensi Penyelenggaraan Seleksi Praja IPDN	1	Kali	1	Kali	100%
b Jumlah Calon Praja yang lolos seleksi penerimaan Praja IPDN	1250	Org	1003	Org	80.24%
c Jumlah PNS yang diambil sumpah PNS	700	Org	700	Org	100%
d Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Outbond	400	Org	349	Org	87.25%
e Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Quality Mapping dalam rangka peningkatan kualitas pejabat pada masing-masing jenjang jabatan Struktural	400	Org	296	Org	74%
f Jumlah PNS yang tugas belajar pada STIA LAN, UGM dan IPB	24	Org	3	Org	12.50%
g Frekwensi pelaksanaan seleksi	3	Kali	3	Kali	100%
Diklat Pim Tk. II, III dan IV	75	Org	57	Org	76%
h Jumlah PNS yang tugas belajar S2	35	Org	15	Org	42.86%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
i Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis :	540	Org	325	Org	60.19%
- Diklat Teknis Administrasi Kependudukan	30	Org	28	Org	93%
- Diklat Teknis Bendahara Dana Kontribusi	120	Org	90	Org	75%
- Diklat Teknis Sekretaris Desa Dana Kontribusi	300	Org	117	Org	39%
- Diklat Teknis Kepariwisata	30	Org	30	Org	100%
- Diklat Evakuasi Dalam Penanggulangan Bencana	60	Org	60	Org	100%
j Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	150	Org	150	Org	100%
- Diklat Fungsional Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	30	Org	30	Org	100%
- Diklat Fungsional Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Guru	30	Org	30	Org	100%
- Diklat Teknis Sekretaris Desa Dana Kontribusi	30	Org	30	Org	100%
- Diklat Teknis Kepariwisata	30	Org	30	Org	100%
- Diklat Fungsional Dasar Umum Penyuluh Pertanian	30	Org	30	Org	100%
k Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	2442	Org	1347	Org	55%
- Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan III melalui dana APBD Murni	70	Org	65	Org	93%
- Diklat Pra Jabatan CPNS Gol I/II Dana Kontribusi	1050	Org	490	Org	47%
- Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan III Dana Kontribusi	1322	Org	792	Org	60%
l Frekwensi Pembinaan dalam Pengangkatan Jabatan Sekda	12	Kali	12	Kali	100%
Provinsi, Kab/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan	1	Pemprov	1	Pemprov	100%
Kab/Kota se-Sumatera Utara	33	Kab/Kota	33	Kab/Kota	100%
m Frekwensi fasilitasi PNS dari Kanreg VI BKN Medan dlm rangka dan Oktober	2	kali	2	kali	100%
Penyelesaian usul Kenaikan Pangkat PNS Pemprovsu dan Pemkab/Kota se-Sumatera Utara Periode April					
n Evaluasi pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemprovsu	1	Pemprov	1	Pemprov	100%
dan Kab/Kota se-Sumatera Utara	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan					
a Pelaksanaan PROLEGDA	10	Draft RANPERDA	4	Draft RANPERDA	40%
b Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi	10	Draft RANPERDA	10	Draft RANPERDA	100%
c Jumlah Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan	100	Produk Hukum Daerah	75	Produk Hukum Daerah	75%
dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi		Kab/ Kota		Kab/ Kota	
Tingkat penegakan supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
a Jumlah perkara dan kasus-kasus hukum yang ditangani dengan baik	10	Perkara	9	Perkara	90.00%

CAPAIAN PENSERTAS PENERAPAN TERCIPTANYA TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghendaki transparansi, akuntabel dan bebas KKN dalam rangka mempercepat tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kesungguhan pemerintah mulai dari level tingkat pemerintahan terendah hingga tingkat Pemerintah Pusat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

5. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penilaian dan Pembinaan Kecamatan terbaik se Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pemantapan Kader Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Dengan Pembekalan Teknis.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemantapan Kader Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Dengan Pembekalan Teknis Pelaksanaan Tugas Matriks Hansip Kantor Gubsu.
- 2) Pemantapan Keseragaman Aparat Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pemerintah.
- 3) Rakor Peningkatan Kompetensi Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa.

OTONOMI DAERAH

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

7. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2011.
- 2) Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2011.

8. Program Pembinaan Otonomi Daerah, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- 2) Evaluasi Pengembangan dan Penyusunan Data Base Daerah Otonom Baru (EPPDBDOB).
- 3) Koordinasi dan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW).
- 4) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Provinsi.
- 5) Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia.
- 6) Penelitian Teknis Usul Pemekaran Daerah.
- 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat APPSI.
- 8) Peringatan Hari Otonomi Daerah XVI Tahun 2012.
- 9) Orientasi/Pembekalan bagi Daerah Dalam Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2012.
- 10) Penyusunan dan Pengembangan Data Pelaporan Informasi LPPD Tahun 2011.
- 11) Mendukung Program Visit IMT-GT Year 2012 di Provinsi Sumatera Utara.
- 12) Komparasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2011.
- 13) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- 14) Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.
- 15) Jaringan Kerja Pembinaan Pendapatan Asli Daerah ke Provinsi Kalimantan Barat.
- 16) Fasilitasi Penerapan Kajian Akademis Aspirasi Draf Kerjasama.
- 17) Kerjasama Dengan Asosiasi.
- 18) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Danau Toba.
- 19) Desk Pilkada.

- 20) Operasionalisasi Sekretariat TKKSD Provsu.
- 21) Monitoring dan Evaluasi Keputusan Gubsu No. 976/1293/K/ 2009 tentang Penetapan Perkiraan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 22) Rapat Koordinasi antara Pemprovsu dengan Kabupaten/Kota, Kanwil DJP Sumut II, KPP Pratama tentang Penerimaan PBB dan BPHTB Kabupaten/Kota.
- 23) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pungutan BPHTB Kabupaten/Kota.
- 24) Diseminasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

- **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan Penataan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan Buku Profil Jabatan Fungsional PNS di lingkungan Pemprovsu.
- 3) Pelaksanaan Pembinaan Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
- 4) Penyusunan Buku Pedoman Jabatan Fungsional Umum PNS di lingkungan di lingkungan Pemprovsu.
- 5) Pembinaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota.
- 6) Pelaksanaan Pembinaan Analisis Jabatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7) Pembinaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota.
- 8) Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 9) Inventarisasi, Identifikasi Permasalahan dan Data Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 10) Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Pembinaan Uraian Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 12) kajian dan Analisis Persiapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- 13) Kajian dan Analisis Persiapan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
- 14) Revisi Peraturan Daerah Sumatera Utara.
- 15) Pembenahan, Penataan dan Pengelolaan Arsip.
- 16) Bimtek tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.
- 17) Bimtek tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.
- 18) Pelaksanaan Seleksi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Umum di lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota sebagai peraih Citra Pelayanan Prima Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- 19) Pembinaan PPTSP (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Surat Menpan Nomor 24 Tahun 2006.
- 20) Sosialisasi dan Penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 21) Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 22) Pembentukan Satgas Pemantau dan Pencanaan Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di lingkungan Pemprovsu.
- 23) Pembentukan Tim Pakar Gubernur Sumatera Utara.

- 24) Rapat Kerja bidang Analisa Jabatan di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 25) Sosialisasi Pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara 1 Angkatan.
- 26) Rakernas Forsesdasi.
- 27) Kajian dan Analisis Persiapan Pembentukan Rumah Sakit Haji Medan.

Permasalahan :

- 1) Hasil evaluasi dan pengendalian atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dan ditetapkan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara belum memahami penomenklaturan lembaga dan memahami ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Pejabat kabupaten/kota yang khusus menangani pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah selalu silih berganti sehingga penataan organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan materi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada daerah kabupaten/kota tentang penataan organisasi perangkat daerah.

- 2) Melaksanakan himbauan kepada daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyerasian dan penyesuaian kelembagaan organisasi perangkat daerah.
- 3) Agar para pejabat kabupaten/kota yang menangani kelembagaan organisasi perangkat daerah dapat meningkatkan intensitas konsultasi dan asistensi ke Pemerintah Provinsi.

- **Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara**, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyusunan Penetapan Kinerja Gubsu dan Biro Organisasi Setdaprovsu.
- 2) Penyusunan LAKIP dan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2011.
- 3) Bimtek Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Pemprovsu.
- 4) Sosialisasi PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan dari Pergub No. 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP.
- 7) Penyusunan LAKIP Sekdaprovsu dan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2011.
- 8) Bimtek SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Pergub No. 33 Tahun 2011.

Permasalahan :

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sumatera Utara dibidang 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja belum sepenuhnya mengacu kepada SAKIP.
- 2) Indikator kinerja yang dirumuskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Penetapan Kinerja (TAPKIN) belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD, sehingga kinerja Satgas SPIP Provinsi belum optimal.

Solusi :

- 1) Perlu penyempurnaan RPJMD (melakukan revisi terhadap RPJMD), dalam rangka penyusunan LAKIP sebagaimana hasil evaluasi.
- 2) Perlu penyempurnaan perumusan indikator kinerja. Perumusan Indikator Kinerja mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang pembentukan Satgas SPIP pada masing-masing SKPD lingkup Pemprov

Capaian kinerja Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Organisasi Perangkat Daerah dari 33 (tiga puluh tiga) daerah dan masing-masing daerah mempersiapkan 5 (lima) Peraturan Daerah, sehingga berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) Perda telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 2) Dalam rangka penanganan urusan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar terhadap Pemerintah Sumatera Utara menerima pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan yang sebelumnya berbentuk Yayasan sesuai dengan Akte Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Alina Hanum Nasution, SH No. 5 tanggal 3 Juni 1998 hal Pendirian Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan penetapan Kelas B, yang penetapannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemprov dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (sebagai penyesuaian dan penyerasian dari pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012), yang dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagai pendukung Ranperda dan Ringkasan Eksekutif Kajian dan Analisis untuk dibahas bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi wilayah berbatasan dengan laut dan negara lain atau luar negeri sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengamanahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Perbatasan Nasional dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan lembaga tersebut dan telah menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Naskah Akademik dan executive summary kajian tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi.

4) Pembentukan Lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara belum dapat ditindak lanjuti pembentukannya, karena belum didukung oleh payung hukum yang kuat, namun demikian beberapa hasil yang telah dipersiapkan draft Ranperda Naskah Akademik dan Laporan Akhir Kajian dan Analisis tentang persiapan pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) telah dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 Juni 2012 di Provinsi Sumatera Utara (Medan). Hasil Rumusan Rakernas FORSESDASI tersebut untuk digunakan dan diajukan ke Pemerintah guna masukan atas Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Pemerintahan Desa sebagai menyahuti penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

6) Peningkatan Pelayanan Publik

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Biro Organisasi SetdaprovSU telah melaksanakan bimbingan teknis serta sosialisasi, yaitu :

a. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

b. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

c. Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

d. Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja Instansi Pemerintah.

dan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/10933 tanggal 7 Nopember 2012, telah diminta kepada para pimpinan SKPD Provinsi Sumatera Utara dan para Bupati/Walikota se Sumatera Utara agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Disamping itu, Biro Organisasi Setdaprovsu juga secara rutin melakukan pembinaan terhadap Unit Pelayanan Publik. Untuk tahun 2012, telah diajukan ke Kantor Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Jakarta beberapa unit pelayanan publik sebagai calon unggulan peraih Penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bakti Abdi Negara dari Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, yaitu :

- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara;
 - d. UPT Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
 - e. UPT Samsat Medan Utara (Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara);
 - f. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Telah tersusunnya Buku Profil Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dengan adanya buku ini seluruh Pejabat Fungsional yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terdata sebagai data base.
- 8) Telah tersusunnya Buku Pedoman Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan bagi PNS yang ingin berkarier di Jabatan Fungsional dapat mempedomani buku dimaksud yang menjelaskan syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional.
- 9) LAKIP Gubernur Sumatera Utara Tahun 2010 telah mendapat peringkat berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/524/M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai 50,11 dengan predikat nilai "CC" dan diberikan Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI.

10) LAKIP Gubernur Sumatera Utara Tahun 2011 telah mendapat peringkat berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/3247/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 Nopember 2012 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai 51,45 dengan predikat penilaian "CC" dan diberikan Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI.

11) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah di laksanakan Bimtek Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap SATGAS Pemprovsu dan seluruh SKPD Pemprovsu dan juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 120/743 tanggal 1 Pebruari 2013 Hal Pembentukan SATGAS SPIP SKPD Pemprovsu.

- **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**, Program ini memuat kegiatan :
 1. Pembinaan Penataan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kabupaten/Kota.
 2. Penyusunan Buku Profil Jabatan Fungsional PNS di lingkungan Pemprovsu.
 3. Pelaksanaan Pembinaan Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
 4. Penyusunan Buku Pedoman Jabatan Fungsional Umum PNS di lingkungan di lingkungan Pemprovsu.

5. Pembinaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan Pembinaan Analisis Jabatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Pembinaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota.

8. Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Inventarisasi, Identifikasi Permasalahan dan Data Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pembinaan Uraian Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
11. Kajian dan Analisis Persiapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
12. Kajian dan Analisis Persiapan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
13. Revisi Peraturan Daerah Sumatera Utara.
14. Pembinaan, Penataan dan Pengelolaan Arsip.
15. Bimtek tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.
16. Bimtek tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.
17. Pelaksanaan Seleksi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Umum di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota sebagai peraih Citra Pelayanan Prima Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
18. Pembinaan PPTSP (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Surat Menpan Nomor 24 Tahun 2006.
19. Sosialisasi dan Penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

20. Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
21. Pembentukan Satgas Pemantau dan Pencanaan Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di lingkungan Pemprov.
22. Pembentukan Tim Pakar Gubernur Sumatera Utara.
23. Rapat Kerja bidang Analisa Jabatan di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
24. Sosialisasi Pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara 1 Angkatan.
25. Rakernas Forsesdasi.
26. Kajian dan Analisis Persiapan Pembentukan Rumah Sakit Haji Medan.

Permasalahan :

- 1) Hasil evaluasi dan pengendalian atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dan ditetapkan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara belum memahami penomenklaturan lembaga dan memahami ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Pejabat kabupaten/kota yang khusus menangani pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah selalu silih berganti sehingga penataan organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan materi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada daerah kabupaten/kota tentang penataan organisasi perangkat daerah.
- 2) Melaksanakan himbauan kepada daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyerasian dan penyesuaian kelembagaan organisasi perangkat daerah.
- 3) Agar para pejabat kabupaten/kota yang menangani kelembagaan organisasi perangkat daerah dapat meningkatkan intensitas konsultasi dan asistensi ke Pemerintah Provinsi.

• ***Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara***, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyusunan Penetapan Kinerja Gubsu dan Biro Organisasi Setdaprovsu.
- 2) Penyusunan LAKIP dan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2011.
- 3) Bimtek Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Pemprov.
- 4) Sosialisasi PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan dari Pergub No. 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP.
- 7) Penyusunan LAKIP Sekdaprovsu dan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2011.

- 8) Bimtek SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Pergub No. 33 Tahun 2011.

Permasalahan :

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sumatera Utara dibidang 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja belum sepenuhnya mengacu kepada SAKIP.
- 2) Indikator kinerja yang dirumuskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Penetapan Kinerja (TAPKIN) belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD, sehingga kinerja Satgas SPIP Provinsi belum optimal.

Solusi :

- 1) Perlu penyempurnaan RPJMD (melakukan revisi terhadap RPJMD), dalam rangka penyusunan LAKIP sebagaimana hasil evaluasi.
- 2) Perlu penyempurnaan perumusan indikator kinerja. Perumusan Indikator Kinerja mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang pembentukan Satgas SPIP pada masing-masing SKPD lingkup Pemprov

CAPAIAN PENANGANAN KASUS-KASUS PENGADUAN MASYARAKAT

Sampai dengan akhir Desember 2012 telah melakukan pemeriksaan terhadap 81 OBRIK (81 Set LHP). Berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sampai Desember 2012, dari 220 saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, 33 saran dalam kategori 'Selesai' (15 %), Dalam Proses 2 saran (0,90 %) sedangkan 185 saran (84,1 %) kategori 'Belum' ada tindaklanjutnya.

Dari jumlah kerugian/kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp. 454.837.420,91 telah ditarik sebesar Rp. 50.858.063,21 (11,18%) sedangkan sisanya Rp 403.379.357,91 (88,82 %) masih dalam proses penyelesaian dan akan dilaksanakan tindak lanjutnya di tahun 2013 ini.

Sampai dengan akhir Desember 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 OBRİK.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sampai Desember 2011, dari 813 saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, 392 saran dalam kategori 'Selesai' (48,22%), Dalam Proses 121 saran (14,88%) sedangkan 300 saran (36,90 %) kategori 'Belum' ada tindaklanjutnya.

Dari jumlah kerugian/kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp 41.083.685.270,64, telah ditarik sebesar Rp 1.794.797.053,91 (4,4 %) sedangkan sisanya Rp. 39.288.888.216,73 (95,6 %) masih dalam proses penyelesaian.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSAKAN

- Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program ini memuat kegiatan :
 - 1) Pendukung Kegiatan Sekretariat Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
 - 2) Evaluasi dan Monitoring Terhadap Penyelesaian Laporan Keuangan pada Instansi Pemprov.
 - 3) Pelatihan Pengawasan Kantor Sendiri.
 - 4) Pelatihan Pengembangan Tenaga Auditor dan Aparatur Pengawasan.
 - 5) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 6) Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Serentak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
 - 7) Pemeriksaan Reguler pada Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/RSU Jiwa.

- 8) Pemeriksaan Reguler pada Dinas-Dinas Unit Kerja Tk. I Pemprov.
 - 9) Pemeriksaan Reguler pada Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - 10) Pemeriksaan Reguler pada Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
 - 11) Pemeriksaan Reguler pada Kantor Penghubung di Jakarta.
 - 12) Evaluasi Proyek/Program Dinas Pemprov dan Proyek Dinas Bantuan Provinsi di Kabupaten/Kota.
 - 13) Evaluasi Lakip Instansi Eselon II Pemerintah Prov.
 - 14) Review pada Laporan Keuangan Gubernur Sumatera Utara.
-
- 15) Pendataan Terhadap Pegawai Yang Telah Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengecekan Nilai Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Prov.
 - 16) Pengelolaan dan Pelaporan LP2P di Lingkungan Pemprov.
 - 17) Koordinasi dan Pembahasan TLHP Inspektorat Prov dan Kasus Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja Tk. I.
 - 18) Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan Obrik Pimpinan Instansi Pemprov.
 - 19) Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara di pusatkan pada 3 Lokasi Se Sumatera Utara.
 - 20) Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen Lainnya di Jakarta.
 - 21) Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Tingkat Regional di Luar Provinsi.
 - 22) Pengecekan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF dan Itjen Departemen serta Kasus Pengaduan Masyarakat pada Unit Kerja Prov dan Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Utara.
 - 23) Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan PKPT Tahunan Itprov dengan Inspektorat Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara.
 - 24) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah.
 - 25) Rekonsiliasi Pengesahan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) Inspektorat Prov dengan Inspektorat Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara.
 - 26) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional.

- 27) Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Menpan, Sekretariat Negara serta Itjen-Itjen Departemen.
- 28) Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 29) Koordinasi Program Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Realisasi PKPT pada Inspektorat Kabupaten/ Kota.
- 30) Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran Inspektorat Provsu.
- 31) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengawasan Yang Lebih Konprehensif.
- 32) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 33) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan :

- 1) Komitmen dan integritas para Pejabat Pengawas/Auditor secara terus menerus masih perlu ditingkatkan.
- 2) Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang relatif masih kurang.
- 3) Koordinasi Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum (APH) belum efektif. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sehingga adakalanya masih terjadi tumpang tindih pemeriksaan.
- 4) Masalah penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan kurang optimal, hal ini terjadi karena Pimpinan Satuan Kerja sebagai penanggungjawab tindak lanjut masih ada yang lalai dan kurang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Solusi :

- 1) Meningkatkan komitmen dan integritas pengawas / auditor dengan mengikuti Bimbingan Teknis maupun

- Diklat yang berhubungan dengan pengawasan baik di Provinsi maupun di Pusat
- 2) Mengusulkan peningkatan volume sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan pada APBD Provinsi Sumatera Utara
 - 3) Mengoptimalkan koordinasi antara Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan aparat pengawasan di daerah maupun di Pusat
 - 4) Lebih memacu Pimpinan SKPD sebagai penanggungjawab tindak lanjut untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga penyelesaian tindak lanjut tidak berlarut-larut.

CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL SESUAI TINGKAT KOMPETENSI

Dalam konteks pemerintahan yang kompetitif, pemberian otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tersirat juga dimaksudkan agar masing-masing Pemerintah Daerah secara otonom mampu mempersiapkan diri memasuki era pemerintahan yang kompetitif tersebut. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tersediannya aparat Pemerintah yang profesional dan berkualitas, karena subyek yang berkompetisi adalah manusia dan obyek yang dikompetisikan adalah buah karya cipta manusia itu sendiri. Untuk itu diperlukan perhatian dari semua pihak dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah. Upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu pencapaian target visi/misi Gubernur Sumatera Utara yaitu agar rakyat tidak bodoh, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013 dan Renstra Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013, yaitu : Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan utama untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- ***Program Pendidikan Kedinasan***

Program ini memuat kegiatan :

Pendidikan Pasca Sarjana bagi PNS Provsu dan Kabupaten/Kota.

- ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bantuan Diklatpim Tk. II, Tk. III, dan Tk. IV.
- 2) Seleksi Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS.
- 3) Seleksi Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II se Sumatera Utara.
- 4) Rapat Kerja Kepegawaian Antara Pemprovsu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 5) Studi Banding Tentang Tata Cara Pelaksanaan Baperjakat dan Implementasi Permendagri No. 5 tahun 2005 ke Provinsi Sumatera Barat (Padang).

Permasalahan :

Masih berlaku moratorium CPNS, namun masih terus konsultasi ke Instansi Pusat tentang penerimaan CPNS.

Solusi :

Menunggu dicabut moratorium CPNS.

- ***Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi (Pelaksanaan penilai tim penganugerahan Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi PNS dilingkungan Pemprovsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera utara).
- 2) Bantuan PNS Tugas Belajar pada STIA LAN, UGM, IPB.
- 3) Pembinaan Dalam Pengangkatan Jabatan Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

- 4) Biaya Pembinaan Praja IPDN dan Menghadiri Pelantikan Praja IPDN.
- 5) Lanjutan *cross check* (penelitian) Terhadap Legalitas Ijazah Pejabat/PNS gol. III/a keatas yang Berlatarbelakang Pendidikan Sarjana Muda dan Sarjana.
- 6) Penyelenggaraan Seleksi Praja IPDN.
- 7) Evaluasi Pengangkatan Tenaga Honorer untuk diangkat Menjadi CPNS Dilingkungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 8) Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS secara terpadu oleh Tim Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode April dan Oktober .
- 9) Penelitian dan Pengusulan Tenaga Honorer yang akan diangkat Menjadi Calon PNS.
- 10) Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian,Pranata Komputer, Arsiparis bagi PNS dilingkungan Pemprov.

- ***Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Monitoring Perpindahan Tugas PNS di lingkungan Pemprov.
- 2) Pemulangan Pegawai yang Pensiun (Pemberian Bingkisan dan Plakat Ucapan Terima Kasih Gubsu) kepada PNS yang Memasuki Pensiun Dilingkungan Pemprov.
- 3) Memfasilitasi PNS yang Mengikuti Diklat Depdagri dan Departemen Lainnya.
- 4) Memfasilitasi Penyampaian Peraturan-Peraturan Terbaru Jabatan Fungsional ke Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 5) Biaya Memfasilitasi PNS ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara Dalam Rangka Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se

Sumatera Utara periode April dan Oktober 2012 untuk gol IV/c keatas.

- 6) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di lingk. Pemprovsu Dalam Rangka Pelaksanaan PP.41 Tahun 2007.
- 7) Biaya Pelaksanaan Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilingkungan Pemprovsu Sesuai SK Gubsu No. 800/1489/K/2009 tgl 6-5-2009.
- 8) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Disiplin PNS dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan Pemprovsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara).

- ***Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembuatan Listing PNS yang Mencapai Usia Pensiun Dilingkungan Pemprovsu.
- 2) Peningkatan Administrasi PNS yang Akan Memasuki Pensiun Dilingkungan Pemprovsu.
- 3) Pelaksanaan Baperjakat Provsu berdasarkan SK Gubsu No. 800/1562/2008 tgl 30-7-2007 (Tim Pejabat Pelaksana) dan No. 800/107/2008 tgl 8-1-2008 (Tim Sekretaris).
- 4) Penyelesaian Listing Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April dan Oktober.
- 5) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS dilingkungan unit kerja Pemprovsu.
- 6) Pembuatan Buku Jabatan Struktural Dilingkungan Unit Kerja Pemprovsu.

- **Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Memfasilitasi Penyelesaian Pensiun PNS gol/Ruang IV/c keatas ke BKN dan Sekretaris Negara.
- 2) Sosialisasi Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri.
- 3) Pengambilan Sumpah/Janji PNS.
- 4) Mengirimkan Peserta Untuk Mengikuti Rakor, Bimtek, Sosialisasi atau Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Jabatan Struktural atau Fungsional yang Dilaksanakan oleh Instansi Pusat/Instansi Pembina.
- 5) Penyelenggaraan *Outbound* bagi Pejabat di lingkungan Pemprov.
- 6) *Quality Mapping* bagi PNS di lingkungan Pemprov.
- 7) Rekonsiliasi Data PNS di lingkungan Pemprov.
- 8) Konsultasi ke Instansi Pusat (BAPPENAS dan Depdagri) dalam rangka penyusunan program kerja BKD Prov.
- 10) Pembuatan Biodata Pejabat Struktural di lingkungan Pemprov.
- 11) Sosialisasi Pergub tentang Tugas Belajar bagi PNS Pemprov.

- **Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Analisis Kebutuhan Diklat.
- 2) Penyusunan dan Pengkajian Kurikulum/Silabi.
- 3) Penyusunan dan Pengkajian Modul Diklat.
- 4) Sosialisasi dan Implementasi ISO 9001-2008.
- 5) Peningkatan Kualitas Widyaiswara/ Tenaga Pengajar.
- 6) Penyusunan Program Diklat Tahun 2012.
- 7) Peningkatan Kualitas Pejabat Struktural/staf melalui diklat/ seminar.
- 8) Penerbitan Buletin Media Diklat.
- 9) Dukungan Pembinaan Pola Kemitraan Diklat Prov.
- 10) ISO 9001 : 2008.

- 11) Studi Banding Kediklatan ke Badiklat Energi dan Sumber Daya Mineral Bandung dan Badan Diklat Perhubungan Bogor.
- 12) Diklat Teknis Naskah Dinas.
- 13) Diklat Teknis Administrasi Kependudukan.
- 14) Diklat Teknis Administrasi Kearsipan.
- 15) Diklat Teknis Analisis Jabatan.
- 16) Diklat Manajemen Kesekretariatan.
- 17) Diklat Teknis Sekretaris Desa Dana Kontribusi.
- 18) Diklat Teknis Kepariwisataaan.
- 19) Diklat Fungsional Kepala/Calon Kepala SMA.
- 20) Diklat Fungsional Management Of Training (MOT).
- 21) Diklat Fungsional Trainer Of Course (TOC).
- 22) Diklat Prajabatan CPNS Gol I/II.
- 23) Diklat Prajabatan CPNS Gol. III.
- 24) Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II Dana Kontribusi.
- 25) Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Dana Kontribusi.
- 26) Diklat Kepemimpinan Tingkat VI Dana Kontribusi.
- 27) Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dana Kontribusi.

Permasalahan :

- 1) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan diklat masih rendah, khususnya diklat pra jabatan.
- 2) Kualitas dan kuantitas sarana/prasarana masih rendah.

Solusi :

- 1) Oleh karena keterbatasan dana APBD Sumatera Utara sebahagian besar CPNS khususnya dari pemerintah kabupaten/kota mengikuti diklat pra jabatan dibiayai oleh instansi pengirim peserta.
- 2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya sarana/ prasarana adalah melaksanakan Diklat dengan meminjam tempat di luar Badan Diklat Provsu.
- 3) Disarankan untuk membangun gedung Badan Diklat Provsu yang representatif di areal eks rumah dinas yang telah dikosongkan sejak bulan Juni 2012.

CAPAIAN PENANGANAN KASUS-KASUS PENGADUAN MASYARAKAT

Sampai dengan akhir Desember 2012 telah melakukan pemeriksaan terhadap 81 OBRİK (81 Set LHP). Berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sampai Desember 2012, dari 220 saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, 33 saran dalam kategori 'Selesai' (15 %), Dalam Proses 2 saran (0,90 %) sedangkan 185 saran (84,1 %) kategori 'Belum' ada tindaklanjutnya.

Dari jumlah kerugian/kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp. 454.837.420,91 telah ditarik sebesar Rp. 50.858.063,21 (11,18%) sedangkan sisanya Rp 403.379.357,91 (88,82 %) masih dalam proses penyelesaian dan akan dilaksanakan tindak lanjutnya di tahun 2013 ini.

Sampai dengan akhir Desember 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 OBRİK.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sampai Desember 2011, dari 813 saran/rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, 392 saran dalam kategori 'Selesai' (48,22%), Dalam Proses 121 saran (14,88%) sedangkan 300 saran (36,90 %) kategori 'Belum' ada tindaklanjutnya.

Dari jumlah kerugian/kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp 41.083.685.270,64, telah ditarik sebesar Rp 1.794.797.053,91 (4,4 %) sedangkan sisanya Rp. 39.288.888.216,73 (95,6 %) masih dalam proses penyelesaian.

- ***Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara***

Program ini memuat kegiatan :

1. Pendukung Kegiatan Sekretariat Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
2. Evaluasi dan Monitoring Terhadap Penyelesaian Laporan Keuangan pada Instansi Pemprov.
3. Pelatihan Pengawasan Kantor Sendiri.
4. Pelatihan Pengembangan Tenaga Auditor dan Aparatur Pengawasan.
5. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Serentak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemeriksaan Reguler pada Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/RSU Jiwa.
8. Pemeriksaan Reguler pada Dinas-Dinas Unit Kerja Tk. I Pemprov.
9. Pemeriksaan Reguler pada Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Pemeriksaan Reguler pada Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
11. Pemeriksaan Reguler pada Kantor Penghubung di Jakarta.
12. Evaluasi Proyek/Program Dinas Pemprov dan Proyek Dinas Bantuan Provinsi di Kabupaten/Kota.
13. Evaluasi Lakip Instansi Eselon II Pemerintah Prov.
14. Review pada Laporan Keuangan Gubernur Sumatera Utara.
15. Pendataan Terhadap Pegawai Yang Telah Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengecekan Nilai Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Prov.
16. Pengelolaan dan Pelaporan LP2P di Lingkungan Pemprov.
17. Koordinasi dan Pembahasan TLHP Inspektorat Prov dan Kasus Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja Tk. I.

18. Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan Obrik Pimpinan Instansi Pemprov.
19. Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten /Kota se Sumatera Utara di pusatkan pada 3 Lokasi Se Sumatera Utara.
20. Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen Lainnya di Jakarta.
21. Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Tingkat Regional di Luar Provinsi.
22. Pengecekan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF dan Itjen Departemen serta Kasus Pengaduan Masyarakat pada Unit Kerja Prov dan Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Utara.
23. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan PKPT Tahunan Itprov su dengan Inspektorat Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara.
24. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah.
25. Rekonsiliasi Pengesahan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) Inspektorat Provsu dengan Inspektorat Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara.
26. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional.
27. Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Menpan, Sekretariat Negara serta Itjen-Itjen Departemen.
28. Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
29. Koordinasi Program Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Realisasi PKPT pada Inspektorat Kabupaten/ Kota.
30. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengawasan Yang Lebih Konprehensif.

Permasalahan :

- 1) Komitmen dan integritas para Pejabat Pengawas/Auditor secara terus menerus masih perlu ditingkatkan.
- 2) Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang relatif masih kurang.
- 3) Koordinasi Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum (APH) belum efektif. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sehingga adakalanya masih terjadi tumpang tindih pemeriksaan.
- 4) Masalah penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan kurang optimal, hal ini terjadi karena Pimpinan Satuan Kerja sebagai penanggungjawab tindak lanjut masih ada yang lalai dan kurang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Solusi :

- 1) Meningkatkan komitmen dan integritas pengawas / auditor dengan mengikuti Bimbingan Teknis maupun Diklat yang berhubungan dengan pengawasan baik di Provinsi maupun di Pusat
- 2) Mengusulkan peningkatan volume sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan pada APBD Provinsi Sumatera Utara
- 3) Mengoptimalkan koordinasi antara Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan aparat pengawasan di daerah maupun di Pusat
- 4) Lebih memacu Pimpinan SKPD sebagai penanggungjawab tindak lanjut untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga penyelesaian tindak lanjut tidak berlarut-larut.

CAPAIAN PENANGANAN SENGKETA HUKUM

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam melaksanakan antara lain :

- 1) Membangun Organisasi Pembelajaran (Building Learning Organization);
- 2) Menjalin kerjasama yang baik dengan unit kerja dari Lembaga terkait di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Membangun kerjasama yang baik dengan Perguruan Tinggi, Instansi Penegak Hukum, Lembaga Pemerintah terkait dan Lembaga Profesional serta Fungsional Masyarakat;
- 4) Meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan Formulasi Sosialisasi dan Penerapan Kebijakan Internal dan Kebijakan Publik.

Hasil – hasil yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Hukum
Pelaksanaan Program Legislasi Rencana Peraturan Perundang-undangan Tahun 2012, hasil yang dicapai yaitu tersusunnya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah. Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah menyelaraskan 181 (seratus delapan puluh satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pembinaan Peraturan Daerah
Revisi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan Revisi 7 (tujuh) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota. Untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan Klarifikasi 4 (empat) Perda Kabupaten/Kota. Monitoring Tindak Lanjut Klarifikasi dan Evaluasi Ranperda dan Perda Kabupaten/Kota. Untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan monitoring terhadap 6 (enam) Kabupaten/Kota. Rapat Koordinasi Kabag Hukum Dan Sekwan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi Kabag Hukum

Dan Sekwan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dengan peserta sebanyak 66 (enam puluh enam) orang.

3) Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM.

Lokakarya dan Pelatihan RANHAM Daerah Kabupaten/Kota, untuk Tahun Anggaran 2012 dengan melakukan Lokakarya dan Pelatihan RANHAM Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) kali pertemuan dengan jumlah peserta 90 (sembilan puluh) orang.

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota, untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan monitoring terhadap 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, untuk Tahun Anggaran 2012 diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dihadiri oleh Kabag Hukum dan Sekwan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang.

4) Pelayanan dan Bantuan Hukum

a. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang semakin meningkat berakibat timbulnya gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara sebagai subjek Hukum keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Untuk Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Biro Hukum Setdaprovsu telah melaksanakan dan melanjutkan penanganan perkara di pengadilan dalam gugatan perdata maupun gugatan peradilan tata usaha negara baik pada tingkat I (Pengadilan Negeri dan PTUN), serta tingkat Banding (Pengadilan Tinggi dan PT TUN) serta tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dengan data perkara s.d. Desember 2012 sebanyak 10 perkara.

- b. Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk Penanganan Perkara di Peradilan.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Aparatur Pemerintah dalam rangka Penanganan Perkara baik Perkara Perdata maupun Perkara Tata Usaha Negara di Peradilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diselenggarakan pertemuan koordinasi teknis kuasa hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Dengan adanya Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah ini diharapkan terlatihnya aparatur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghadapi gugatan dan penanganan perkara di peradilan.

- c. Kerjasama Penanganan Sengketa Hukum antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Untuk Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan Kerjasama Penanganan Sengketa Hukum antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga bantuan Hukum (LBH) sebanyak 10 kasus.

- d. Kerjasama Penanganan Perkara Antara Pemprovsu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum secara lebih cepat, mudah dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh keadilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membantu masyarakat miskin memperoleh keadilan.

- 5) Peningkatan Kualitas dan profesi Hukum.

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemprovsu melalui pemantauan dan pembinaan PPNS di

Lingkungan Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik. Kelompok Kerja Hukum (akademisi, konsultan hukum) adalah dengan berkonsultasi dengan 4 orang akademisi, konsultan hukum dalam pembuatan dan penyusunan produk hukum daerah.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- ***Program Pelayanan dan Bantuan Hukum***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penanganan Perkara dan Tata Usaha Negara Bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov.
- 2) Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk Penanganan Perkara di Peradilan.
- 3) Kerjasama Penanganan Sengketa Hukum Antara Pemprov dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- 4) Kerjasama Penanganan Perkara Antara Pemprov dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- 5) Bintek Paralegal KDRT.

- ***Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemantauan Pemberdayaan PPNS di Lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 2) Pembinaan PPNS di Lingkungan Pemprov.
- 3) Kelompok Kerja Hukum (Akademisi, Konsultan Hukum).
- 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- 5) Kelompok Kerja Analisis Hukum/Legal Opinion Pemprov.

Permasalahan :

- 1) Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal.

- 2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal.
- 3) Pelaporan kegiatan panitia pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota belum maksimal dilaksanakan.

Solusi :

- 1) Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
- 3) Perlu adanya peningkatan peranan dan koordinasi Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara 2012 untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum.

Sasaran Strategis 3 :

MENINGKATNYA TATA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI

Pencapaian realisasi kinerja dari masing-masing indikator Kinerja Utama dan sub indikator dapat dilihat pada Tabel 47 di bawah ini :

**TABEL 47
CAPAIAN INDIKATOR**

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase peningkatan sistem transportasi dan penataan angkutan massal kota					
a Jumlah sarana/prasarana perhubungan dalam kondisi baik	15	%	15	%	100.00%
Persentase pengelolaan tata ruang perkotaan dan pedesaan serta permukiman					
- Peningkatan kualitas lingkungan dan mengurangi daerah genangan pada kawasan permukiman	91295	m'	94308	m'	103.30%
- Peningkatan aksesibilitas dan roda perekonomian masyarakat pedesaan di kawasan agropolitan	5900	m'	5900	m'	100.0%
- Penyediaan sarana air bersih pada daerah rawan air bersih	14	titik lokasi	14	titik lokasi	100%
- Peningkatan kualitas lingkungan dan mengurangi daerah genangan pada kawasan permukiman	11740	m'	11740	m'	100%
- Frekwensi pelaksanaan peningkatan kwalitas bangunan GSG	2	kali	1	kali	50%
dan Islamic Centre di Provsu	2	Unit	1	Unit	50%
- Frekwensi pelayanan kepada masyarakat	2	kali		kali	0.00%
- Meningkatkan prasarana dan sarana air limbah	1	paket	1	paket	100.00%
Persentase penataan lingkungan kumuh menjadi lingkungan sehat					
a Jumlah prasarana lingkungan perumahan	8	paket	8	paket	100%
b Jumlah ketersediaan standar harga dan buku rencana tindak pembangunan prasarana	2	buku	2	buku	100%
c Luas areal pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	120	Ha	120	Ha	100%
d Frekwensi pendataan masyarakat yang memiliki rumah layak huni	2	kali	2	kali	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan					
a Persentase peningkatan fisik jalan provinsi	3.38	%	3.38	%	100.00%
b Persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan Provinsi	18.87	%	23.37	%	123.85%
c Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Jaringan Jalan Provinsi sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman	100	%	100	%	100.00%
Persentase penataan iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan terhadap kelompok usaha kecil					
Persentase pembinaan UKM dan pembentukan wirausaha baru					
a Persentase produktivitas UKM	10	%	19.22	%	192.20%
b Jumlah koperasi yang berorientasi ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM	66	unit	3	unit	4.55%
c Jumlah wirausaha baru yang terbentuk	5	usaha	10	usaha	200%

CAPAIAN PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN MASSAL KOTA

Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah angkutan darat di Sumatera Utara tidak mengalami banyak perubahan, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan sepeda motor dan mobil penumpang jenis minibus seperti Avanza, Xenia dll. Jumlah angkutan umum darat pada tahun 2012 tercatat 9.292 unit terdiri dari AKDP MPU sebanyak 5.703 unit dan Mobil Bus Umum sebanyak 3.589 unit. Jumlah pergerakan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Tahun 2012 sebanyak 2.607.490 perjalanan dengan jumlah terbesar pada pergerakan di daerah Mebidang dan daerah perkotaan lainnya.

Dasar pelaksanaan kegiatan penimbangan adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pengendalian Kelebihan Muatan di Jembatan Timbang. Jenis tindakan yang tercantum dalam ketentuan Perda adalah Denda Atas Kelebihan Muatan sampai dengan 25% dari Jumlah Berat Yang Diiijinkan (JBI) dan Sewa Gudang dan Pemakaian Peralatan Bongkar Muat.

Dari hasil penindakan yang dilakukan pada 2012 terdapat kenaikan jumlah denda dan pelanggaran yang ditindak dibanding tahun 2011, sbb :

Tabel 48
Jenis Pelanggaran

Tahun	Denda Kelebihan	Sewa Gudang	Pelanggaran Dimensi	Lain-lain
2011	22.552.840.000	70.000.000	708 unit	242 unit
2012	24.405.240.000	70.000.000	560 unit	205 unit

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

yang ada setiap tahunnya melaksanakan penertiban di jalan bersama dengan jajaran Kepolisian. Selama tahun 2012 pelaksanaan penertiban didekatkan lokasinya dengan jembatan timbang yang ada dengan pertimbangan memudahkan penitipan kendaraan apabila diperlukan.

Adapun lokasi penertiban dan jumlah kendaraan yang ditindak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 49
Penindakan

No	Ruas Jalan	Jlh Penindakan
1	Medan-Tanjung Morawa	34
2	Tebing Tinggi-P.Siantar	20
3	Tebing Tinggi-Kota Pinang	107
4	Kota Pinang-Bts Riau	27
5	Kota Pinang-Gunung Tua	12
6	Medan-Langkat	33
7	Medan-Berastagi	19
Jumlah		257

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- ***Program Peningkatan Pelayanan Angkutan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- 2) Penyelenggaraan Sumut EXPO dan PRSU.
- 3) Bantuan Operasional Ferry roro di Kawasan Danau Toba.
- 4) Pelaksanaan seleksi WTN Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Pelaksanaan Seleksi AKUT dan Pelajar Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Pembuatan Master Plan Perkeretaapian Sumatera Utara.

- ***Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembangunan Pos Jaga Pelabuhan Laut Regional.
- 2) Pengadaan Fasilitas Pelabuhan Laut Regional.
- 3) Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air.
- 4) Perbaikan Permukaan Dermaga.
- 5) DED Pembangunan Terminal VIP/CIP.
- 6) Pengadaan Peralatan Keselamatan Pelayaran dan Pemeriksaan Kelaikan Kapal.

- ***Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan,***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.
- 2) Pengadaan dan Pemasangan Delineator.
- 3) Pengadaan dan Pemasangan APIIL/Warning Light.
- 4) Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan.
- 5) Pengadaan Paku Jalan.
- 6) Pengadaan dan Pemasangan VMS.

Realisasi Pelaksanaan Program :

- ***Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 2) Pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Relokasi UPPKB.

CAPAIAN PERSENTASE PENGELOLAAN TATA RUANG PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program unggulan Gubernur Sumatera Utara yaitu Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 6.500 unit rumah sampai tahun 2014 dan pada tahun pertama 2012 dialokasikan sebanyak 1.500 rumah yang menyebar 8 (delapan) lokasi yaitu Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Sibolga, Padangsidimpuan dan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Pembinaan dan Sosialisasi permbangunan perumahan/permukiman di Provinsi Sumatera Utara serta Pilot Proyek pemberdayaan masyarakat di Desa Binaan PKK Pemprovsu.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Program Terkait Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws Permukiman Perbatasan Mebidang di Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Pembangunan Saluran Drainase kws Perbatasan Kota Medan-Deli Serdang di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.
- 3) Pembangunan Sarana Air Minum di Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Pembangunan Saluran Drainase kws Perbatasan Kota Medan-Deli Serdang di Patumbak.
- 5) Penataan Lingkungan kws Padat Penduduk Perumahan Veteran Kecamatan Percut Sei Tuan.
- 6) Penyediaan Sarana Air Bersih pada Daerah Rawan Air Bersih Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- 7) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws Permukiman Bangun Mulia-Balintang Kecamatan Sei Bingai.
- 9) Pembangunan Jalan Poros Kws Angropolitan Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Barat.

- 10) Pembangunan Saluran Drainase Primer di Desa Sidomulyo Kecamatan Pulau Bandring.
- 11) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Sp. Merbau Kecamatan Na IX-X.
- 12) Pemb. Jalan Poros Kws Agromaripolitan Kabupaten Batubara.
- 13) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Negeri Lama di Pangkatan.
- 14) Pembangunan saluran Drainase Jalan Lintas Gunung Tua-Sibuhuan kws Latosan Kecamatan Portibi.
- 15) Pembangunan saluran Drainase Jalan Lintas Penyabungan-Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal.
- 16) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Aek Natas.
- 17) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera di kws permukiman Langga Payung Kecamatan Sei Kanan.
- 18) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Gunung Tua-Labuhanbatu Selatan di Batang Baruar Julu-Jae.
- 19) Penyediaan Sarana Air Bersih pada Daerah Rawan Air Bersih di Kecamatan Dolok Pangaribuan.
- 20) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
- 21) Pembangunan Jalan Poros Kws. Agropolitan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbahas.
- 22) Penataan Lingkungan Permukiman Padat Penduduk di Sibuhuan dan Mompang Kabupaten Padang Lawas.
- 23) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu.
- 24) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Tanjung Tiram-Kuala Tanjung Kabupaten Batubara.
- 25) Penataan Lingkungan Kawasan Pantai Kota Pangurusan dalam rangka peningkatan kualitas air Danau Toba.
- 26) Pembangunan Saluran Drainase kws Simpang Tabusira Kecamatan Angkola Timur.
- 27) Pembuatan Drainase Jalan Ir. Sutami Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat.
- 28) Pembangunan Saluran Drainase kws Garonggang Kecamatan Angkola Timur.
- 29) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Paranginan Kecamatan Padangbolak.

- 30) Peningkatan Sarana Air Minum di Ibukota Pemekaran Sampai Batu Tambun Kecamatan Padang Bolak.
- 31) Penyediaan Sarana Air Bersih pada Daerah Rawan Air Bersih di Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 32) Pembangunan Sarana Air Bersih di Muaramais Kecamatan Kota Nopan.
- 33) Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan di Hajoran Kecamatan Padangbolak.
- 34) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Bonan Dolok-Lumban Pinasa Kecamatan Siabu.
- 35) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Gunung Tua-Langgapayung di kws Huta Lumbang Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 36) Penyediaan Sarana Air Bersih pada Daerah Rawan Air Bersih kws Bangun Purba Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 37) Peningkatan Kualitas Lingkungan Kws Simanosor Julu-Pesantren Darul Mursyid Kecamatan Saipar Dolok Hole Kab Tapanuli Selatan.
- 38) Penataan Lingkungan Padat Penduduk Kws jl. Widodo DS III-VI Karangsari Kecamatan Gunung Maligas.
- 39) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Gunung Tua-Siranggitgit Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 40) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas sp. Gunungtua-Sibuhuan di Kecamatan Padangbolak.
- 41) Pembangunan Sarana Air Bersih pada Daerah Rawan Air Bersih Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak.
- 42) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Latosan I Menuju Pekan Selasa Kecamatan Portibi.
- 43) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws Permukiman Padat Penduduk di Kabupaten Nias.
- 44) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Barus di Ute Mungkur I, II, III Kecamatan Kolang.
- 45) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws Permukiman Padat Penduduk Kabupaten Nias Selatan.
- 46) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera di Lumut-Aek Gambir Kecamatan Lumut.
- 47) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws permukiman padat penduduk Kabupaten Nias Barat.

- 48) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Pandan-Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 49) Peningkatan Kualitas Lingkungan kws Permukiman Padat Penduduk Kabupaten Nias Utara.
- 50) Pemagaran Kawasan Perkemahan Pramuka Sibolangit.
- 51) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Tomok-Pangurusan Kabupaten Samosir.
- 52) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera Porsea-Balige di Kecamatan Silaen-Sigumpar Kabupaten Tobasamosir.
- 53) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Kabanjahe - Sidikalang Kabupaten Dairi.
- 54) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sidikalang - Dolok Sanggul Kabupaten Dairi.
- 55) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Siborongborong-Tarutung di Park Sabungan Kecamatan Siborong-borong.
- 56) Pembangunan Saluran Drainase pada Jalan Lintas Siborongborong-Tarutung di Paniaran Kecamatan Sipoholon.
- 57) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Tarutung - Sibolga di Hutaraja Kecamatan Adiankoting.
- 58) Pembangunan Saluran Drainase pada Jalan Lintas Siborongborong - Tarutung di Desa Sitare Alaman Kecamatan Siborong-borong.
- 59) Pembangunan Sarana Air Bersih pada daerah rawan air bersih Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
- 60) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas di Ugan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.
- 61) Pembangunan Saluran Drainase pada Jalan Lintas kws Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu.
- 62) Pembangunan Saluran Drainase kws Baringin Simagomago Kecamatan Sipirok.
- 63) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Gunungsitoli-Teluk Dalam di Kabupaten Nias.
- 64) Pembangunan Saluran Drainase kws Permukiman Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
- 65) Pembangunan Saluran Drainase kws Permukiman Lotu Kabupaten Nias Utara.
- 66) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Sumuran Kec Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 67) Perbaikan Sarana Lingkungan kws Desa Paluh Subur dan Paluh Makna Kabupaten Deli Serdang.
- 68) Pembangunan Saluran Drainase Jalan lintas Kabanjahe - Sidikalang Kabupaten Dairi.
- 69) Pembangunan Saluran Drainase Jalan lintas Sumatera kws Silangit Kecamatan Siborong-borong.
- 70) Pembangunan Saluran Drainase Jalan lintas Balige - Lumbanjulu Kabupaten Tobasamosir.
- 71) Pembangunan Sarana Air Bersih Pada Daerah Rawan Air Bersih di IKK Garoga.
- 72) Penataan Lingkungan Permukiman Padat Penduduk kws Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.
- 73) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Tomok-Pangururan Kabupaten Samosir.
- 74) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Nainggolan-Pangururan Kabupaten Samosir.
- 75) Pembangunan Saluran Drainase kws Sipenggeng-Marancar Kecamatan Marancar.
- 76) Pembuatan Sarana Air Bersih di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe.
- 77) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Kabanjahe-Brastagi Kabupaten Karo.
- 78) Pembangunan Saluran Drainase jalan lintas Tapanuli Selatan-Tapanuli Tengah di Kecamatan Batangtoru.
- 79) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Huraba Kecamatan Siabu.
- 80) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Portibi Kecamatan Portibi .
- 81) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Sibaruang-Sihepang Kecamatan Siabu.
- 82) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 83) Revitalisasi Drainase Sebelah Kanan Jln. Jend. Sudirman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai .
- 84) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.
- 85) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Padangsidimpuan-Tapanuli Tengah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 86) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas kws Siharboguan dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- 87) Perbaikan Sarana Air Bersih di Paranjulu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 88) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begai.
- 89) Penataan Lingkungan Pemukiman Padat Penduduk Kota Padangsidempuan.
- 90) Penataan Lingkungan Pemukiman Padat Penduduk Kawasan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 91) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- 92) Penataan Lingkungan Pemukiman Padat Penduduk di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- 93) Penataan Lingkungan Pemukiman Padat Penduduk di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 94) Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Mebidang di Kecamatan Medan Sunggal.
- 95) Peningkatan Permukiman Kel. Mandala II Medan Denai.
- 96) Peningkatan Permukiman Gang Mustawi Lk.20 Kel.Tj. Mulia Medan Deli.

CAPAIAN PERSENTASE PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN

Terwujudnya Jalan Provinsi yang Mantap di Sumatera Utara dalam kondisi baik tahun 2012 dalam kondisi baik 1.272,49 Km, sedang 757,43 Km, rusak ringan 518,55 Km dan rusak berat 500,23 Km.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- ***Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Binjai - Timbang Lawang di Kabupaten Langkat.
- 2) Pembangunan Saluran Drainase pada Ruas Jalan Provinsi Jl. Gatot Subroto di Kota Binjai.
- 3) Peningkatan Jalan Provinsi Jl. Umar Baki /Pertanian di Kota Binjai.
- 4) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sp. Durian Mulo - Namu Ukur - Bts. Karo di Kabupaten Langkat.
- 5) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Medan - Delitua di Kota Medan / Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Deli Tua - Sp. Patumbak - Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang.
- 7) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Tanah Abang - Bts. Simalungun di Kabupaten Deli Serdang.
- 8) Biaya Pembebasan Tanah dan Pemberian Santunan untuk Pembangunan Jalan Non Tol.
- 9) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Batas Serdang Bedagai - Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai (DAK).
- 10) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Kuta Rakyat - Bts. Langkat di Kabupaten Karo.
- 11) Perbaikan Trase Ruas Jalan Provinsi Jurs. Kuta Rakyat - Bts. Langkat pada Sta. 111+500 di Kabupaten Karo.
- 12) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Ulu Merah - Batas Humbahas di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 13) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Bts. Asahan/Tj. Kasau - Bdr. Masilam - Perdagangan di Kabupaten Simalungun.
- 14) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar - Tiga Runggu di Kabupaten Simalungun (DAK).

- 15) Pelebaran Jalan Provinsi Jurs. Sp. Suka Rame - Sp. Jambu - Salak di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 16) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Bts. Simalungun - Kisaran di Kabupaten Asahan
- 17) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. P. Rakyat - Bandar Pulau - Bts. Tobasa di Kabupaten Asahan.
- 18) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sp. Kota Pinang - Bts. Padang Lawas Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 19) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 20) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Aek Humbang - Bts. Tapanuli Selatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 21) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Siborongborong - Aek Humbang di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 22) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Pangaribuan - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 23) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Silimbat - Parsoburan di Kabupaten Tobasamosir.
- 24) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Pakkat - Parlilitan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 25) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Nainggolan - Pangururan di Kabupaten Samosir.
- 26) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Tomok - Onan Runggu - Nainggolan di Kabupaten Samosir.
- 27) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sorkam Kiri - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 28) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Barus - Bts. Humbahas di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 29) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Pal XI - Aek Godang di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 30) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Simangambat - Sipagimbar di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 31) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sapirook - Simangambat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 32) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sipenggeng - Marancar - Sapirook di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 33) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. KM. 150 - Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas.
- 34) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Gunung Tua - KM. 168 (Binanga) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

- 35) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Binanga - Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas.
- 36) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Gunung Tua - Hutaimbaru di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 37) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Hutaimbaru - Bts. Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 38) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Hutaimbaru - Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 39) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Aek Godang - KM. 150 di Kabupaten Padang Lawas.
- 40) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sp. Pulo Padang - Batahan - Bts. Sumbar di Kabupaten Mandailing Natal.
- 41) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Jembatan Merah - Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal.
- 42) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Muara Pungkut - Sp. Banyak di Kabupaten Mandailing Natal.
- 43) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Lahewa - Afulu di Kabupaten Nias Utara.
- 44) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sirombu - Lolowau di Kab Nias Barat.
- 45) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Sirombu - Lasara Bagawu di Kab Nias Barat.
- 46) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Tuhemberua - Lahewa di Kabupaten Nias Utara.
- 47) Pembukaan Ruas Jalan Provinsi Jurs. Afulu - Sirombu di Kabupaten Nias Utara.
- 48) Lanjutan Pembangunan Jembatan Lau Luhung di Kabupaten Deli Serdang.
- 49) Pembangunan Jembatan Sei Dadap 4 pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sp. Tanah Abang - Bts. Simalungun di Kabupaten Deli Serdang.
- 50) Penggantian Jembatan Aek Sigilingan pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Hutaimbaru - Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 51) Penggantian Jembatan Aek Pargampualam pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pulau Rakyat - Bdr. Pulau - Bts. Tobasa di Kabupaten Asahan.
- 52) Penggantian Jembatan Aek Dolok pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pulau Rakyat - Bdr. Pulau - Bts. Tobasa di Kabupaten Asahan.

- 53) Penggantian Lantai Jembatan Sei Rakyat di Kabupaten Labuhanbatu.
- 54) Pembangunan Jembatan Aek Sidoldolan Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pangururan - Ambarita - Tomok di Kabupaten Samosir.
- 55) Pembangunan Jembatan Aek Sihorbo Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pakkat - Parlilitan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 56) Pembangunan Box Culvert 3 (tiga) Unit pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Tomok - Onan Runggu di Kabupaten Samosir.
- 57) Penggantian Jembatan Aek Tombang Garabak Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Muara Soma - Sp. Gambir Km. 227+600 di Kabupaten Mandailing Natal.
- 58) Penggantian Jembatan Aek Sidogur pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sipagimbar - Tolang di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 59) Pembangunan Jembatan Aek Tangga Bosi pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Binanga - Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas.
- 60) Penggantian Jembatan Aek Pongkoru pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Muara Pungkut - Sp. Banyak di Kabupaten Mandailing Natal.
- 61) Pembangunan Jembatan Idano Lahomi Km 83+850 (Tahap II) di Kabupaten Nias Barat.
- 62) Pembangunan Jembatan Idano Lahoia pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sirombu - Afulu di Kabupaten Nias Barat.
- 63) Pembangunan Jembatan Idano Buluh Owa pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sirombu - Afulu di Kabupaten Nias Barat.
- 64) Pembangunan Jembatan Bawo Lafao pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Lolowau - Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan.
- 65) Pembangunan Jembatan Idano Sohoya pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Lahewa - Afulu di Kabupaten Nias Utara.
- 66) Pembangunan Jembatan Idano Soyo 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Lahewa - Afulu di Kabupaten Nias Utara.
- 67) Pembangunan Jembatan Idano Suafulu pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Lahewa - Afulu di Kabupaten Nias Utara.
- 68) Pembangunan Box Culvert Sisara Hili pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Miga - Lolowau di Kabupaten Nias Barat.
- 69) Pembangunan Box Culvert Balua Hasimi pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Lolowau - Teluk Dalam (Km. 110) di Kabupaten Nias Selatan.

- 70) Penggantian Jembatan Aek Papaso II Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Aliaga - Muara Tige di Kabupaten Padang Lawas.
- 71) Penggantian Jembatan Aek Papaso III Pada Ruas Jalan Provinsi Aliaga - Muara Tige di Kabupaten Padang Lawas.
- 72) Pembangunan Jembatan Idano Totoi pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Tuhemberua - Lahewa di Kabupaten Nias Utara.

- **Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat.
- 2) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Binjai.
- 3) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Medan.
- 4) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Deli Serdang.
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Tebing Tinggi.
- 7) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karo.
- 8) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Simalungun.
- 9) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Pematangsiantar.
- 10) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.
- 11) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Asahan.
- 12) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Tanjung Balai.
- 13) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Batu Bara.
- 14) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Labuhanbatu.
- 15) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 16) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Tobasamosir.
- 17) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Samosir.
- 18) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 19) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 20) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Padangsidimpuan.
- 21) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Padang Lawas/ Padang Lawas Utara.
- 22) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 23) Pemeliharaan Rutin jalan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 24) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias/Nias Utara.
- 25) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan/Nias Barat.
- 26) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Langkat.
- 27) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Deli Serdang.

- 28) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 29) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Karo.
- 30) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.
- 31) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Simalungun.
- 32) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Asahan.
- 33) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Batu Bara.
- 34) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Labuhanbatu.
- 35) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 36) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Tobasamosir.
- 37) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Samosir.
- 38) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 39) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 40) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Padang Lawas/Padang Lawas Utara.
- 41) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 42) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 43) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias/Nias Utara.
- 44) Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan/Nias Barat.
- 45) Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Tanjung Pura - Namu Unggas di Kabupaten Langkat.
- 46) Pembuatan Parit Pasangan pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Namu Ukur - Bts. Karo di Kabupaten Langkat.
- 47) Pembuatan Parit Pasangan pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Binjai - Timbang Lawang di Kabupaten Langkat.
- 48) Penanganan Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Salak - Ulu Merah di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 49) Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Batas Simalungun - Kisaran di Kabupaten Asahan.
- 50) Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Kabanjahe - Kuta Rakyat - Bts. Langkat di Kabupaten Karo.
- 51) Pembangunan Tembok Pengaman dan Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sorkam Kiri - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah.

- 52) Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Jembatan Merah - Muara Soma - Sp. Gambir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 53) Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Air Limbah Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun.
- 54) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Perbaungan - Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 55) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun.
- 56) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Kabanjahe - Kuta Rakyat di Kabupaten Karo.
- 57) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Lima Puluh - Bts. Simalungun di Kabupaten Batubara.
- 58) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Perdagangan - Bts. Asahan (Limapuluh) di Kabupaten Simalungun.
- 59) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Aek Nabara - Negeri Lama di Kabupaten Labuhanbatu.
- 60) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Dolok Sanggul - Batas Tapanuli Tengah di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 61) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Tele - Pangurusan di Kabupaten Samosir.
- 62) Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurs. Ambarita - Tomok di Kabupaten Samosir.
- 63) Pembuatan Tembok Penahan dan Box Culvert Pada Kawasan Industri di Kota Medan.
- 64) Perbaikan Gelagar dan Lantai Jembatan Sei Sarinah 2 dan Sei Patumbak 4 pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Sp. Tanah Abang - Bts. Simalungun di Kabupaten Deli Serdang.
- 65) Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Aek Godang - Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 66) Penanggulangan Longsor pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Tomok - Onan Runggu - Nainggolan di Kabupaten Samosir.

Permasalahan :

Adanya beberapa kegiatan yang realisasi fisik pelaksanaan tidak selesai 100 % sesuai dengan batas waktu kontrak sampai dengan batas Tahun Anggaran berakhir.

Solusi :

Putus kontrak.

- **Program Pembinaan Jalan dan Jembatan**

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Survey Teknis Jembatan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Perencanaan Teknis Jalan.
- 5) Perencanaan Teknis Jembatan.
- 6) Penyusunan Lakip dan Tapkin Dinas Bina Marga Provsu Tahun 2012.
- 7) Pengawasan Jalan Provinsi.
- 8) Pengawasan Pembangunan dan Penggantian Jembatan Provinsi.
- 9) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi.
- 10) Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Rutin dan Alat Berat.
- 11) Monitoring dan Evaluasi Peralatan.
- 12) Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Agregat, Hotmix dan Beton.
- 13) Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan.
- 14) Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan.
- 15) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium.
- 16) Penyusunan Rancangan RPJMD, Renstra, Renja dan Grand Design Bidang Kebinamargaan Provsu.
- 17) Penyusunan Program Kegiatan Dinas Bina Marga Provsu Tahun 2013.
- 18) Pemutakhiran Data dan Inventarisasi PMIS.
- 19) Lanjutan Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- 20) Pameran Guna Mendukung Pembangunan Infrastruktur.
- 21) Sistem Manajemen Mutu.
- 22) Pelatihan Mekanik Engine dan Operator Tingkat Dasar.
- 23) Perencanaan Jaringan Jalan Kawasan Mebidangro.
- 24) Perencanaan Jaringan Jalan Akses KEK Sei Mangkei.

CAPAIAN PERSENTASE PEMBINAAN UKM DAN WIRAUSAHA

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara untuk periode 2011 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,01% dengan peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 4,86%. Koperasi yang melaksanakan RAT juga meningkat sebesar 1,41% seiring dengan pertumbuhan koperasi. Jumlah serapan tenaga kerja di bidang koperasi (manajer dan karyawan) periode 2011 – 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,71 % dan 2,65%. Jumlah anggota koperasi juga menunjukkan kenaikan sebesar 0,78 %.

Tabel 50
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Keadaan	
		2011	2012
1	Jumlah Koperasi	10.879	11.206
	Aktif (Unit)	6.395	6.706
	Tidak Aktif (Unit)	4.484	4.500
2	Anggota (Orang)	1.976.709	1.992.127
3	RAT (Unit)	3.979	4.035
4	Manajer (Orang)	1.348	1.425
5	Karyawan (Orang)	10.249	10.521
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	1.565.971.797	1.580.848.089
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.217.760.703	1.271.592.156
8	Volume Usaha (Rp. 000)	3.636.480.633	3.741.318.994
9	SHU (Rp. 000)	302.034.958	303.907.632

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar juga mengalami peningkatan, modal sendiri meningkat sebesar 0,95 % dan modal luar meningkat sebesar 4,42 %. Peningkatan modal luar ini sebahagian berasal dari stimulan dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah. Stimulan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi. Sementara itu transaksi usaha koperasi pada periode 2011 – 2012 menunjukkan peningkatan nilai volume usaha sebesar 2,88 % dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,62%

Tabel 51
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara Tahun 2012

No	Sektor	Jumlah (unit)
1	Mikro	1.453.064
2	Kecil	698.665
3	Menengah	136.575
4	Usaha Besar	229.552
5	Tidak dapat diklasifikasi	21.561
JUMLAH		2.539.416
JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA		625.955

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Proporsi jumlah usaha mikro dalam struktur dunia usaha di Sumatera Utara sampai tahun 2012 masih menjadi yang terbesar yaitu sebesar 57,22 %. Besarnya porsi usaha mikro ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaannya merupakan persemiaan usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak UMKM yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya. Kegiatan usaha skala mikro dan kecil ini juga difasilitasi oleh koperasi yang terus berkembang.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- ***Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pelatihan Calon Wirausaha Bagi Pengusaha Wanita UMKM.
- 2) Pelatihan Sertifikasi Standard Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan.
- 3) Bimtek Tata Cara Pengelolaan Usaha Koperasi Yang Berwawasan Lingkungan.
- 4) Sosialisasi Strategi Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Perikanan dan Peternakan.
- 5) Bimtek Optimalisasi Penanganan Usaha Pertanian dan Perkebunan Oleh Koperasi.
- 6) Rapat Koordinasi Identifikasi Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Koperasi Yang Bergerak di Bidang Perikanan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
- 7) Pameran dan Pasar UMKM Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Rakyat Menjelang hari Besar Keagamaan.
- 9) Promosi Produk KUKM Melalui Pasar Dalam dan luar Negeri.
- 10) Pengembangan Kemasan/Packaging Dalam Rangka Inovasi dan Promosi Produk KUKM.
- 11) Bimtek Pengembangan Industri Kreatif Bagi UMKM.
- 12) Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Teknologi bagi Produk UMKM.
- 13) Intensifikasi dan Diversifikasi Produk Makanan.
- 14) Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Bagi Asosiasi Pengusaha Kecil Kabupaten Langkat.

- 15) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Deli Serdang.
- 16) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Langkat.
- 17) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Serdang Bedagai.
- 18) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Batubara.
- 19) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Asahan.
- 20) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Tanjungbalai.
- 21) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 22) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 23) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Labuhanbatu.
- 24) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Karo.
- 25) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Simalungun.
- 26) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kota Pematangsiantar.
- 27) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Tobasamosir.
- 28) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kabupaten Samosir.
- 29) Bimbingan Teknis Manajemen dan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok PKK Kota Tebing Tinggi.
- 30) Diseminasi Koperasi dan Ekonomi Syariah Bagi Ormas Wanita Islam Kota Binjai.
- 31) Diseminasi Koperasi dan Ekonomi Syariah Bagi Ormas Wanita Islam Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 32) Diseminasi Koperasi dan Ekonomi Syariah Bagi Ormas Wanita Islam Kabupaten Padang Lawas.
- 33) Diseminasi Koperasi dan Ekonomi Syariah Bagi Ormas Wanita Islam Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 34) Diseminasi Koperasi dan Ekonomi Syariah Bagi Ormas Wanita Islam Kabupaten Mandailing Natal.

- 35) Temu Solusi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Menuju Soko Guru Perekonomian Nasional.
- 36) Temu Dialog Pimpinan Ponpes dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Kopontren.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

Permasalahan :

- 1) Rendahnya daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi yang ditunjukkan oleh kesulitan UMKM meningkatkan produksi (produktivitas) dan bersaing di pasar.
- 2) Rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.
- 3) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi.
- 4) Kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu, desain produk dan kebutuhan konsumen.

Solusi :

- 1) Melakukan penyuluhan, pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM dalam mengelola usaha untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.
- 2) Melakukan pelatihan keterampilan serta menanamkan jiwa kewirausahaan.
- 3) Mengarahkan pemberdayaan KUMKM kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi.
- 4) Penyediaan sistem insentif atau fasilitasi dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

• ***Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bimtek Peningkatan Mutu SDM KUKM dalam rangka Akses Permodalan dan Sarana.
- 2) Pengadaan Sarana Usaha Peralatan Bagi UKM.
- 3) Konsolidasi KSP/USP.

- 4) Pendataan dan Pemanfaatan Kios Kapasitas 30 Ton dan GLK 150 Ton Serta 100 Ton.
- 5) Pengadaan Peralatan Mesin Pembuat Opak.
- 6) Pengadaan Peralatan Pengering/Vacum Drying Ikan tawar Bagi KUKM
- 7) Pengadaan Pengrajin Rotan Kopinkra.
- 8) Pengadaan Peralatan Produksi Bagi KUKM Produksi Meubeleur.
- 9) Pengadaan Alat Pertanian Bagi KUKM (Handtraktor dan Pemipil Jagung).
- 10) Identifikasi Koperasi yang Bergerak di Bidang Produksi.
- 11) Sosialisasi Pengembangan Pola Ekonomi Syariah Bagi Koperasi Syariah dan Kopontren.
- 12) Sosialisasi Prinsip Kewirausahaan Koperasi Bagi Organisasi Wanita dan Kopwan.
- 13) Sosialisasi Pengembangan Usaha Koperasi Sekolah.
- 14) Dukungan Sarana Usaha Bagi UMKM Wanita yang Bergerak di Bidang Tata Rias.
- 15) identifikasi dan Pendataan Produk Unggulan UMKM Kabupaten/Kota Oleh Tim Terpadu dalam Rangka Pelaksanaan Program OVOP.
- 16) Promosi Bagi KUKM Sumatera Utara melalui Media Elektronik dan Cetak.
- 17) Penelitian Dampak Bantuan Permodalan Bagi KUKM di Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan.
- 18) Kajian Efektifitas Penumbuhan Klaster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis di Kabupaten Karo.
- 19) Kajian Efektifitas Penumbuhan Klaster Bisnis UKM Berbasis agribisnis di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 20) Pembangunan Gedung Pusat Promosi dan Dagang UKM Provinsi Sumatera Utara.
- 21) Pengadaan Sarana Usaha Kepada Pengusaha Bakso.
- 22) Pengadaan Sarana Usaha Kepada Pengusaha Keripik.
- 23) Pengadaan Genset Kepada Kopontren dalam rangka Dukungan Terhadap Produktifitas dan kontinuitas Produksi.
- 24) Penyusunan Ranperda Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).
- 25) Pengadaan Mesin Genset Kepada KUKM Untuk Meningkatkan Produktifitas dan Kontinuitas produksi.
- 26) Pengadaan Alat Pertanian Bagi KUKM.
- 27) Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi KUKM.

Permasalahan :

- 1) Kurangnya kemampuan KUKM untuk memperoleh permodalan.
- 2) Kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM.
- 3) Belum optimalnya pelibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan KUMKM.

Solusi :

- 1) Peningkatan akses usaha KUKM kepada sumber daya produktif serta membentuk Perusahaan Daerah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PT. PER).
- 2) Mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif.
- 3) Pengembangan dan penguatan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM serta para *stakeholders*.

• ***Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Koperasi.
- 2) Sosialisasi Perkuatan Nilai Dadar Perkoperasian dan Pemantapan Jati Diri Koperasi.
- 3) Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi Menuju Koperasi Berkualitas.
- 4) Evaluasi Mutu Kelembagaan Melalui Identifikasi Terpadu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar koperasi (GEMASKOP).
- 6) Peningkatan Peran Koperasi di Desa Binaan TP.PKK Provinsi.
- 7) Dukungan Terhadap Hari Koperasi ke-65 Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RAT.

Permasalahan :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat maupun anggota terhadap prinsip dan asas berkoperasi.
- 2) Belum optimalnya fungsi koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 3) Belum optimalnya peran pembina, penyuluh dan lembaga gerakan koperasi.

Solusi :

- 1) Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.
- 2) Penyediaan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
- 3) Memberdayakan pembina, penyuluh dan lembaga gerakan koperasi melalui bimbingan atau pelatihan.

• ***Program Penciptaan Uklim Usaha KUKM Yang Kondusif***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir dan Sarana Bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Bantuan yang di Hibahkan ke Kabupaten/ Kota.
- 3) Diseminasi Pengembangan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Daerah.
- 4) Pelatihan Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi, Juru Buku dan bendahara koperasi.
- 5) Pelatihan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Pengelola KSP.
- 6) Pelatihan Manajemen Koperasi Bagi Pengurus Koperasi.
- 7) Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Syariah.
- 8) Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM yang Bergerak di Bidang Makanan.
- 9) Sosialisasi HAKI dan SNI Terhadap Produk UMKM.
- 10) Pemberdayaan Rumah Produktifitas Daerah Melalui Pembinaan 1000 Sarjana Non Produktif Pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- 11) Penyusunan Database UKM.
- 12) Updating Database Koperasi serta Pembinaan Penanggungjawab serta Operator Data.
- 13) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender di Bidang Koperasi dan UKM.
- 14) Pengembangan KUKM pada Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Melalui Bimtek dan Pengadaan Sarana dan Prasarana.
- 15) Pengembangan KUKM pada Daerah Agromarinepolitan (Frezer ikan).

- 16) Sinkronisasi Kinerja Program/Kegiatan Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM se Sumatera Utara.
- 17) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KUR.
- 18) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.
- 19) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Langkat, Kota Medan dan Binjai.
- 20) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai.
- 21) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.
- 22) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidempuan.
- 23) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
- 24) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tobasamosir dan Humbang Hasundutan.
- 25) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
- 26) Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM di Pemerintah Kabupaten Samosir, Simalungun dan Kota Pematangsiantar.
- 27) Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan APBD Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

- 1) Belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat dari adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi.
- 2) Kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

- 3) Masih adanya *gap* antara kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumber daya.

Solusi :

- 1) Mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif untuk menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi dan UMKM.
- 2) Peningkatan peran-peran lembaga swasta dan masyarakat dan menyediakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- 3) Peningkatan akses usaha kepada sumber daya.

• ***Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Diseminasi Akses Pasar Dalam Negeri dan Eksport Bekerjasama Dengan P3ED (Pusat Pelatihan dan Pengembangan eksport Daeah).
- 2) Pendampingan Kegiatan Gerai Permanen Smesco KUKM di Jakarta.
- 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Daerah Penghasil Tembakau.
- 4) Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Daerah Penghasil Tembakau.
- 5) Pengelolaan UKM center.

Permasalahan :

- 1) Belum berkembangnya karakteristik wirausaha pada UMKM.
- 2) Tidak siapnya UMK menghadapi tantangan masuknya produk-produk luar negeri.
- 3) Kurangnya respon masyarakat terhadap produk UMK.

Solusi :

- 1) Melakukan pelatihan kewirausahaan serta membangun kerjasama dalam pengembangan UMKM.
- 2) Melakukan peningkatan mutu produk UMK.
- 3) Memfasilitasi pemasaran produk-produk UMK melalui pameran, kemitraan, subcontracting dan lain-lain dalam rangka perluasan pemasaran.

Sasaran Strategis 4 : MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN KEPERDULIAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Pencapaian Sasaran Starategis pertama ini akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebagai berikut :

**TABEL 48
CAPAIAN INDIKATOR**

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan					
a. Kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
b. Ekonomi produktif masyarakat desa	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
c. Program PNMPM	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan	33	Kab/ Kota	33	Kab/ Kota	100%
Persentase tingkat pelayanan terhadap wajib pajak					
a. SAMSAT delivery	4	UPT	4	UPT	100%
b. SAMSAT CORNER dan SAMSAT di Pusat - pusat perbelanjaan dan tempat layanan umum lainnya	4	unit	4	unit	100%
c. Pengembangan kualitas Teknologi Informasi/ Sistem Informasi UPT SAMSAT	2	paket	2	paket	100%
d. Standard informasi publik yang dibuat	1	Draft	1	Draft	100%
e. Peningkatan Kapasitas Kinerja SAMSAT se-Sumatera Utara	33	UPT Samsat	33	UPT Samsat	100%
f. Frekwensi Pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak	19	Kali	18	Kali	95%
g. Frekuensi Monitoring dan evaluasi	12	Bulan	12	Bulan	100%
h. Frekuensi Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu	2	kali	2	kali	100%
Frekwensi pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan					
a. Frekuensi Pelaksanaan Forum Komunikasi	1	kali	1	kali	100%
Persentase pembinaan ormas	1	100%			0.00%
a. Jumlah Evaluasi PAW se Sumatera Utara	38	Parpol	38	Parpol	100%
	33	Kab / Kota	33	Kab / Kota	
b. Pemberian bantuan	300	Ormas , LSM	300	Ormas , LSM	100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
Frekwensi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI					
a Orientasi Ketahanan Bangsa bagi Pemuda dan Pelajar Sumatera Utara	2	Hari	2	Hari	100%
	100	Org	100	Org	
b Pemantapan Wawasan Kebangsaan	2	Kali	2	Kali	100%
	450	Org	450	Org	
c Konsultasi Aparat Pembina Kesbang se Sumut	2	Hari	2	Hari	100%
	100	Org	100	Org	
d Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu	1	Forum	1	Forum	100%

CAPAIAN INDIKATOR FREKWENSI PELAKSANAAN DIALOG PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Capaian relisasi pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan di awal tahun, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa program/ kegiatan yang ada telah terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2011 untuk kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari Program Penguatan Kelembagaan dan Informasi Hubungan Antar Lembaga ada terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1) Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 2) Evaluasi PAW se Sumatera Utara.
- 3) Forkomkon Antara Pemerintah dengan Pimpinan Parpol & Tokoh Masyarakat.
- 4) Pendidikan Politik Bagi Organisasi Wanita.
- 5) Forkomkon Antara Politisi Muda Anggota Parlemen Provinsi & Kabupaten/ Kota dimana seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sementara untuk tahun 2012 kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari Program Penguatan Kelembagaan dan Informasi Hubungan Antar Lembaga juga terdapat 5 (lima) kegiatan yakni :

- 1) Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 2) Evaluasi PAW Se Sumatera Utara.
- 3) Pendidikan Politik Bagi Organisasi Wanita.
- 4) Pendidikan Politik Bagi Aparat Kesbang Pol Kabupaten/Kota.
- 5) Pemantapan Elemen Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Dimana seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2011 untuk kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP dari Program Penguatan Kelembagaan dan Informasi Hubungan Antar Lembaga ada 1 (satu) kegiatan yaitu Forkomkon Antara Pemerintah dengan pimpinan Ormas dan LSM dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Sementara untuk tahun 2012 untuk Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP dari Program Penguatan Kelembagaan dan Informasi Hubungan Antar Lembaga ada terdapat 2 (dua) kegiatan yakni :

- 1) Forkomkon Antara Pemerintah Dengan Pimpinan Ormas & LSM
- 2) Kerjasama PemprovSU dengan Orkesmas sesuai permendagri 44 tahun 2009

Kedua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2011 untuk Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ada 1 (satu) kegiatan dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sementara untuk tahun 2012 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ada terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara, dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2011 untuk Pembinaan Wawasan Kebangsaan ada 1 (satu) kegiatan dan kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Sementara untuk tahun 2012 Pembinaan Wawasan Kebangsaan ada terdapat 1 (satu)

kegiatan yakni Forum Pematapan Wawasan Kebangsaan Tingkat Sumatera Utara dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

CAPAIAN INDIKATOR FREKWENSI PELAKSANAAN SOSIALISAI KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMPERKOKOK NKRI.

Capaian relisasi pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan di awal tahun, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa program/ kegiatan yang ada telah terlaksana dengan baik.

Pada Tahun 2011 untuk Pembinaan Kegiatan Kelinmasan ada 1 (satu) kegiatan yakni latihan peningkatan keterampilan linmas dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Sementara untuk tahun 2012 Pembinaan Kegiatan Kelinmasan ada terdapat 3 (tiga) kegiatan yakni :

1) Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka memperkokoh NKRI.

2) Peningkatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemeliharaan Trantibmas.

3) Pembinaan dan Koordinasi Tugas Linmas.

Ketiga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

19.1 Program Penguatan Kelembagaan dan informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Program ini memuat kegiatan :

1) Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

2) Evaluasi PAW se Sumatera Utara.

3) Pendidikan Politik Bagi Organisasi Wanita.

4) Forkomkon Antara Pemerintah Dengan Pimpinan Ormas & LSM.

5) Pendidikan Politik Bagi Aparat Kesbang Pol Kab / Kota.

6) Pemantapan Elemen Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

- ***Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama Melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- 2) Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tingkat Sumatera Utara.

- ***Program Perlindungan Masyarakat/Penanggulangan Bencana***

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.
- 2) Peningkatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemeliharaan Trantibmas.

C. ASPEK KEUANGAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) sumber penerimaan yakni :

- 1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah,
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/BHP dan Bagi Hasil Bukan Pajak/BHB-P, Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/ DAK,
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 4) Contra Pos

Pada Tahun Anggaran 2012, penerimaan dari sumber-sumber tersebut terus menerus mengalami peningkatan secara bervariasi. Meskipun peningkatannya kurang signifikan, namun secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan yang setiap tahunnya terus meningkat.

Walaupun relatif minim, konstelasi ini membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TA.2012 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dari target Rp.7.889.040.516.493,00 terealisasi Rp. 7.260.579.022.803,00 atau sebesar 92,03%, namun angka tersebut

masih merupakan angka sementara dari pencapaian target pendapatan di Tahun Anggaran 2012.

Rencana Penerimaan (target) dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 49
Target & Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2012

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	720,971,755,617.00	705,696,062,686.62	
I	PAJAK DAERAH	3,835,407,768,128.00	3,636,074,646,214.00	94.80
1	PKB	1,199,237,457,346.00	1,211,376,190,415.00	101.01
2	PKAA	0,00	0,00	0.00
3	BBN – KB	1,831,170,310,782.00	1,808,944,474,183.00	98.79
4	PBB – KB	755,000,000,000.00	587,582,131,614.00	77.83
5	ABT – APU	50,000,000,000.00	28,171,850,002.00	56.34
II	RETRIBUSI DAERAH	39,171,451,121.00	33,494,627,707.00	85.51
A	RETRIBUSI JASA UMUM	4,151,522,309.00	1,387,448,250.00	33.42
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,026,722,309.00	239,265,000.00	23.30
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4,800,000.00	4,000,000.00	83.33
3	Retribusi Tera Ulang Pengujian Mutu Barang	3,120,000,000.00	1,144,183,250.00	36.67
4	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan	0.00	0.00	0.00
B	RETRIBUSI JASA USAHA	12,309,748,436.00	7,567,419,457.00	61.48
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6,651,429,436.00	4,884,628,922.00	73.44
2	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	793,248,000.00	769,137,035.00	96.96
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3,513,321,000.00	1,879,232,000.00	53.49
4	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	689,150,000.00	1,890,000.00	0.27
5	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	662,600,000.00	32,531,500.00	4.91
C	RETRIBUSI IZIN TERTENTU	22,710,180,376.00	24,539,760,000.00	108.06
1	Retribusi Izin Trayek	150,000,000.00	124,820,000.00	83.21
2	Fasilitas Umum - Kelebihan Muatan	22,560,180,376.00	24,414,940,000.00	108.22

II	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	320,173,490,912.00	263,801,1 90,345.00	82.39
1	PD. Perkebunan	29,499,052,490.00	28,000,00 0,000.00	94.92
2	PD. Perhotelan	951,750,000.00	638,000,0 00.00	67.03
3	PD. Aneka Industri dan Jasa	262,500,000.00	0.00	0.00
4	PT. KIM Medan	739,015,856.00	1,029,284 ,934.00	139.28
5	PT. Tirtanadi	0.00	0.00	0.00
6	PT. Bank Sumut	288,721,172,566.00	234,133,9 05,411.00	81.09
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	177,478,929,961.00	127,476,1 07,423.00	71.83
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	199,804,320.00	209,285,9 86.00	104.75
2	Jasa Giro Kas Daerah	35,564,100,000.00	45,558,37 4,120.65	128.10
3	Rekening Deposito pada Bank	7,365,750,000.00	1,859,374 ,997.00	25.24
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - PLL Setdaprovsu	17,250,000,000.00	24,859,44 2,820.35	144.11
5	Pendapatan Denda Pajak	100,876,591,041.00	42,526,21 2,872.00	42.16
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	3,927,984,600.00	4,039,756 ,627.00	102.85
7	Pendapatan dari Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	12,294,700,000.00	8,423,660 ,000.00	68.51

JUMLAH PAD		4,372,231,640,122.00	4,060,846,571,689.00	92.88
V	DANA PERIMBANGAN	1,808,565,308,599.00	1,605,168,715,511.00	88.75
1	Bagi Hasil Pajak	644,149,719,424.00	451,835,888,505.00	70.14
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	19,397,962,175.00	8,315,200,006.00	42.87
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,103,389,237,000.00	1,103,389,237,000.00	100.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	41,628,390,000.00	41,628,390,000.00	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
VI	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,708,243,567,772.00	1,544,552,841,771.00	90.42
1	Pendapatan Hibah dari JasaRaharja	3,231,131,772.00	4,280,038,000.00	132.46
2	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	35,000,000,000.00	5,807,622,585.00	16.59
3	Annual Fee	55,511,492,000.00	15,491,491,936.00	27.91
4	Dana Tunjangan Guru PNS Daerah	0.00	118,500,000.00	0.00
5	Dana Insentif Daerah	14,928,784,000.00	14,928,784,000.00	100.00
6	Dana Alokasi Bantuan Alokasi Operasional Sekolah	1,599,572,160,000.00	1,503,926,405,250.00	94.02
VII	CONTRA POST		50,010,893,832.00	0.00
Jumlah di koreksi		0.00	0.00	
JUMLAH SELURUHNYA		7,889,040,516,493.00	7,966,275,085,489.62	100.98

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provsu

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah pada tahun 2012 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari dua kelompok yaitu :

- 1) Belanja tidak langsung yaitu merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja seperti : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 2) Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan dengan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD di samping menjelaskan tentang pendapatan daerah dan pembiayaan, juga menjelaskan belanja daerah yang dialokasikan pada APBD dan merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

1. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2012 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 8.305.169.256.857,00 dimana sebesar Rp. 5.582.826.522.690,00 atau 67,22% untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 32,78% atau Rp. 2.722.342.734.167,00 untuk keperluan belanja langsung.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.582.826.522.690,00 dialokasikan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 984.311.589.012,00
- Belanja Hibah Rp. 1.915.169.154.500,00
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 81.967.594.000,00
- Belanja Bagi Hasil Rp. 714.259.949.277,00
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.882.118.235.901,00
- Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00

Belanja langsung sebesar Rp 2.722.342.734.167,00 ditujukan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 179.262.677.840,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.649.271.123.773,00
- Belanja Modal Rp. 893.808.932.554,00

Sedangkan realisasi belanja di atas akan dilampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012, dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bila dilihat dari Urusan Pemerintahan dan Organisasi maka belanja sebesar Rp. 8.305.169.256.857,00 terbagi pada Urusan Wajib Rp. 7.881.121.139.447,00 dan Urusan Pilihan Rp. 424.048.117.410,00

Tabel 50
Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2012

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
1	Dinas Pendidikan	38.285.397.493,00	323.391.278.030,00	361.676.675.523,00
2	Dinas Kesehatan	79.184.038.951,00	186.385.090.750,00	265.569.129.701,00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	19.052.580.479,00	6.952.283.313,00	26.004.863.792,00
4	Rumah Sakit Haji	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5	Dinas Bina Marga	52.726.930.277,00	610.526.993.700,00	663.253.923.977,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	60.260.604.791,00	133.300.146.100,00	193.560.750.891,00
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	31.471.824.785,00	192.247.704.250,00	223.719.529.035,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.525.088.533,00	21.941.719.000,00	31.466.807.533,00
9	Dinas Perhubungan	57.708.110.723,00	17.495.025.000,00	75.203.135.723,00
10	Badan Lingkungan Hidup	9.732.898.831,00	32.713.541.680,00	42.446.440.511,00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	37.385.407.027,00	68.265.505.530,00	105.650.912.557,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.353.443.605,00	10.610.509.791,00	33.963.953.396,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.484.654.196,00	25.215.552.500,00	33.700.206.696,00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4.736.493.900,00	8.577.917.110,00	13.314.411.010,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.228.415.337,00	26.966.051.090,00	43.194.466.427,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.949.066.397,00	13.656.101.450,00	20.605.167.847,00
17	Bakesbangpol dan Linmas	6.691.396.926,00	27.607.112.000,00	34.298.508.926,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2.978.217.836,00	8.357.235.590,00	11.335.453.426,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.019.509.729,00	16.370.339.750,00	20.389.849.479,00
20	DPRD	37.054.144.000,00	0,00	37.054.144.000,00
21	KDH & WKDH	3.381.749.100,00	0,00	3.381.749.100,00
22	Sekretariat Daerah	4.671.053.428.032,00	197.783.875.919,00	4.868.837.303.951,00
23	Sekretariat DPRD	8.354.520.220,00	147.600.317.400,00	155.954.837.620,00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.746.723.606,00	12.527.722.643,00	17.274.446.249,00
25	Inspektorat Provinsi	11.036.585.503,00	19.580.714.500,00	30.617.300.003,00
26	Kantor Perwakilan Jakarta	4.440.932.261,00	9.982.536.760,00	14.423.469.021,00
27	Dinas Pendapatan	157.343.848.160,00	154.180.000.000,00	311.523.848.160,00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.373.953.357,00	19.981.399.855,00	28.355.353.212,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	8.239.080.742,00	12.726.272.550,00	20.965.353.292,00
30	Sekretariat KORPRI	1.737.684.379,00	4.438.270.500,00	6.175.954.879,00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.707.605.383,00	8.737.166.500,00	12.444.771.883,00
32	Badan Ketahanan Pangan	8.018.660.202,00	44.022.708.129,00	52.041.368.331,00
33	Badan Koord. Penyuluhan	5.619.391.666,00	25.142.483.620,00	30.761.875.286,00
34	Bapemmas dan Pemdes	6.311.229.193,00	8.247.182.000,00	14.558.411.193,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.804.797.707,00	22.437.767.513,00	35.242.565.220,00
36	KPID Sumatera Utara	1.586.084.789,00	4.086.018.823,00	5.672.103.612,00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	8.924.197.585,00	23.557.900.400,00	32.482.097.985,00
38	Dinas Pertanian	48.933.905.474,00	84.756.411.900,00	133.690.317.374,00
39	Dinas Perkebunan	13.978.704.487,00	44.035.601.500,00	58.014.305.987,00

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
40	Dinas Peternakan	8.256.648.003,00	28.230.141.071,00	36.486.789.074,00
41	Dinas Kehutanan	33.964.641.947,00	20.104.797.000,00	54.069.438.947,00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8.708.751.779,00	8.234.438.950,00	16.943.190.729,00
43	Dinas Perikanan Dan Kelautan	13.350.503.155,00	78.898.004.100,00	92.248.507.255,00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.124.672.144,00	8.470.895.900,00	32.595.568.044,00
Jumlah.....		5.582.826.522.690,00	2.722.342.734.167,00	8.305.169.256.857,00

Sumber : Biro Keuangan Setdaprovsu

Besaran berupa persentase jumlah realisasi belanja urusan wajib maupun urusan pilihan belum dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan hasil audit tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara guna pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme ketentuan yang mengatur untuk itu.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah yang tetap muncul dalam penyusunan APBD adalah banyaknya kebutuhan yang diajukan dalam penganggaran sementara kemampuan dana yang tersedia terbatas.

Solusi :

Menetapkan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai usulan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, serta dimaksudkan untuk membiayai selisih kurang bila Belanja Daerah lebih besar dari Pendapatan Daerah atau memanfaatkan surplus Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Pinjaman Dalam Negeri;
5. Penerimaan Kembali Pinjaman.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri;
4. Pemberian Pinjaman.

Tahun Anggaran 2012 posisi pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp. 416.128.740.364,00 dengan rincian penerimaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp. 720.971.755.617,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 304.843.015.253,00 yang dimanfaatkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.295.000.000.000,00 serta pembayaran pokok utang Pemerintah Rp. 9.843.015.253,00.

Permasalahan :

1. Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah tahun 2012 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Adanya perubahan rencana yang menyangkut volume pekerjaan, standar harga dan lokasi sehingga harus ditempuh melalui perubahan APBD.
3. Perubahan regulasi sering terjadi dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Solusi :

1. SKPD pengelola PAD diharapkan lebih pro aktif dalam pengelolaan pendapatan yang dibebankan kepada SKPD yang bersangkutan.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan seharusnya tetap mengacu kepada pencapaian nilai manfaat dan efisiensi.
3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara optimal dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat lebih ditingkatkan.